

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH**

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan. Laporan ini memuat:
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah; dan
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Lampiran.....	viii
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan	1
Gambaran Umum Pemeriksaan	4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	4
2. Standar Pemeriksaan.....	4
3. Tujuan Pemeriksaan.....	4
4. Entitas yang Diperiksa.....	4
5. Lingkup Pemeriksaan.....	4
6. Metodologi Pemeriksaan	4
7. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	5
8. Batasan Pemeriksaan	5
Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah	1 -
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas	2 -
1. Laporan Realisasi Anggaran (<i>Audited</i>)	2 -
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (<i>Audited</i>)	5 -
3. Neraca (<i>Audited</i>)	6 -
4. Laporan Operasional (<i>Audited</i>).....	8 -
5. Laporan Arus Kas (<i>Audited</i>)	11 -
6. Laporan Perubahan Ekuitas (<i>Audited</i>)	13 -
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	14 -
7.1. Pendahuluan.....	14 -
7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	17 -
7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	27 -
7.4. Kebijakan Akuntansi	36 -
7.5. Penjelasan atas Laporan Keuangan.....	40 -
7.6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.....	154 -
7.7. Penutup	155 -
Lampiran	155 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Indikator Sosial Ekonomi.....	- 17 -
Tabel 2: Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kapuas	- 17 -
Tabel 3: Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kapuas.....	- 18 -
Tabel 4: Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kapuas.....	- 18 -
Tabel 5: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas	- 18 -
Tabel 6: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kapuas	- 19 -
Tabel 7: PDRB atas dasar harga konstant (Juta Rupiah).....	- 20 -
Tabel 8: Tingkat Inflasi Kabupaten Kapuas	- 20 -
Tabel 9: Tingkat Struktur perekonomian Kabupaten Kapuas	- 21 -
Tabel 10: Proyeksi Pendapatan Daerah TA 2023	- 22 -
Tabel 11: Penerimaan Pembiayaan	- 26 -
Tabel 12: Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja Per Perangkat Daerah ..	- 29 -
Tabel 13: Perangkat Daerah pada Kabupaten Kapuas	- 36 -
Tabel 14: Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022	- 41 -
Tabel 15: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022	- 41 -
Tabel 16: Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022.....	- 41 -
Tabel 17: Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 per SKPD	- 42 -
Tabel 18: Pendapatan Retribusi Daerah 2023 dan 2022	- 43 -
Tabel 19: Rincian Pendapatan Retribusi per SKPD	- 43 -
Tabel 20: Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	- 44 -
Tabel 21: Realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	- 44 -
Tabel 22: Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per SKPD	- 45 -
Tabel 23: Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	- 47 -
Tabel 24: Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022	- 47 -
Tabel 25: Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022.-	- 48 -
Tabel 26: Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022	- 48 -
Tabel 27: Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022	- 49 -
Tabel 28: Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022	- 50 -
Tabel 29: Rincian Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	- 50 -
Tabel 30: Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022	- 51 -
Tabel 31: Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	- 51 -
Tabel 32: Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022	- 51 -
Tabel 33: Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 berdasarkan Perangkat Daerah.....	- 53 -
Tabel 34: Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 per akun.....	- 54 -
Tabel 35: Realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 dan 2022 per SKPD	- 55 -
Tabel 36: Rincian Belanja Bunga Kabupaten Kapuas	- 56 -
Tabel 37: Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 per akun	- 56 -
Tabel 38: Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 berdasarkan Perangkat Daerah ..	- 56 -

Tabel 39: Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 per Akun	57 -
Tabel 40: Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 per SKPD	57 -
Tabel 41: Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022	57 -
Tabel 42: Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022	59 -
Tabel 43: Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022	59 -
Tabel 44: Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022	60 -
Tabel 45: Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) per Perangkat Daerah	61 -
Tabel 46: Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022	62 -
Tabel 47: Rekapitulasi Peruntukkan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023	62 -
Tabel 48: Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 per akun	63 -
Tabel 49: Rincian Sisa lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	64 -
Tabel 50: Rincian LPSAL Tahun Anggaran 2023 dan 2022	71 -
Tabel 51: Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022	72 -
Tabel 52: Rincian Aset Lancar 31 Desember 2023 dan 2022	73 -
Tabel 53: Rincian Kas di Kas Daerah	73 -
Tabel 54: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	75 -
Tabel 55: Rincian Kas di BLUD	75 -
Tabel 56: Mutasi Kas di BLUD RSUD	75 -
Tabel 57: Rincian Kas di BLUD	75 -
Tabel 58: Rincian Saldo Kas di BLUD Tunai dan Bank	75 -
Tabel 59: Rincian Posisi Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022	76 -
Tabel 60: Rincian Dana BOS per Jenis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2023	76 -
Tabel 61: Rincian Kas di Bendahara Dana BOS per Jenis Bantuan Operasional Sekolah	76 -
Tabel 62: Rincian Dana Lainnya (BOK Kesehatan) Tahun 2023	77 -
Tabel 63: Rincian Piutang Tahun 2023	77 -
Tabel 64: Saldo Piutang Pajak	78 -
Tabel 65: Rincian Piutang Pajak Restoran disajikan per Tahun	78 -
Tabel 66: Rincian Piutang Pajak Reklame	78 -
Tabel 67: Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan	79 -
Tabel 68: Rincian Piutang Pajak Parkir	79 -
Tabel 69: Rincian Piutang Pajak Air Tanah	79 -
Tabel 70: Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	79 -
Tabel 71: Piutang Retribusi Daerah	80 -
Tabel 72: Piutang Lain- lain PAD yang Sah	81 -
Tabel 73: Mutasi Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak	82 -
Tabel 74: Penyisihan Piutang	82 -
Tabel 75: Rincian Penyisihan Piutang	82 -
Tabel 76: Penyisihan Piutang Pajak Restoran	83 -
Tabel 77: Penyisihan Piutang Pajak Reklame	83 -
Tabel 78: Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan	83 -
Tabel 79: Penyisihan Piutang Pajak Parkir	83 -
Tabel 80: Penyisihan Piutang PBB P2	84 -
Tabel 81: Penyisihan Piutang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan	84 -

Tabel 82: Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	84 -
Tabel 83: Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah.....	84 -
Tabel 84: Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pertanian.....	84 -
Tabel 85: Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	84 -
Tabel 86: Penyisihan Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	84 -
Tabel 87: Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Dinas Pertanian.....	85 -
Tabel 88: Penyisihan Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.....	85 -
Tabel 89: Penyisihan Piutang Kerugian Keuangan Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	85 -
Tabel 90: Penyisihan Piutang BLUD	85 -
Tabel 91: Penyisihan Piutang Denda PBB P2.....	85 -
Tabel 92: Rincian Beban dibayar Dimuka	85 -
Tabel 93: Rincian Persediaan per jenis dan SOPD	86 -
Tabel 94: Rincian Persediaan SOPD.....	87 -
Tabel 95: Rincian Investasi Jangka Panjang	88 -
Tabel 96: Metode Pencatatan per Investasi.....	88 -
Tabel 97: Penyertaan Modal di PT. Bank Pembangunan Kalteng	88 -
Tabel 98: Penyertaan Modal di PDAM Tirta Pabelum Kapuas	90 -
Tabel 99: Penyertaan Modal di PD Panunjung Tarung	94 -
Tabel 100: Perkembangan Investasi ke PD Panunjung Tarung tahun 2006 - 2023.....	94 -
Tabel 101: Penyertaan Modal di PT. JMKRIDA Kalimantan Tengah	95 -
Tabel 102: Rincian Aset Tetap	96 -
Tabel 103: Mutasi Aset Tetap Tanah	96 -
Tabel 104: Mutasi aset tetap tanah disajikan pada tabel sebagai berikut.	96 -
Tabel 105: Belanja Modal Tanah Tahun 2023.....	97 -
Tabel 106: Reklas /Pindah Ruang Aset Tahun 2023	97 -
Tabel 107: Reklas dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023.....	97 -
Tabel 108: Aset Tetap Tanah dari Hibah Pusat /Provinsi/ Desa	97 -
Tabel 109: Aset Yang Belum Tercatat	98 -
Tabel 110: Mutasi Aset Peralatan dan Mesin.....	98 -
Tabel 111: Rincian Saldo Peralatan dan Mesin.....	98 -
Tabel 112: Bertambah dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	99 -
Tabel 113: Mutasi Tambah Pindah Ruang/ KIB.....	100 -
Tabel 114: Penambahan Peralatan dan Mesin dari Hibah.....	100 -
Tabel 115: Pertambahan Dari Reklas Barang dan Jasa	101 -
Tabel 116: Pengurangan Penghapusan.....	101 -
Tabel 117: Mutasi Kurang Pindah Ruang / KIB	101 -
Tabel 118: Mutasi Kurang Pindah Ekstra Kompetabel	102 -
Tabel 119: Mutasi Kurang – Reklas ke Barang dan Jasa	102 -
Tabel 120: Peningkatan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan	103 -
Tabel 121: Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan	103 -
Tabel 122: Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023	103 -

Tabel 123: Mutasi Tambah Pindah Ruang/ KIB	104 -
Tabel 124: Mutasi Tambah dari Hibah	105 -
Tabel 125: Temuan Aset Yang Belum Tercatat	105 -
Tabel 126: Tambah Aset Gedung dan Bangunan Reklas Belanja Barang dan Jasa	105 -
Tabel 127: Bertambah dari – Utang Pengadaan	106 -
Tabel 128: Mutasi Kurang – Penghapusan	106 -
Tabel 129: Reklas Kurang Pindah Ruang/ KIB	106 -
Tabel 130: Peningkatan Saldo Gedung dan Bangunan	107 -
Tabel 131: Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	107 -
Tabel 132: Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	108 -
Tabel 133: Reklas Pindah Ruang/ KIB	108 -
Tabel 134: Tambah dari Belanja Barang dan Jasa	108 -
Tabel 135: Kurang Aset - Penghapusan	109 -
Tabel 136: Mutasi kurang Pindah Ruang/ KIB	109 -
Tabel 137: Mutasi Aset Tetap Lainnya	109 -
Tabel 138: Tambah dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110 -
Tabel 139: Mutasi Kurang Pindah/ KIB	110 -
Tabel 140: Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan	111 -
Tabel 141: Mutasi Tambah Pindah ruang / KIB	111 -
Tabel 142: Mutasi Tambah dari Barang dan Jasa	112 -
Tabel 143: Mutasi kurang Pindah ruang / KIB	112 -
Tabel 144: Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	113 -
Tabel 145: Beban Penyusutan per SKPD	113 -
Tabel 146: Pengurangan Penghapusan Akumulasi Penyutan Aset Tetap	114 -
Tabel 147: Rincian Aset lainnya	115 -
Tabel 148: Tagihan Jangka Panjang Daerah - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	116 -
Tabel 149: Rincian Aset Tidak Berwujud	116 -
Tabel 150: Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD	116 -
Tabel 151: Mutasi Aset Tidak Berwujud	117 -
Tabel 152: Pengurangan – Reklas Pindah Ruang Aset (KIB)	119 -
Tabel 153: Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD	119 -
Tabel 154: Mutasi Akumulasi amortisasi Aset per SKPD	120 -
Tabel 155: Tambah dari Beban Amortisasi per SKPD	120 -
Tabel 156: Rincian Aset lain- lain	121 -
Tabel 157: Mutasi Aset Lain-lain	121 -
Tabel 158: Saldo Awal Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)	121 -
Tabel 159: Kurang Penghapusan Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)	122 -
Tabel 160: Kurang Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)	123 -
Tabel 161: Penambahan Aset Lain-Lain	123 -
Tabel 162: Rincian Kewajiban	124 -
Tabel 163: Rincian Kewajiban Jangka Pendek	124 -
Tabel 164: Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	124 -
Tabel 165: Rincian Utang Belanja per SKPD	125 -
Tabel 166: Utang Belanja Pegawai	126 -
Tabel 167: Utang Belanja Barang dan Jasa	126 -
Tabel 168: Rincian Utang Belanja Modal	128 -

Tabel 169: Rincian Kewajiban Jangka Panjang	128 -
Tabel 170: Perbandingan Saldo Ekuitas.....	128 -
Tabel 171: Saldo Kewajiban dan Ekuitas.....	129 -
Tabel 172: Rincian Pendapatan – LO	129 -
Tabel 173: Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional.....	130 -
Tabel 174: Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO	130 -
Tabel 175: Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO	131 -
Tabel 176: Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO.....	132 -
Tabel 177: Realisasi Lain- lain Pendapatan asli Daerah Yang sah –LO	132 -
Tabel 178: Rincian Pendapatan Transfer – LO	133 -
Tabel 179: Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	133 -
Tabel 180: Rincian Dana Bagi Hasil – LO.....	133 -
Tabel 181: Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	134 -
Tabel 182: Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	135 -
Tabel 183: Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	135 -
Tabel 184: Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	136 -
Tabel 185: Rincian Lain-lain Pendaparan Daerah Yang Sah – LO	136 -
Tabel 186: Rincian Beban- LO	137 -
Tabel 187: Rincian Beban Operasi- LO	137 -
Tabel 188: Beban Pegawai – LO.....	137 -
Tabel 189: Rincian Barang dan Jasa	138 -
Tabel 190: Rincian Barang danJasa Per SKPD.....	138 -
Tabel 191: Beban Hibah – LO	144 -
Tabel 192: Beban Bantuan Sosial – LO	144 -
Tabel 193: Beban Penyisihan Piutang.....	145 -
Tabel 194: Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO	145 -
Tabel 195: Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146 -
Tabel 196: Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi - LO.....	147 -
Tabel 197: Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud – LO	148 -
Tabel 198: Beban Bagi Hasil – LO	149 -
Tabel 199: Beban Bantuan Keuangan – LO.....	149 -
Tabel 200: Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional.....	150 -
Tabel 201: Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	150 -
Tabel 202: Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	151 -
Tabel 203: Arus Kas Keluas dari Aktivitas Investasi	151 -
Tabel 204: Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	152 -
Tabel 205: Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	152 -
Tabel 206: Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas	153 -
Tabel 207: Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif.....	153 -
Tabel 208: Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif – Lain-Lain.....	153 -

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Form Isian Mandatory Spending
Lampiran 2	Rincian Realisasi Belanja Hibah
Lampiran 3	Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga
Lampiran 4a	Rekapitulasi SP2D Dana Desa
Lampiran 4b	Laporan Dana Desa Final
Lampiran 5a	Opini Perumda Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas
Lampiran 5b	Laporan Keuangan PDAM Audited
Lampiran 6	Rincian Kewajiban Dinas PUPR



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kapuas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan ~~7.5.1.2.2.3~~ 7.5.1.2.2.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kapuas menyajikan nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp96.495.440.040,00. Nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut termasuk 11 paket pekerjaan yang belum dilaksanakan sesuai kontrak, dengan resiko kelebihan bayar senilai Rp985.944.063,28. Resiko kelebihan bayar tersebut memberikan dampak terbatas atas penyajian kewajaran pelaporan. Seandainya Pemerintah Kabupaten Kapuas sebelum akhir periode pelaporan dapat memulihkan resiko tersebut, maka penyajian nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi wajar.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan ~~7.5.1.2.2.3~~ 7.5.1.2.2.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kapuas menyajikan nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp312.313.886.972,00. Nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut termasuk 17 paket pekerjaan yang belum dilaksanakan sesuai kontrak, dengan resiko kelebihan bayar senilai Rp7.067.928.200,42. Resiko kelebihan bayar tersebut memberikan dampak terbatas atas penyajian kewajaran pelaporan. Seandainya Pemerintah Kabupaten Kapuas sebelum akhir periode pelaporan dapat memulihkan resiko tersebut, maka penyajian nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan menjadi wajar.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan ~~7.5.2.6.3~~ 7.5.3.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kapuas menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp4.089.331.898.416,42. Dari saldo Aset Tetap tersebut terdapat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp4.249.015.735.792,46 belum menerapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas terkait tentang penambahan masa manfaat dan kapitalisasi ke aset induknya sehingga saldo Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan Tahun 2023 belum mencerminkan saldo yang akutabelwajar. Namun, BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan ~~7.5.3.1.4~~ 7.5.2.6.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kapuas menyajikan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp805.354.532.129,44. Dari saldo tersebut, senilai Rp2.446.364.068,00 merupakan saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan. Saldo tersebut ditetapkan melalui pembebanan kerugian negara sementara. Namun, BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang saldo tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 31 Desember 2023 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran

lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31B/LHP/XIX.PAL/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palangka Raya, Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

M. Ali Asyhar, SE., Ak., CA., CSFA., CFrA.
Register Negara Akuntan No. 4510

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan LKPD dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017, Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 mengenai Standar Umum pada Paragraf 32 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan standar audit yang dimuat dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, sepanjang tidak diatur lain dalam SPKN

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan untuk memberikan Opini atas kewajaran LKPD, dengan mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemerintah Kabupaten Kapuas.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Metodologi Pemeriksaan

Tim Pemeriksa LKPD mengimplementasikan pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit*) secara efektif sehingga pemeriksaan fokus pada akun-akun/transaksi-transaksi berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk risiko kecurangan (*fraud*).

Dalam kerangka audit berbasis risiko, pemeriksa harus memperhatikan diantaranya hal-hal sebagai berikut.

- a. Hasil - hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja yang terkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2023;
- b. Analisis perkembangan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan signifikan dan hasil pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran LKPD Tahun 2023;

- c. Hasil pemeriksaan interim atas LKPD Tahun 2023;
- d. Analisis kebijakan-kebijakan signifikan Tahun 2023, diantaranya yaitu:
 - 1) Peraturan daerah (Perda) APBD Tahun 2022 dan 2023, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Kebijakan pemerintah daerah terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - 3) Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan keuangan di BLUD, Manajemen Kas pada Bendahara Umum Daerah, dan realisasi belanja wajib (*mandatory spending*);
 - 4) Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah atau pinjaman daerah;
 - 5) Kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); dan
 - 6) Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
- e. Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan dengan pelaporan keuangan Tahun 2023; dan
- f. Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang diproses atau sudah diputuskan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun yang sedang dalam proses hukum atau telah memiliki putusan hukum

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 60 hari yang terbagi dalam dua tahap, yaitu:

- a. Pemeriksaan Interim selama 30 hari tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 33/ST/XIX.PAL/01/2024 tanggal 25 Januari 2024; dan
- b. Pemeriksaan Terinci selama 30 hari tanggal 1 sampai dengan 3 April dan 16 April sampai dengan 12 Mei 2024 sesuai Surat Tugas Nomor 105/ST/XIX.PAL/03/2024 tanggal 28 Maret 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang

berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BUPATI KAPUAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan; (7) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Kapuas, 31 Desember 2023
Pj. Bupati Kapuas

Elin Hardi

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS

1. Laporan Realisasi Anggaran (Audited)



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

01 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



Audited

(dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2		3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	7.5.1.1	2.351.499.510.784,00	2.621.655.503.640,90	111,49	2.171.137.766.582,29
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.5.1.1.1	125.868.780.784,00	138.169.280.020,90	109,77	151.473.703.874,09
4.1.01	Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	38.921.025.000,00	42.289.931.898,60	108,66	70.676.578.950,52
4.1.02	Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	7.644.300.000,00	5.983.885.900,08	78,28	5.888.173.171,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	4.695.000.000,00	27.049.142,65	0,58	7.704.570.345,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.1.4	74.608.455.784,00	89.868.413.079,57	120,45	67.204.381.407,57
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		125.868.780.784,00	138.169.280.020,90	109,77	151.473.703.874,09
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2	2.225.630.730.000,00	2.482.886.214.563,00	111,56	2.018.455.830.856,20
4.2.01.01	Dana Perimbangan	7.5.1.1.2.1	1.951.254.806.000,00	2.157.290.740.576,00	110,56	1.734.006.602.530,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	7.5.1.1.2.1.1	752.496.154.000,00	976.740.916.291,00	129,80	586.640.653.808,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	7.5.1.1.2.1.2	808.731.231.000,00	808.725.785.465,00	100,00	777.279.406.867,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	7.5.1.1.2.1.3	160.989.714.000,00	155.922.847.825,00	96,85	191.191.616.615,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	7.5.1.1.2.1.4	229.037.707.000,00	215.901.190.995,00	94,26	178.894.925.240,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.2.2	1.951.254.806.000,00	2.157.290.740.576,00	110,56	1.734.006.602.530,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	7.5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	1.770.863.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	7.5.1.1.2.2.2	181.835.924.000,00	186.839.388.000,00	102,75	180.748.580.044,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		181.835.924.000,00	186.839.388.000,00	102,75	182.519.443.044,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.5.1.1.2.3	92.540.000.000,00	138.756.085.987,00	149,94	101.929.785.282,20
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.2.3	92.520.000.000,00	138.586.085.987,00	149,79	101.929.785.282,20
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.3	20.000.000,00	170.000.000,00	850,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		92.540.000.000,00	138.756.085.987,00	149,94	101.929.785.282,20
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		2.225.630.730.000,00	2.482.886.214.563,00	111,56	2.018.455.830.856,20
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.5.1.1.3	0,00	600.009.057,00	0,00	1.208.231.852,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3	0,00	600.009.057,00	0,00	1.208.231.852,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	600.009.057,00	0,00	1.208.231.852,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.351.499.510.784,00	2.621.655.503.640,90	111,49	2.171.137.766.582,29
5	BELANJA DAERAH	7.5.1.2	2.521.918.363.231,00	2.133.296.541.651,40	84,59	1.985.108.336.829,24
5.1	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1	1.504.884.295.444,00	1.263.553.235.537,40	83,96	1.194.662.544.893,99
5.1.01	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	791.596.132.986,00	617.979.936.208,00	78,07	648.471.012.472,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	584.259.070.997,00	535.019.096.570,40	91,57	459.074.769.793,29
5.1.03	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	6.150.000.000,00	5.508.154.324,00	89,56	5.614.736.389,90
5.1.05	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.4	122.622.803.186,00	104.789.760.160,00	85,46	79.937.515.037,88
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.5	256.288.275,00	256.288.275,00	100,00	1.564.511.200,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		1.504.884.295.444,00	1.263.553.235.537,40	83,96	1.194.662.544.893,99
5.2	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2	610.505.117.487,00	497.590.153.221,00	81,50	503.575.728.816,25
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1	10.250.000.000,00	8.607.417.219,00	83,97	1.874.805.530,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	82.394.175.908,00	79.563.896.620,00	96,56	70.405.239.790,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	106.225.682.172,00	96.495.440.040,00	90,84	88.084.233.307,58
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.5.1.2.2.4	410.999.937.907,00	312.313.886.972,00	75,99	341.442.656.648,67
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	535.321.500,00	509.512.370,00	95,18	1.768.793.540,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		610.505.117.487,00	497.590.153.221,00	81,50	503.575.728.816,25
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3	45.476.804.500,00	6.170.159.923,00	13,57	3.457.327.575,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.3	45.476.804.500,00	6.170.159.923,00	13,57	3.457.327.575,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		45.476.804.500,00	6.170.159.923,00	13,57	3.457.327.575,00
5.4	BELANJA TRANSFER	7.5.1.2.4	361.052.145.800,00	365.982.992.970,00	101,37	283.412.735.544,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.5.1.2.4.1	8.287.063.300,00	8.287.063.300,00	100,00	3.322.651.200,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.5.1.2.4.1	733.420.000,00	733.420.000,00	100,00	890.387.600,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	7.5.1.2.4.2	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	485.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.5.1.2.4.2	351.786.662.500,00	356.717.509.670,00	101,40	278.714.696.744,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER		361.052.145.800,00	365.982.992.970,00	101,37	283.412.735.544,00

KODE REKENING	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	JUMLAH BELANJA		2.521.918.363.231,00	2.133.296.541.651,40	84,59	1.985.108.336.829,24
	SURPLUS/DEFISIT		(170.418.852.447,00)	488.358.961.989,50	(286,56)	186.029.429.753,05
6	PEMBIAYAAN DAERAH	7.5.1.3	172.856.073.447,00	353.257.340.593,03	204,37	202.414.872.149,11
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1	208.256.073.447,00	388.444.301.902,16	186,52	224.366.417.319,37
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.5.1.3.1.1	208.256.073.447,00	388.444.301.902,16	186,52	169.571.792.319,37
6.1.04.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.5.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	54.794.625.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		208.256.073.447,00	388.444.301.902,16	186,52	224.366.417.319,37
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.2	35.400.000.000,00	35.186.961.309,13	99,40	21.951.545.170,26
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.5.1.3.2.1	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	7.5.1.3.2.2	2.600.000.000,00	2.516.129.033,13	96,77	2.516.129.032,26
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.5.1.3.2.2	26.600.000.000,00	26.470.832.276,00	99,51	13.235.416.138,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		35.400.000.000,00	35.186.961.309,13	99,40	21.951.545.170,26
	PEMBIAYAAN NETTO	7.5.1.3.3	172.856.073.447,00	353.257.340.593,03	204,37	202.414.872.149,11
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	7.5.1.4	2.437.221.000,00	841.616.302.582,53	34.531,80	388.444.301.902,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kuala Kapuas, 31 Desember 2023
 Bupati Kapuas

 Erlin Hadi, S.T.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (*Audited*)



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PERIODE TAHUN 1 Januari 2023 DAN 31 Desember 2023



URAIAN	REFF	2023	2022
Sisa Anggaran Lebih Awals	7.5.2.1	388.444.301.902,16	169.567.800.342,89
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	7.5.2.2	388.444.301.902,16	169.571.792.319,37
Subtotal (1-2)		0,00	(3.991.976,48)
Silpa/(Sikpa)	7.5.2.3	841.616.302.582,53	388.444.301.902,16
Subtotal (3+4)		841.616.302.582,53	388.440.309.925,68
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	3.991.976,48
Lain-Lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.4	841.616.302.582,53	388.444.301.902,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kuala Kapuas, 31 Desember 2023

Pj. Bupati Kapuas



Erlin Hadi, S.T.

3. Neraca (Audited)



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2023

Per 31 Desember 2023



Audited

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	REFF	2023	2022
1	ASET	7.5.3.1	5.875.150.806.346,94	4.401.247.080.772,58
1.1	ASET LANCAR	7.5.3.1.1	915.871.888.935,08	449.050.331.050,65
1.1.01	Kas dan Setara Kas	7.5.3.1.1.1	490.697.891.183,53	388.525.890.503,16
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1.1	481.713.203.741,00	386.244.286.618,04
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.1.2	-	-
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.1.3	4.650.900.056,53	2.057.253.485,12
1.1.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	7.5.3.1.1.1.4	10.804.060,00	224.350.400,00
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.1.5	4.322.983.326,00	-
1.1.02	Investasi Jangka Pendek	7.5.3.1.1.2.1	350.000.000.000,00	-
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	7.5.3.1.1.3.1	28.111.231.711,00	25.627.385.783,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.1.1.3.2	4.447.301.023,00	3.747.771.119,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.3.3	18.146.404.463,00	22.708.435.283,96
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	7.5.3.1.1.3.4	17.242.309.336,00	26.535.232.313,73
1.1.10	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.3.5	(29.548.096.942,01)	(33.339.784.529,57)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.4	197.752.318,00	199.052.114,99
1.1.12	Persediaan	7.5.3.1.1.5	36.577.095.842,56	15.046.348.462,38
	JUMLAH ASET LANCAR		915.871.888.935,08	449.050.331.050,65
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2	64.587.986.866,00	78.088.435.785,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN		-	-
	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.3.1.2	64.587.986.866,00	78.088.435.785,00
1.2.02	Penyertaan Modal	7.5.3.1.2	64.587.986.866,00	78.088.435.785,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN		64.587.986.866,00	78.088.435.785,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		64.587.986.866,00	78.088.435.785,00
1.3	ASET TETAP	7.5.3.1.3	4.089.336.398.416,42	3.812.826.255.138,91
1.3.01	Tanah	7.5.3.1.3.1	546.424.290.829,00	526.983.846.672,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	648.864.664.792,56	568.766.348.926,56
1.3.03	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	1.339.810.743.520,67	1.207.699.086.528,67
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.5.3.1.3.4	4.249.015.735.792,46	3.816.609.483.979,46
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	9.776.093.547,52	9.777.242.244,52
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	246.469.078.099,00	254.957.450.223,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(2.951.024.208.164,79)	(2.571.967.203.435,30)
	JUMLAH ASET TETAP		4.089.336.398.416,42	3.812.826.255.138,91
	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
1.5	ASET LAINNYA	7.5.3.1.4	805.354.532.129,44	61.282.058.798,02
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	7.5.3.1.4.1	21.892.576.110,76	4.989.928.095,67
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.5.3.1.4.1.1	21.892.576.110,76	4.989.928.095,67
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.4.2	20.821.292.603,00	20.162.109.533,00
1.5.04	Aset Lain-lain	7.5.3.1.4.4	15.094.109.008,68	15.329.073.348,68
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.4.3	(17.844.281.593,00)	- 16.262.202.470,33
1.5.05	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.5.3.1.4.5	765.390.836.000,00	37.063.150.291,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		805.354.532.129,44	61.282.058.798,02
	JUMLAH ASET		5.875.150.806.346,94	4.401.247.080.772,58
2	KEWAJIBAN	7.5.3.2	204.169.859.524,70	110.546.349.028,37
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.1	168.339.748.198,26	32.493.860.254,80
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1	81.588.601,00	81.588.601,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.1.2	28.986.961.308,26	15.751.545.170,26
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.3	648.000,00	-
2.1.06	Utang Belanja	7.5.3.2.1.4	139.270.550.289,00	16.660.726.483,54
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA		168.339.748.198,26	32.493.860.254,80

KODE REKENING	URAIAN	REF	2023	2022
	PENDEK			
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.2	35.830.111.326,44	78.052.488.773,57
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	7.5.3.2.2.	35.830.111.326,44	78.052.488.773,57
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		35.830.111.326,44	78.052.488.773,57
	JUMLAH KEWAJIBAN		204.169.859.524,70	110.546.349.028,37
3	EKUITAS	7.5.3.3	5.670.980.946.822,24	4.290.700.731.744,21
3.1	EKUITAS	7.5.3.3	5.670.980.946.822,24	4.290.700.731.744,21
	JUMLAH EKUITAS		5.670.980.946.822,24	4.290.700.731.744,21
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.5.3.3.1	5.875.150.806.346,94	4.401.247.080.772,58

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kuala Kapuas, 31 Desember 2023

Pj. Bupati Kapuas



Erlin Hadi, S.T.

4. Laporan Operasional (Audited)



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

01 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



Audited

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	REF	2023	2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	7.5.4.1	3.180.541.970.213,63	2.367.552.018.285,74	812.989.951.927,89	34,34
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	7.5.4.1.1	141.955.709.666,36	155.463.375.635,63	(13.507.665.969,27)	(8,69)
7.1.01	Pajak Daerah-LO	7.5.4.1.1.1	44.773.777.826,60	73.262.397.700,52	(28.488.619.873,92)	(38,89)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	7.5.4.1.1.2	6.682.767.804,08	6.176.837.631,00	505.930.173,08	8,91
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.5.4.1.1.3	27.049.142,65	7.704.570.345,00	(7.677.521.202,35)	(99,65)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	7.5.4.1.1.4	90.472.114.893,03	68.319.569.959,11	22.152.544.933,92	32,42
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		141.955.709.666,36	155.463.375.635,63	(13.507.665.969,27)	(8,69)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	7.5.4.1.2	2.959.170.300.294,27	2.055.096.762.143,11	904.073.538.151,16	43,99
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.4.1.2.1				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	7.5.4.1.2.1	2.829.707.137.285,00	1.953.589.195.865,00	876.117.941.420,00	44,85
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO		2.829.707.137.285,00	1.771.069.752.821,00	1.058.637.384.464,00	59,77
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	7.5.4.1.2.1.1	1.705.068.602.000,00	623.703.804.099,00	1.081.364.797.901,00	173,38
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	7.5.4.1.2.1.2	808.725.785.465,00	777.279.406.867,00	31.446.378.598,00	4,05
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	7.5.4.1.2.1.3	155.922.847.825,00	191.191.616.615,00	(35.268.768.790,00)	(18,45)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	7.5.4.1.2.1.4	159.989.901.995,00	178.894.925.240,00	(18.905.023.245,00)	(10,57)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN		2.829.707.137.285,00	1.771.069.752.821,00	1.058.637.384.464,00	59,77
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.5.4.1.2.2				
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	7.5.4.1.2.2	-	1.770.863.000,00	(1.770.863.000,00)	(100,00)

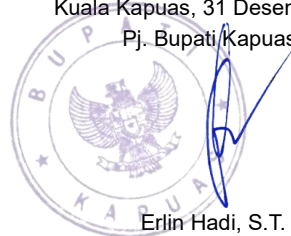
KODE REKENING	URAIAN	REF	2023	2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
7.2.01.05	Dana Desa-LO	7.5.4.1.2.2	-	180.748.580.044,00	(180.748.580.044,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		-	182.519.443.044,00	(182.519.443.044,00)	(100,00)
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	7.5.4.1.2.3	129.463.163.009,27	101.507.566.278,11	27.955.596.731,16	27,54
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	7.5.4.1.2.3	129.293.163.009,27	101.507.566.278,11	27.785.596.731,16	27,37
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.5.4.1.2.3	170.000.000,00	-	170.000.000,00	
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		129.463.163.009,27	101.507.566.278,11	27.955.596.731,16	27,54
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO		2.959.170.300.294,27	2.055.096.762.143,11	904.073.538.151,16	43,99
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	7.5.4.1.3	79.415.960.253,00	156.991.880.507,00	(77.575.920.254,00)	
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	7.5.4.1.3	79.415.960.253,00	156.991.880.507,00	(77.575.920.254,00)	(49,44)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		79.415.960.253,00	156.991.880.507,00	(77.575.920.254,00)	(49,44)
	JUMLAH PENDAPATAN		3.180.541.970.213,63	2.367.552.018.285,74	812.989.951.927,89	34,34
8	BEBAN	7.5.4.2	1.798.612.971.495,17	1.763.166.682.460,36	35.446.289.034,81	2,01
8.1	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1	1.233.415.430.640,53	1.176.164.058.988,73	57.251.371.651,80	4,87
8.1.01	Beban Pegawai	7.5.4.2.1.1	617.648.417.230,00	632.417.867.557,92	(14.769.450.327,92)	(2,34)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2.1.2	524.921.867.004,67	450.794.883.910,31	74.126.983.094,36	16,44
8.1.03	Beban Bunga	7.5.4.2.1.3	5.508.154.324,00	5.614.736.389,90	(106.582.065,90)	(1,90)
8.1.05	Beban Hibah	7.5.4.2.1.4	83.706.658.760,00	83.930.720.543,99	(224.061.783,99)	(0,27)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.1.5	256.288.275,00	1.564.511.200,00	(1.308.222.925,00)	(83,62)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.1.6	1.374.045.046,86	1.841.339.386,61	(467.294.339,75)	(25,38)
	JUMLAH BEBAN OPERASI		1.233.415.430.640,53	1.176.164.058.988,73	57.251.371.651,80	4,87
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.4.2.1.7	379.883.775.961,64	300.251.830.352,63	79.631.945.609,01	26,52
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.4.2.1.7.1	61.567.550.448,64	51.884.106.610,63	9.683.443.838,01	18,66
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.4.2.1.7.2	28.636.289.165,00	27.317.193.193,00	1.319.095.972,00	4,83
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.4.2.1.7.3	288.097.857.225,00	219.616.343.440,00	68.481.513.785,00	31,18
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	7.5.4.2.1.7.4	1.582.079.123,00	1.434.187.109,00	147.892.014,00	10,31
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi		379.883.775.961,64	300.251.830.352,63	79.631.945.609,01	26,52
8.3	BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.2	179.143.604.970,00	283.412.735.544,00	(104.269.130.574,00)	(36,79)
8.3.01	Beban Bagi Hasil	7.5.4.2.2.1	9.020.483.300,00	4.213.038.800,00	4.807.444.500,00	114,11
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.2.2.2	170.123.121.670,00	279.199.696.744,00	(109.076.575.074,00)	(39,07)
	JUMLAH BEBAN TRANSFER		179.143.604.970,00	283.412.735.544,00	(104.269.130.574,00)	(36,79)

KODE REKENING	URAIAN	REF	2023	2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	7.5.4.2.3	6.170.159.923,00	3.338.057.575,00	2.832.102.348,00	85,84
8.2.01.01.01	Beban Tidak Terduga	7.5.4.2.3	6.170.159.923,00	3.338.057.575,00	2.832.102.348,00	85,84
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA		6.170.159.923,00	3.338.057.575,00	2.832.102.348,00	85,84
	JUMLAH BEBAN		1.798.612.971.495,17	1.763.166.682.460,36	35.446.289.034,81	2,01
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.4.3	1.381.928.998.718,46	604.385.335.825,38	777.543.662.893,08	128,65
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		2.000.000,00	2.002.452.307,35	(2.000.452.307,35)	(99,90)
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		2.000.000,00	2.002.452.307,35	(2.000.452.307,35)	(99,90)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		2.000.000,00	2.002.452.307,35	(2.000.452.307,35)	(99,90)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		21.725.102.083,00	14.146.410.945,36	7.578.691.137,64	53,57
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		21.725.102.083,00	14.146.410.945,36	7.578.691.137,64	53,57
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		21.725.102.083,00	14.146.410.945,36	7.578.691.137,64	53,57
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(21.723.102.083,00)	(12.143.958.638,01)	(9.579.143.444,99)	53,57
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		1.360.205.896.635,46	592.241.377.187,37	767.964.519.448,09	129,67
	POS LUAR BIASA	7.5.4.3.1				
8.5	BEBAN LUAR BIASA	7.5.4.3.1	-	-	-	
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		-	-	-	
	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.4.3.2	1.360.205.896.635,46	592.241.377.187,37	767.964.519.448,09	129,67

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kuala Kapuas, 31 Desember 2023

Pj. Bupati/Kapuas



Erlin Hadi, S.T.



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022



5. Laporan Arus Kas (Audited)

Audited

Dalam Rupiah

Uraian	Ref	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
ARUS MASUK KAS AKTIFITAS OPERASI	7.5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		42.289.931.898,60	70.676.578.950,52
Penerimaan Retribusi Daerah		5.983.885.900,08	5.888.173.171,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		27.049.142,65	7.704.570.345,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		89.868.413.079,57	67.204.381.407,57
Penerimaan Dana Bagi Hasil		976.740.916.291,00	586.640.653.808,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		808.725.785.465,00	777.279.406.867,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		155.922.847.825,00	191.191.616.615,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		215.901.190.995,00	178.894.925.240,00
Penerimaan Dana Insentif		0,00	1.770.863.000,00
Penerimaan Dana Desa		186.839.388.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		138.586.085.987,00	101.929.785.282,20
Penerimaan Bantuan Keuangan		170.000.000,00	0,00
Penerimaan Hibah		600.009.057,00	1.208.231.852,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi		2.621.655.503.640,90	1.990.389.186.538,29
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI	7.5.1.1.2		
Pembayaran Pegawai		617.979.936.208,00	648.471.012.472,92
Pembayaran Barang dan Jasa		535.019.096.570,40	459.074.769.793,29
Pembayaran Bunga		5.508.154.324,00	5.614.736.389,90
Pembayaran Belanja Hibah		104.789.760.160,00	79.937.515.037,88
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		256.288.275,00	1.564.511.200,00
Pembayaran Tak Terduga		6.170.159.923,00	3.457.327.575,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		9.020.483.300,00	4.213.038.800,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi		0,00	240.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		245.000.000,00	245.000.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		356.717.509.670,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi		1.635.706.388.430,40	1.202.817.911.268,99
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		985.949.115.210,50	787.571.275.269,30
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2.1		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi		0,00	0,00

Uraian	Ref	2023	2022
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI	7.5.5.2.2		
Perolehan Tanah		8.607.417.219,00	1.874.805.530,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		79.563.896.620,00	70.405.239.790,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		96.495.440.040,00	88.084.233.307,58
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		312.313.886.972,00	341.442.656.648,67
Perolehan Aset Tetap Lainnya		509.512.370,00	1.768.793.540,00
Perolehan Aset Lainnya		100.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.200.000.000,00	6.200.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi		503.790.153.221,00	509.775.728.816,25
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(503.790.153.221,00)	(509.775.728.816,25)
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	54.794.625.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan		0,00	54.794.625.000,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN	7.5.5.3.2		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		2.516.129.033,13	2.516.129.032,26
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		26.470.832.276,00	13.235.416.138,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan		28.986.961.309,13	15.751.545.170,26
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(28.986.961.309,13)	39.043.079.829,74
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	7.5.5.4.1	0,00	81.588.601,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	7.5.5.4.2	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		0,00	81.588.601,00
Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	453.172.000.680,37	316.920.214.883,79
Saldo Awal Kas		388.525.890.503,16	71.687.264.220,37
Saldo Akhir Kas		841.697.891.183,53	388.607.479.104,16
Kas di Kas Daerah		481.713.203.741,00	386.244.286.618,04
Kas Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas Bendahara Pengeluaran		1.000.000.000,00	0,00
Kas BLUD		4.650.900.056,53	2.057.253.485,12
Kas BOS		10.804.060,00	224.350.400,00
Kas Lainnya/Kas BOK		4.322.983.326,00	0,00
Deposito Jangka Pendek KAS DAERAH		350.000.000.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas	7.5.5.6	841.697.891.183,53	388.525.890.503,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kuala Kapuas, 31 Desember 2023
 Pj. Bupati Kapuas



Erlin Hadi, S.T.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (*Audited*)



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022



Audited

Dalam Rupiah

URAIAN	Reff	2023	2022
EKUITAS AWAL	7.5.6.1	4.290.700.731.744,21	3.730.297.759.312,02
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.6.2	1.360.205.896.635,46	592.241.377.187,37
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.6.3		
Koreksi persediaan			500.500,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		20.074.318.442,57	(31.838.905.255,18)
EKUITAS AKHIR	7.5.6.4	5.670.980.946.822,24	4.290.700.731.744,21

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kuala Kapuas, 31 Desember 2023
Pj. Bupati Kapuas



Erlin Hadi, S.T.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

7.1. Pendahuluan

7.1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas; dan
- Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, yaitu dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

7.1.2 PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

7.1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan 2023 berpedoman pada ketentuan yang diantaranya sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023.

7.1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran (Audited)
- 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Audited)
- 3. Neraca (Audited)
- 4. Laporan Operasional (Audited)
- 5. Laporan Arus Kas (Audited)
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas (Audited)
- 7. Catatan Atas Laporan Keuangan
 - 7.1. Pendahuluan
 - 7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 7.4. Kebijakan Akuntansi
 - 7.5. Penjelasan atas Laporan Keuangan
 - 7.6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
 - 7.7. Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, yaitu (minimal) :

Tabel 1: Indikator Sosial Ekonomi

Indikator (1)	2022 (2)	2023 (3)	Keterangan (4)
Tingkat Kemiskinan	5,52	5,21	Persentase Penduduk Miskin (P0)
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,91	3,66	
Gini Ratio	0,303	0,305	
Indeks Pembangunan Manusia	71,72	72,40	Metode Baru Hasil SP2020 Lanjutan
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,82	0,73	
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,21	0,22	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,04	5,71	
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	12.102.177,31	12.793.788,50	

7.2.1.1 Tingkat kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Kapuas periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2: Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kapuas

No	Persentase Penduduk Miskin	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	5,52	5,21	(5,62)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	20,18	19,19	(4,91)
3	Provinsi (%)	5,28	5,11	(3,22)
4	Nasional (%)	9,54	9,36	(1,89)
5	Peringkat Provinsi	7	7	
6	Peringkat Nasional	30	30	
6	Peringkat Nasional	430	441	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kapuas

Catatan

Peringkat Kalteng dari 34 Prov Seluruh Indonesia, Peringkat Kabupaten Kapuas dari 514 Kab/kota seluruh Indonesia.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kapuas pada Tahun 2022 sebesar 0,82% mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 0,73% dan diharapkan pada tahun yang akan datang kembali menurun. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kapuas pada Tahun 2023 masih di atas provinsi, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 3: Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kapuas

No	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kapuas	0,82	0,73	(10,98)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	0,91	0,66	(27,47)
3	Peringkat Provinsi	7	4	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kapuas

Tabel 4 :Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kapuas

No	Tingkat Keparahan Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kapuas	0,21	0,22	4,76
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	0,27	0,14	-48,15
3	Peringkat Provinsi	7	1	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kapuas

7.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Kapuas, TPT Kabupaten Kapuas Tahun 2023 adalah sebesar 3,66% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,91	3,66	-6,39

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kapuas

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas Tahun 2022 menurut BPS sebesar 3,91%, sedangkan Tahun 2023 sebesar 3,66%. Terjadi penurunan sebesar 0,07%.

7.2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio Kabupaten Kapuas pada tahun 2023 sebesar 0,305 dan tahun 2022 sebesar 0,301. Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan

distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan penjelasan:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dengan setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dengan bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

7.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Mengacu kepada UNDP, IPM dibagi menjadi empat kategori, yaitu :

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
4. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai data BPS Kabupaten Kapuas Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kapuas Tahun 2023 adalah sebesar 69,78 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kapuas

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	71,72	72,40	0,95
2	Provinsi	73,17	73,73	0,77
3	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	0,84
4	Peringkat Provinsi	4	4	
5	Peringkat Nasional	256	255	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kapuas, Metode Baru Hasil SP 2020 Lanjutan

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kapuas Tahun 2022 sebesar 71,72 poin, dan di Tahun 2023 sebesar 72,40 poin mengalami kenaikan sebesar 0,68%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 68,78 tahun pada Tahun 2023, lebih lama/cepat 0,04 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Kapuas pada saat ini berada pada urutan 9 dari 14 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

7.2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.

Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh

karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7: PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)

Uraian	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.735.651,99	2.776.330,70	2.847.417,56
Pertambangan dan Penggalian	1.983.197,17	2.373.206,52	2.582.225,74
Industri Pengolahan	1.298.472,44	1.398.100,91	1.472.861,09
Pengadaan Listrik dan Gas	10.331,96	10.909,79	10.739,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.728,79	7.265,68	7.663,88
Konstruksi	876.836,18	944.557,77	1.018.611,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.631.366,60	1.703.887,13	1.831.409,81
Transportasi dan Pergudangan	414.644,31	437.728,35	462.763,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	165.112,61	173.713,02	188.697,02
Informasi dan Komunikasi	136.742,35	140.689,99	150.529,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	451.846,16	485.456,11	518.589,73
Real Estate	287.992,46	290.334,77	300.877,95
Jasa Perusahaan	2.888,94	3.010,57	3.416,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	436.985,33	455.442,04	440.998,09
Jasa Pendidikan	561.203,53	588.526,12	619.919,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	225.686,16	230.693,64	249.656,47
Jasa lainnya	80.694,18	82.324,21	87.411,04

7.2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Kapuas dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*GallopInflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai data BPS Kabupaten Kapuas, Tingkat Inflasi Kabupaten Kapuas Tahun 2023 adalah sebesar NA% sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8: Tingkat Inflasi Kabupaten Kapuas

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
2	Tingkat Inflasi (%) (Palangka Raya)	6,51	2,68
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61
5	Peringkat Nasional	20	49

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kapuas

Untuk tingkat Inflasi Kabupaten Kapuas pada Tahun 2023 masih mengikuti angka inflasi Palangka Raya. Ranking dari 90 kota Inflasi se-Indonesia

7.2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Kapuas

Struktur perekonomian Kabupaten Kapuas dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9: Tingkat Struktur perekonomian Kabupaten Kapuas

Uraian	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,6	22,50	23,22
Pertambangan dan Penggalian	12,6	21,83	18,96
Industri Pengolahan	13,5	12,84	13,18
Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,07	0,07
Konstruksi	7,9	7,20	7,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,4	13,88	14,54
Transportasi dan Pergudangan	4,0	3,49	3,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,5	1,30	1,38
Informasi dan Komunikasi	1,0	0,85	0,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,8	3,51	3,67
Real Estate	2,9	2,41	2,45
Jasa Perusahaan	0,0	0,02	0,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,7	3,19	2,97
Jasa Pendidikan	5,0	4,28	4,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,2	1,91	2,05
Jasa lainnya	0,8	0,65	0,67

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kapuas

7.2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Arah kebijakan keuangan daerah Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengoptimalkan penggunaannya

7.2.2.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksi untuk tahun anggaran 2023.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksi untuk tahun anggaran 2023. Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing - masing potensi jenis pendapatan baik dana Transfer Daerah maupun pendapatan asli daerah berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada Tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penentuan target. Pendapatan daerah dari dana transfer atau dana perimbangan perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya kondisi dan perkembangan ekonomi makro

secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah. Prediksi Penerimaan dari Dana Transfer sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kapuas, maka arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- c. Perbaikan database pajak dan retribusi daerah
- d. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara professional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
- e. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.
- f. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.
- g. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
- h. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- i. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
- j. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21 dan PPh badan dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- k. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara
- l. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi;

7.2.2.2 Proyeksi Target Pendapatan Daerah

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10: Proyeksi Pendapatan Daerah TA 2023

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran 2023
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.246.316.387.888
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.617.861.388
4.1.01.	Pajak Daerah	47.146.425.000
4.1.02.	Retribusi Daerah	7.368.576.000
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.500.000.000
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	66.602.860.388
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.116.698.526.500
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.020.090.730.000
a.	Dana Transfer Umum	1.448.227.385.000
1.	Dana Bagi Hasil	639.496.154.000

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran 2023
	2. Dana Alokasi Umum (DAU)	808.731.231.000
	b. Dana Transfer Khusus	390.027.421.000
	1. DAK Fisik	160.989.714.000
	2. DAK Non Fisik	229.037.707.000
	c. Dana Desa	181.835.924.000
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.607.796.500
	a. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	96.607.796.500
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.246.316.387.888

Perencanaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing - masing potensi jenis pendapatan asli daerah dan pertimbangan asumsi kondisi perekonomian di Kabupaten Kapuas tahun 2023.
- Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan sebesar Rp129.617.861.388,00 yang terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah Sebesar Rp47.146.425.000,00 Retribusi Daerah Sebesar Rp7.368.576.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang tidak terpisahkan (laba atas penyertaan modal di Bank Kalteng) Sebesar Rp8.500.000.000,00 dan Lain- lian PAD yang sah Sebesar Rp66.602.860.388,00.
- PAD dari sektor Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp66.602.860.388,00 terdiri dari Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Sebesar Rp50.000.000,00, Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp3.500.000.000,00, Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Sebesar Rp1.500.000.000,00, Pendapatan BLUD RSUD Sebesar Rp50.000.000.000,00, Pendapatan BLUD Pukesmas Sebesar Rp10.591.261.908,00, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sebesar Rp. 904.598.480,-
- Pendapatan Transfer Pusat, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa ditargetkan sesuai dengan Rincian Alokasi Dana Transfer Daerah dan Dana Desa pada APBN 2023. Dana Transfer antar Daerah yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diasumsikan sebesar Rp96.607.796.500,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Sebesar Rp8.000.000.000,00, Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebesar Rp9.000.000.000,00, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebesar Rp64.587.796.500,00, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Sebesar Rp20.000.000,00 Dan Bagi Hasil Pajak Rokok Sebesar Rp15.000.000.000,00.

7.2.2.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Belanja daerah direncanakan berdasarkan kriteria penentuan prioritas sebagai berikut :
 - Merupakan bagian dari tahapan upaya memecahkan persoalan mendasar pembangunan daerah Kabupaten Kapuas;
 - Disusun sesuai dengan kewenangan;
 - Merupakan urusan/kewajiban yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku;
 - Menunjang visi. misi dan prioritas pembangunan daerah ;
 - Disusun sesuai mekanisme perencanaan yang sudah dilaksanakan;
 - Merupakan kegiatan bersama/sharing, baik kegiatan lintas fungsi maupun sumber dana (APBN / DAK / DID / APBD / Masyarakat);
- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta berorientasi pada terpenuhinya standar pelayanan minimal terutama disetiap jenis pelayanan dasar yang diberikan.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab SOPD bersangkutan. Pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SOPD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap konektivitas antar wilayah dalam upaya menunjang pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, mendorong peningkatan elektrifikasi dan komunikasi, serta mendorong saluran distribusi sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Kapuas.

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, semua komponen belanja yang disebutkan disini adalah kelompok/komponen belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana telah 21 mempertimbangkan kebijakan terkait Alokasi Transfer Pusat dan tetap mengacu pada dukungan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, yang masing-masing komponen belanja dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja dalam bentuk Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp1.183.703.402.176,00 (Satu trilyun seratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri atas:

- 1) Belanja pegawai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 710.970.287.288,00 (Tujuh ratus sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) Belanja Pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 telah memperhitungkan adanya pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14, selain itu juga diperhitungkan akses 2,5 persen untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi serta rencana tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai negeri pada Tahun Anggaran 2023 serta rencana kenaikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
- 2) Belanja barang dan jasa Pada Tahun Anggaran 2023 belanja barang dan jasa yang dianggarkan sebesar Rp 421.644.266.613,00 (Empat ratus dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah). Belanja barang dan jasa digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Adapun fokus penggunaan belanja barang dan jasa Tahun

Anggaran 2023 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah serta memenuhi belanja habis pakai untuk keperluan operasional kantor dan biaya operasional kantor khususnya untuk mendukung 22 pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya.

- 3) Belanja bunga Pada Tahun Anggaran 2023 belanja bunga dianggarkan sebesar Rp 6.150.000.000,00 (Enam milyar seratus lima puluh juta rupiah). Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2023 lebih banyak difokuskan untuk membayar bunga pinjaman daerah yang meliputi pinjaman daerah untuk infrastruktur air bersih pada IBRD sebesar Rp 2.350.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan infrastruktur jalan pada PT. SMI sebesar Rp 3.800.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- 4) Belanja hibah Pada Tahun Anggaran 2023 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 44.727.130.000,00 (Empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2023 lebih banyak difokuskan untuk mendukung UKM, kelompok tani dan nelayan dalam rangka percepatan penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
- 5) Belanja Bantuan Sosial Pada Tahun Anggaran 2023 belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 211.718.275,00 (Dua ratus sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yaitu bahwa bantuan social dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

b. Belanja Modal

Anggaran belanja modal Rp. 482.760.328.112,00 (Empat ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) yang difokuskan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, sanitasi, persampahan serta membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, juga untuk membangun infrastruktur pendukung perekonomian seperti pasar, infrastruktur pertanian dan perikanan. Belanja modal terdiri atas:

- 1) Belanja Modal Tanah Rp. 14.512.771.200,00
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 29.831.593.448,00
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan Rp. 119.886.877.633,00
- 4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp317.589.380.596,00
- 5) Belanja modal aset tetap lainnya Rp474.512.000,00
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya Rp465.193.235,00

c. Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja tidak terduga pada APBD 2023 Rp. 55.000.000.000,00, yang merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang bersifat tidak dapat diprediksi sebelumnya, terutama pertimbangan ketidakpastian berakhirnya masa pandemi COVID-19 pada tahun 2023 yang terjadi diluar kendali pemerintah daerah dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir dan bencana lainnya baik alam maupun non alam.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer sebesar Rp. 514.736.598.300,00 (Lima ratus empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

1) Belanja bagi hasil;

Belanja bagi hasil Rp. 9.020.482.500,00 (Sembilan milyar dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). digunakan sebagai bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas dan kekurangan bagi hasil pajak ke desa tahun anggaran 2022.

2) Belanja bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp. 505.716.115.800,00 berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas dan kekurangan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Selain itu juga dianggarkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

7.2.2.4 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 11: Penerimaan Pembiayaan

URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH		JUMLAH
PEMBIAYAAN DAERAH		
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.783.940.700
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.783.940.700
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.900.000.000
2.1	Penyertaan Modal Daerah	8.700.000.000
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.200.000.000

7.2.2.5 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 37.900.000.000,00 (Tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- Penyertaan Modal Daerah Penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp8.700.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus juta rupiah). digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan berupa penyertaan modal kepada BUMD, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Kalteng 26 sebesar Rp. 6.200.000.000,00 (Enam milyar dua ratus juta rupiah) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada tahun anggaran 2023 direncanakan untuk membayar pokok utang pinjaman pada IBRD dan pinjaman PT. SMI sebesar Rp. 29.200.000.000,00 (Dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah).

7.2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian Target Kinerja APBD TA 2023 sebagai berikut.

- a. Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.521.918.363.231,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.504.884.416.444,00, Belanja Modal sebesar Rp610.505.117.487,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp45.476.804.500,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp361.052.145.800,00;
- b. Anggaran Transfer Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp361.052.145.800,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil sebesar Rp9.020.483.300,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp352.031.662.500,00;
- c. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.133.296.541.651,40 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.263.553.235.537,40, realisasi Belanja Modal sebesar Rp497.590.153.221,00, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.170.159.923,00 dan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp365.982.992.970,00;
- d. Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 sebesar Rp365.982.992.970,00 yang terdiri dari realisasi Transfer Bagi Hasil sebesar Rp9.020.483.300,00 dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp356.962.509.670,00;
- e. Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.351.499.510.784,00 yang terdiri dari PAD sebesar Rp125.868.780.784,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.225.630.730.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp0,00;
- f. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 sebesar Rp2.621.655.503.640,90 yang terdiri dari PAD sebesar Rp138.169.280.020,90, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.482.886.214.563,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp600.009.057,00.

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Analisa capaian kinerja keuangan digambarkan dalam ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Kapuas secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Termasuk dalam hal Belanja Wajib Minimal (*Mandatory Spending*) dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu terkait dengan pelayanan dasar, keuangan dan unsur pengawas. Rincian masing-masing Belanja Wajib Minimal (*Mandatory Spending*) sebagai berikut.

1) Urusan Pelayanan Dasar

Urusan	Keterangan
Pendidikan	Alokasi anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
Urusan teknis terkait Infrastruktur	Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
Urusan terkait Perlindungan Sosial	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 yang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar 2,00% yang bersumber dari DTU.

Commented [MY1]: Belum tersedia capaian MS sebagaimana revidi sebelum penyerahan

2) Keuangan

Urusan	Keterangan
Keuangan	Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
Keuangan	Transfer Desa paling sedikit 10% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima kabupaten (Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa)
Keuangan	Sesuai Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK.
Keuangan	Sesuai Pasal 30 ayat (8) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran kelurahan, paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

3) Unsur Pengawas

Urusan	Keterangan
Unsur Pengawas	Permendagri yang mengatur mengenai alokasi belanja daerah untuk kegiatan Pengawasan, contoh: Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: 2) a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah; b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

4) Earmarking atas Pendapatan Asli Daerah (berlaku setelah tahun 2023)

Urusan	Keterangan (misal)
Kegiatan Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta pengkantaran moda dan sarana transportasi umum	Minimal 10% dari PKB dan Opsen PKB (PP 35 2023 tentang KUPDRD)
Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum, meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum	Minimal 10% dari hasil penerimaan PBJT Tenaga Listrik/Pajak Penerangan Jalan (PP 4 2023 tentang Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik dan PP 35 2023 tentang KUPDRD)
Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan penegakan hukum di bidang cukai rokok	Minimal 50% dari pajak rokok (Pemprov) dan bagi hasil pajak rokok (Pemkab/Pemkot) (PP 55 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan PP 35 2023 tentang KUPDRD)
Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak pada kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah.	Minimal 10% dari Pajak Air Tanah (PP 35 2023 tentang KUPDRD) (Ditetapkan 16 Juni 2023)

Capaian selama Tahun 2021 s.d 2023 dengan unsur Pendidikan adalah 23,73%, Infrastruktur sebesar 62,19%, Bagi Hasil Pajak sebesar 11,78%, Alokasi Dana Desa sebesar 100,14%, ADK sebesar 112,51% dan pengawasan sebesar 0,44%. Rincian capaian mandatory spending per tahun dapat dilihat pada **Lampiran**.

7.3.1 IKTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Kapuas menganggarkan pendapatan sebesar Rp2.351.499.510.784,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.621.655.503.640,90 atau sebesar 111,49%. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp2.133.296.541.651,40 dari anggaran sebesar Rp2.521.918.363.231,00 atau terealisasi sebesar 84,59%. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp497.590.153.221,00 atau 81,50% dari anggaran belanja modal sebesar Rp610.505.117.487,00 Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp1.263.553.235.537,40 atau 83,96% dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.504.884.295.444,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.170.159.923,00 atau 13,57% dari anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp45.476.804.500,00. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp365.982.992.970,00 atau 101,37% dari anggaran belanja transfer sebesar Rp361.052.145.800,00 Pembiayaan neto terealisasi sebesar Rp353.257.340.593,03 atau 204,37% dari anggaran pembiayaan neto sebesar Rp172.856.073.447,00 dengan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp 841.616.302.582,53.

Berdasarkan penetapan target dalam APBD murni ke APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan senilai Rp99.183.122.896,00 dari semula Rp2.252.316.387.888,00 menjadi 2.351.499.510.784,00, Berdasarkan penetapan target tersebut, Pendapatan Asli Daerah tercapai melebihi target sebesar 109,77% dari anggaran perubahan senilai Rp125.868.780.784,00 direalisasikan sebesar Rp138.169.280.020,90. Rincian Pendapatan Asli Daerah yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan ada pada akun Retribusi Daerah dengan anggaran senilai Rp7.644.300.000,00 direalisasikan senilai Rp5.983.885.900,08 atau sebesar 78,28% serta Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan anggaran senilai Rp4.695.000.000 direalisasikan senilai Rp27.049.142,65 atau sebesar 0,58%.

Berdasarkan penetapan target dalam APBD murni ke APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah bertambah senilai Rp269.877.953.187,00 dari semula Rp2.254.477.631.044,00 menjadi 2.254.355.584.231,00. Berdasarkan penetapan target tersebut, Belanja Daerah direalisasikan senilai Rp2.133.296.541.651,40 atau sebesar 84,59%. Rincian Belanja Daerah yang direalisasikan dibawah target yang ditetapkan pada akun 1) Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar 13,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp45.476.804.500,00 dengan realisasi sebesar Rp6.170.159.923,00; 2) Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar 78,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp791.596.132.986,00 dengan realisasi sebesar Rp617.979.936.208,00; 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang direalisasikan sebesar 75,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp410.999.937.907 dengan realisasi sebesar Rp312.313.886.972,00.

Realisasi Belanja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan tersebut menimbulkan kewajiban pembayaran pada periode pelaporan berikutnya yaitu Merupakan utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan senilai Rp64.480.000,00, Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I pada Dinas PUPRKP senilai Rp287.098.405,00, Utang Belanja Modal Jalan - Jalan Kabupaten pada Dinas PUPRKP senilai Rp 116.083.771.330,00.

7.3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Kendala dan permasalahan dalam pencapaian Target Kinerja Tahun 2023 dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 12: Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Per Perangkat Daerah

No Urut	Perangkat Daerah	Hambatan dan Kendala Masing-Masing Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan	Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, dapat dilihat masih adanya kegiatan yang tidak terealisasi

No Urut	Perangkat Daerah	Hambatan dan Kendala Masing-Masing Perangkat Daerah
		100%, secara umum beberapa hambatan atau kendala yang di hadapi dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal antara lain disebabkan SDM aparatur yang belum memadai, sarana dan prasana yang belum optimal, masih adanya ke khawatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundang undangan yang setiap tahunnya mengalami perubahan
2	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 masih terdapat belanja yang tidak terealisasi sesuai target terutama untuk belanja modal penyelesaiannya diperpanjang ke tahun anggaran 2024 karena : 1. Pada Pembangunan Gudang Farmasi dan Labkesda pada saat berakhirnya kontrak pekerjaan pada 27 Desember 2023 terdapat item pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan yaitu pemasangan/aplikasi Epoxy karena kelembaban lantai yang belum tercapai (rata-rata kelembaban 25% lebih bahkan di beberapa titik 40%), sedangkan material sudah on site. Syarat pemasangan epoxy adalah kelembaban beton lantai dibawah 16 % (berdasarkan alat pengukuran Protimeter dari Prophan). Atas dasar itu PPK memerintahkan kontraktor untuk menunda pekerjaan pemasangan epoxy karena jika dipaksakan maka hasil pemasangan akan terjadi bubble dan cepat rusak . Setelah menunggu sekitar 3 bulan dan melewati beberapa kali pemeriksaan kelembaban sudah turun menjadi sekitar 16% sehingga pada 25 Maret 2024 pekerjaan pemasangan/aplikasi epoxy sudah diselesaikan pada kedua bangunan tersebut (pekerjaan dilakukan dalam masa pemeliharaan) 2. Pembangunan RS Pratama Pujon, saat kontrak berakhir pada 26 Desember 2023 progress pekerjaan sudah mencapai 90% dan PPK menilai bahwa kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga dilakukan pemberian kesempatan dengan dikenakan denda. Hal ini juga mempertimbangkan bahwa RS Pujon adalah kebutuhan yang sangat dinantikan Masyarakat di 5 kecamatan daerah non pasang surut dimana proposal pembangunan tersebut dari masyarakat Pujon sejak 2015 dan masyarakat dengan sukarela telah menghibahkan tanahnya. Pada tanggal 13 Maret 2024 pekerjaan sudah dilakukan PHO 100%.
3	RSUD/BLUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas	Adanya pergantian bendahara pada bulan April 2023 maka perlu adanya proses penyesuaian serta adanya kesalahan input anggaran yang mengakibatkan perlu dilakukan proses pergeseran sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hambatan dan kendala pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain : 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan (alat uji,alat dukung,dll) 2. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya karena purna tugas ,dll
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 2. Kapasitas personil Anggota Satpol PP masih rendah, hal ini terkait masih banyak Anggota yang belum mengikuti pelatihan teknis kepomongprajaan. 3. Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) masih kurang. 4. Anggota Satlinmas masih belum diberdayakan secara maksimal. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan Perda/Perkada.
6.	Dinas Sosial	1.Kurang SDM pada Dinas Sosial yang merupakan potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang sosial yang merupakan salah satu factor yang menentukan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial. 2.Sarana dan prasara pada Dinas Sosial secara kualitas dan kuantitas sarana masih sangat terbatas , sehingga pelaksanaan program dan kegiatan belum bias tercapai secara optimal yang akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian target yang akan dicapai. 3.Masih terbatasnya anggaran yang tersedia.
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Masih kurangnya SDM pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas yang kompeten untuk pengelola kegiatan secara teknis khususnya tenaga Aparat Sipil Negara (ASN) dalam hal ini PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), untuk mengelola dan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Sehingga pencapaian target dalam penyerapan pagu anggaran belanja pendapatan dan belanja daerah tidak maksimal membantu meningkatkan/mempercepat dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai target. 2. Tidak terlaksananya Kegiatan Posko Banjir dan Angin Putting Beliung dan Kegiatan Patroli dan Groundcheck Hotspot serta teralisasinya kenaikan TPP yang berakibat terhadap target realisasi anggaran.
8.	Dinas Tenaga	1. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas

No Urut	Perangkat Daerah	Hambatan dan Kendala Masing-Masing Perangkat Daerah
	Kerja	merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Kabupaten Kapuas. Namun perlu disadari bahwa kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih perlu di kembangkan sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal. 2. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang Ketenagakerjaan. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan program kegiatan belum dapat di capai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pencapaian target yang ditetapkan.
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Kendala dan hambatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut. 1. Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Anggaran 2022; 2. Proses penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022 mengacu pada sasaran, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam perubahan Rencana Strategis (Renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan; 3. Pengesahan DPA yang baru terlaksana pada tanggal 21 Juni 2022 terkait dengan perubahan refocusing anggaran serta perubahan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan DAK Non Fisik, sesuai surat Dirjen Bina Keuangan Daerah nomor 906/923/Keuda tanggal 5 Februari 2022
10	Dinas Ketahanan Pangan	Hasil postingan SIPD tersebut akan terlihat pada DPPA-SKPD khusus belanja/kegiatan yang bersangkutan, dimana akan terlihat anggaran sebelum pergeseran dan anggaran setelah pergeseran, serta berapa bertambah atau berkurang, sehingga pada dasarnya realisasi anggaran tidak melebihi dari pagu anggaran dan pada saat proses pencairan dana apabila melebihi pagu anggaran akan secara otomatis ditolak oleh sistem aplikasi SIPD Keuangan.
11	Dinas Lingkungan Hidup	Kendala – kendala yang dihadapi dalam tahun 2023 dalam kaitannya pencapaian terhadap target pendapatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 memiliki target Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tapi hal ini belum dapat terlaksana dikarenakan belum terakreditasinya Laboratorium sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas belum bisa menarik Retribusi dari Laboratorium Lingkungan.
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 dalam kaitannya pencapaian terhadap target pendapatan maupun penyerapan pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yang diharapkan. Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. 1. Tingkat pemahaman system pengelolaan/Barang Milik Daerah SKPD masih lemah, Sistem Penatausahaan asset baik asset lancar dan asset tetap masih sangat lemah terutama bagi personel yang mengurus Aset di SKPD hal ini disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai. 2. Kompetensi dan pengetahuan para PPTK kurang optimal dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut: 1. Terjadinya Perubahan APBD-SKPD, sehingga rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya tidak dapat terealisasi (kurang optimal). 2. Tidak berjalannya beberapa kegiatan di Bidang-bidang yang menjadi Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.
14	Dinas Perhubungan	Kendala dan hambatan Pada Dinas Perhubungan masalah penurunan penyerapan Pagu Anggaran dikarenakan sebagian Anggaran terdapat dipergeseran yang baru bisa dilaksanakan kegiatan di bulan November, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terkejar. Sedangkan untuk penurunan Realisasi Pendapatan terjadi sbb: 1. Adanya kebijakan pengujian kendaraan bermotor terkait mekanisme titip uji untuk kendaraan dari luar daerah ke Daerah Kabupaten Kapuas. 2. Adanya Aturan terkait kewenangan untuk jasa pelabuhan yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat. 3. Adanya beberapa kantong parkir yang harus di evaluasi karena masih terbatas ketersediaan lahan, turunya pengguna parkir dikantong tertentu (sehingga perlu evaluasi kembali)

No Urut	Perangkat Daerah	Hambatan dan Kendala Masing-Masing Perangkat Daerah
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan antara lain: 1. Jumlah personil dan kesiapan SDM yang ada belum memadai dan sangat terbatas sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut. 2. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja. 3. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah yang sangat cepat mengakibatkan setiap personil/aparat harus selalu mengikuti diklat dan bintek serta Kominfoisasi terhadap adanya peraturan baru tersebut dalam rangka peningkatan SDM
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. 1. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas sesuai jumlah/ kompetensi yang dibutuhkan. 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana. 3. Masih terbatasnya anggaran. 4. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut : 1. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kapuas sesuai kompetensi yang dibutuhkan; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Daerah;
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tidak terdapat kendala dan hambatan dalam penyerapan anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
19	Dinas Perikanan	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target/ kinerja keuangan pada saat realisasi keuangan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan Numenklatur Pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta akun Belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodifikasi dan numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) berbasis web sampai saat ini belum bisa dipergunakan. 2. Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insetif Daerah (DID) harus menunggu transferan dari Pusat dan Dana tersebut akan disalurkan disesuaikan dengan tahapan pekerjaan.
20	Dinas Pertanian	Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 dalam kaitannya pencapaian terhadap target pendapatan maupun penyerapan pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yang diharapkan. Kendala dan permasalahan tersebut yaitu : keadaan alam atau iklim yang tidak menentu, wabah yang menyerang tanaman padi dan harga pangan yang melambung, sehingga baik pendapatan, program maupun kegiatan yang tergantung iklim dan pergerakan arus barang dan harga sangat tidak optimal daya beli masyarakat yang menurun mengakibatkan menurunnya minat masyarakat petani dalam pengembangan tanaman pertanian.
21	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. 1. Semua kegiatan terlaksana dengan baik, namun pada kegiatan Pasar Murah Pengendalian Inflasi Daerah tidak terserap seluruhnya dikarenakan kelebihan penganggaran. 2. Tidak tercapainya target PAD pada retribusi pasar dikarenakan ada beberapa penjual yang mengontrak blok pasar tidak bias melunasi uang sewa di tahun anggaran 2023 namun akan dilunasi di tahun anggaran selanjutnya. 3. Belanja Tidak Langsung dalam hal ini anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) teranggarkan lebih dari cukup, namun kenaikan TPP tidak diberlakukan ditahun anggaran 2023. 4. Untuk Pendapatn Asli Daerah seperti sewa aula dan tera/tera ulang untuk Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sehingga melebihi target dan hampir mencapai target yang sudah ditetapkan.
22	Dinas Transmigrasi	Tidak ada hambatan dan kendala realisasi belanja telah mencapai rata-rata 100%.
23	Sekretariat Daerah	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut : 1. Realisasi APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Sebesar Rp. 63.424.570.777,- dengan pagu sebesar Rp. 73.524.490.137,- atau 86,26% - Belanja Operasi Pagu Rp. 63.261.212.127,- yang terealisasi Rp. 54.673.204.415,- atau 86,42 % - Belanja Modal Rp.10.263.278.010,- yang terealisasi Rp. 8.751.366.362,- atau

No Urut	Perangkat Daerah	Hambatan dan Kendala Masing-Masing Perangkat Daerah
		85,27% Hambatan dan Kendala nya, sehingga Sekretariat Daerah tidak bisa realisasinya 100 % - Pengadaan Modal tanah batal di laksanakan di Bagian Perencanaan dan Keuangan - Pagu Kenaikan Tambahan Penghasilan Pengawai tahun 2023 Batal di Realisasikan - Tidak bisa tutup buku karena ada beberapa laporan realisasi keuangan sebesar 1 M yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp. 79.500.000,- atau 79.50% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- tidak tercapainya target penerimaan hal ini terjadi : a. Karena tahun 2023 ini awal kegiatan masih dilaksanakan secara vicon atau daring , b. SKPD tidak menganggarkan sewa aula untuk pelaksanaan kegiatan hal ini disebabkan karena kegiatan masih dibatasi untuk mengumpulkan orang banyak pada awal tahun. 2. Realisasi APBD Bappeda Kabupaten Kapuas sebesar 74,02 % dan Fisik 100% hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2023 ini kegiatan hanya untuk biaya rutin kantor dan kegiatan yang bersifat kontraktual 3. Karena DPPA baru disahkan tanggal 27 Oktober 2023 sehingga banyak kegiatan yang menumpuk pada akhir tahun anggar 4. Peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sangat diperlukan dalam mengontrol dan mengendali kegiatan, sehingga kegiatan tidak terjadi penumpukan pelaksanaannya pada akhir tahun anggaran.
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian target dan penyerapan realisasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
26	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut : 1. Untuk target pendapatan, dilihat dari realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 40.840.055.197,00 atau 114,80% dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 35.575.025.000,00. Jikalau dilihat secara keseluruhan realisasi Pendapatan ini melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 5.265.527.197,00 2. Sedangkan Anggaran Belanja terealisasi sebesar Rp. 12.174.863.409,00 atau 79,79,00 % Dari Anggaran Belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 15.257.927.200,00 hal ini dikarenakan lambatnya progres beberapa kegiatan oleh Pelaksana kegiatan sehingga penyerapan keuangan tidak sampai 100 %.
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kendala dan permasalahan tersebut sebagai berikut : Anggaran tidak dapat direalisasikan maksimal karena ada belanja yang tidak dapat dibayarkan berhubungan dengan tidak adanya Peraturan Bupati Kapuas yang mengatur kenaikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja tahun 2023.
28	Inspektorat Daerah	Berdasarkan evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas aparat fungsional pengawasan tidak sebanding dengan tuntutan program pengawasan dan jumlah objek pemeriksaan yang harus dilaksanakan. 2. terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah untuk melakukan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah.
29	Kecamatan Kapuas Barat	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, pada Kecamatan Kapuas Barat terutama pada tidak tercapainya target yang diinginkan pada pendapatan daerah dan penyebabnya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak terutama Pajak Sarang burung Walet yang belum terserap samasekali sehingga target tidak tercapai.
30	Kecamatan Pulau Petak	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. 1. Kurangnya personel pemungut pajak 2. Waktu pemungutan pajak diakhir tahun / waktunya terbatas 3. Pemungut pajak Kurang mendapat informasi dari Kabupaten/ tidak adanya Grup Whatsapp yang menampung informasi & permasalahan lapangan 4. Banyak Pemilik usaha sarang burung walet bukan warga kecamatan Pulau Petak sehingga sangat sulit menagih pajak karna kesulitan menghubungi pemilik. Sedangkan yang berada ditempat adalah hanya pegawai yang

No Urut	Perangkat Daerah	Hambatan dan Kendala Masing-Masing Perangkat Daerah
		menunggu rumah sarang burung walet. Beberapa kali dikirim surat dan didatangi tidak ada respon, Kecamatan tidak ada kewenangan menutup sarang walet. 5. Retribusi Karcis pasar hanyar diedarkan pada satu pasar dikecamatan pulau petak, untuk pasar-pasar lain belum bisa terjangkau karena kekurangan personil 6. Untuk penyerapan anggaran terdapat anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang belum terserap cukup maksimal dikarenakan anggaran sebelumnya mengalami perubahan/penambahan dikarenakan akan ada kenaikan besaran tunjangan tersebut, tetapi sampai diakhir tahun belum ada perbup kenaikan.
31	Kecamatan Kapuas Kuala	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. 1. Untuk realisasi pendapatan dalam hal ini sudah melebihi target anggaran. 2. Belanja Pegawai belum terserap secara optimal karena adanya Penambahan Pagu anggaran untuk beberapa jabatan dan jabatan tersebut sudah tidak ada lagi (Jabatan yang kosong) di Kecamatan Kapuas Kuala 3. Belum Terisinya Jabatan yang ada khususnya untuk penambahan staf dan penarikan sekdes didesa-desa guna menambah personil pegawai Kecamatan Kapuas Kuala belum terlaksana.
32	Kecamatan Kapuas Hulu	Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi berikut : 1. Perekrutan SDM yang profesional untuk pengelola keuangan serta penyebaran aparatur dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan keuangan; 2. Adanya pelatihan tentang peraturan dan ketentuan keuangan bukan hanya untuk pengelola keuangan saja tetapi bagi para kepala SKPD dan jajarannya sehingga diharapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat terwujud; 3. Diharapkan perubahan anggaran dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana;
33	Kecamatan Selat	Hambatan dan kendala adalah sebagai berikut :: a. Dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, yaitu Terbatasnya kewenangan Pemerintahan Kecamatan Selat dalam penagihan / pemungutan pajak / retribusi restoran/kantin. b. Terbatasnya alokasi anggaran dan aparat Kecamatan Selat dalam penagihan pajak / retribusi daerah. c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 2. Terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Secara Profesional 3. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di SOPD Kantor Kecamatan Selat.
34	Kecamatan Kapuas Hilir	Kendala dan permasalahan pada Kecamatan Kapuas Hilir terutama belum tercapainya realisasi pendapatan sesuai target yang ditetapkan ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
35	Kecamatan Kapuas Timur	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi yang sesuai dengan realita dan dapat digambarkan umum dengan uraian sebagai berikut. 1. Masih kurang maksimalnya peran PPTK dalam melakukan tupoksinya karena sebagian besar kegiatan masih dilakukan oleh bendahara pengeluaran, namun dalam hal pencapaian target realisasi anggaran dapat terpenuhi dengan baik. 2. Belum maksimalnya Bendahara Keuangan dan melakukan SPJ
36	Kecamatan Basarang	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. 1. Belum optimalnya administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan 3. Belum optimalnya pembinaan sosial kemasyarakatan 4. Belum optimalnya penegakan PERDA 5. Belum optimalnya pencatatan data kependudukan 6. Belum optimalnya pelayanan perijinan 7. Belum optimalnya penanganan karhutla tingkat kecamatan
37	Kecamatan Mantangai	Dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi daerah terkendala pihak yang melakukan pengurusan perijinan yang menurun dibandingkan tahun lalu sehingga target dari retribusi daerah tidak tercapai. Untuk belanja terealisasi hanya 86,54% yang disebabkan oleh tidak terealisasi kenaikan belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp. 350.763.569 dari Anggaran sebesar Rp. 655.000.000 atau hanya teralisasi sebesar 53,55% dan untuk belanja lainnya telah sesuai dengan output yang diharapkan adapun sisa anggaran merupakan upaya efisiensi yang telah dilakukan.
38	Kecamatan Kapuas Tengah	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. 1. Realisasi pendapatan hanya 53,18% karena masih kurangnya kesadaran dari

No Urut	Perangkat Daerah	Hambatan dan Kendala Masing-Masing Perangkat Daerah
		masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah terutama pajak sarang burung walet. 2. Penyerapan pagu anggaran belanja sebesar 71,66% sudah sangat baik.
39	Kecamatan Kapuas Murung	Kendala dan permasalahan pada Kecamatan Kapuas Murung terutama dari segi pendapatan daerah yang belum tercapai secara maksimal sebagai berikut. 1. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masyarakatnya belum maksimal. 2. Pajak reklame dikarenakan sebagian masyarakat belum sadar kewajiban membayar pajak. 3. Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan banyaknya sarang burung walet belum menghasilkan (Panen).
40	Kecamatan Timpah	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan secara profesional di Bidang Keuangan; 2. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di SOPD Kantor Kecamatan Timpah. 3. Masih ada beberapa jabatan struktural yang belum terisi sehingga masih adanya rangkap jabatan/pekerjaan pejabat struktural yang ada di SOPD Kantor Kecamatan Timpah.
41	Kecamatan Bataguh	Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 Kecamatan Bataguh, hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja tahun 2023. - Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan alasan belum ada hasil yang didapat terutama untuk sarang burung walet - Penyerapan anggaran yang tidak mencapai target maksimal karena adanya perubahan/kenaikan anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang tidak bisa direalisasikan terkendala Perbut. - Dan berkurangnya beberapa personil yang ada di Kecamatan dan Kelurahan karena pensiun dan pindah tugas sehingga berkurangnya penyerapan anggaran dan kinerja tidak maksimal.
42	Kecamatan Tamban Catur	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut : 1. Realisasi Pagu Pendapatan Realisasi Pendapatan sebesar 31,34% dalam pencapaian target pendapatan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Perda dan Perbup terkait pelimpahan sebagian kewenangan daerah Kabupaten Kapuas ke Kecamatan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pajak dan retribusi burung walet sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah. 2. Realisasi Pagu Anggaran Belanja Realisasi Belanja sebesar 81,34 % (Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 72,38% dan Belanja Langsung sebesar 98,64%) realisasi sebesar ini sudah baik walaupun masih perlu ditingkatkan kembali sehingga lebih maksimal dan efisien dalam pencapaian realisasi anggaran belanja Kecamatan Tamban Catur.
43	Kecamatan Dadahup	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. 1. Secara keseluruhan persentase penyerapan anggaran cukup tinggi, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kesalahan didalam perencanaan. 2. Untuk pendapatan, khususnya pajak daerah dari target sebesar 110.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 9.490.020,-(8,63%). Khususnya pendapatan pajak sarang burung walet terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,-
44	Kecamatan Pasak Talawang	Berdasarkan evaluasi secara umum hambatan dan permasalahan pada Kecamatan Pasak Talawang adalah sebagai berikut: 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memperoleh pendidikan dan pelatihan secara profesional di bidang keuangan. 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Pasak Talawang. 3. Masih adanya jabatan struktural yang belum terisi, sehingga adanya rangkap jabatan/pekerjaan pada Kecamatan Pasak Talawang.
45	Kecamatan Mandau Talawang	Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut. 1. Realisasi pendapatan hanya 44,50% karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah terutama pajak sarang burung walet. 2. Penyerapan pagu anggaran belanja sebesar 85,28% sudah sangat baik.
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak ada hambatan dan kendala realisasi belanja telah mencapai rata-rata 100%.

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pada TA 2023, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) d.h.i. Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang mencakup 51 Perangkat Daerah (PD) yaitu.

Tabel 13: Perangkat Daerah pada Kabupaten Kapuas

No	Kode PD	Perangka Daerah Satuan Kerja
1	1.01.1.01.1.01.01.0000	Dinas Pendidikan
2	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan
3	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	1.06.0.00.0.00.06.0000	Dinas Sosial
7	1.06.1.05.0.00.07.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	2.07.0.00.0.00.08.0000	Dinas Tenaga Kerja
9	2.08.2.14.0.00.09.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
10	2.09.0.00.0.00.10.0000	Dinas Ketahanan Pangan
11	2.11.0.00.0.00.11.0000	Dinas Lingkungan Hidup
12	2.12.0.00.0.00.12.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	2.13.0.00.0.00.13.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	2.15.0.00.0.00.14.0000	Dinas Perhubungan
15	2.16.2.20.2.21.15.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	2.18.0.00.0.00.16.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	2.22.2.19.3.26.17.0000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
18	2.24.2.23.0.00.18.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19	3.25.0.00.0.00.19.0000	Dinas Perikanan
20	3.27.0.00.0.00.20.0000	Dinas Pertanian
21	3.30.3.31.2.17.21.0000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
22	3.32.0.00.0.00.22.0000	Dinas Transmigrasi
25	4.01.0.00.0.00.23.0000	Sekretariat Daerah
26	4.02.0.00.0.00.24.0000	Sekretariat DPRD
27	5.01.5.05.0.00.27.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	5.02.0.00.0.00.28.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
29	5.02.5.02.5.02.29.0000	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
30	5.03.0.00.0.00.25.0000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
31	03.5.04.0.00.31.1000	Sekretariat Korpri
32	5.03.5.04.0.00.31.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33	6.01.0.00.0.00.26.0000	Inspektorat
34	7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Kapuas Barat
35	7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Pulau Petak
36	7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Kapuas Kuala
37	7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Kapuas Hulu
38	7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Selat
39	7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Kapuas Hilir
40	7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Kapuas Timur
41	7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Basarang
42	7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Mantangai
43	7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Kapuas Tengah
44	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Kapuas Murung
45	7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Timpah
46	7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Bataguh
47	7.01.0.00.0.00.45.0000	Kecamatan Tamban Catur
48	7.01.0.00.0.00.46.0000	Kecamatan Dadahup
49	7.01.0.00.0.00.47.0000	Kecamatan Pasak Talawang
50	7.01.0.00.0.00.48.0000	Kecamatan Mandau Talawang
51	8.01.0.00.0.00.04.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPKD. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan LKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

7.4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walau pun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun

Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Kapuas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

7.4.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

7.4.2.3 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kapuas; dan
- Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kapuas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode.

7.4.2.3.1 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Kapuas atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kapuas dan investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

7.4.2.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Kapuas lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kapuas juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kapuas atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

7.4.2.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kapuas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan tidak perlu dibayar kembali;
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7.4.2.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Kapuas selama periode tertentu. Unsur yang dicakup

dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut.

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD Kabupaten Kapuas;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD Kabupaten Kapuas.

7.4.2.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

7.4.2.7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama Tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi;
- g. Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- h. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

7.5. Penjelasan atas Laporan Keuangan

7.5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

7.5.1.1 Pendapatan

Pendapatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	2.351.499.510.784,00	2.621.655.503.640,90	2.171.137.766.582,29

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp2.621.655.503.640,90 dan Rp2.171.137.766.582,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14: Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan Asli Daerah	125.868.780.784,00	138.169.280.020,90	151.473.703.874,09
Pendapatan Transfer	2.225.630.730.000,00	2.482.886.214.563,00	2.018.455.830.856,20
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	600.009.057,00	1.208.231.852,00
JUMLAH	2.351.499.510.784,00	2.621.655.503.640,90	2.171.137.766.582,29

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	125.868.780.784,00	138.169.280.020,90	151.473.703.874,09

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp138.169.280.020,90 dan Rp151.473.703.874,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan Pajak Daerah	38.921.025.000,00	42.289.931.898,60	70.676.578.950,52
Pendapatan Retribusi Daerah	7.644.300.000,00	5.983.885.900,08	5.888.173.171,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.695.000.000,00	27.049.142,65	7.704.570.345,00
Lain-lain PAD yang Sah	74.608.455.784,00	89.868.413.079,57	67.204.381.407,57
JUMLAH	125.868.780.784,00	138.169.280.020,90	151.473.703.874,09

7.5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	38.921.025.000,00	42.289.931.898,60	70.676.578.950,52

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp42.289.931.898,60 dan Rp70.676.578.950,52 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16: Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pajak Hotel	456.200.000,00	591.201.712,00	235.303.321,00
Pajak Restoran	10.125.500.000,00	13.856.117.814,60	7.913.824.740,00
Pajak Hiburan	86.700.000,00	148.609.087,00	41.515.000,00
Pajak Reklame	439.000.000,00	455.775.871,00	498.029.597,00
Pajak Penerangan Jalan	10.200.000.000,00	10.501.990.617,00	9.703.017.029,00
Pajak Parkir	120.000.000,00	73.913.200,00	78.370.800,00
Pajak Air Tanah	330.750.000,00	310.886.739,00	278.081.043,00
Pajak Sarang Burung Walet	2.315.000.000,00	187.348.000,00	121.365.600,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.007.875.000,00	4.427.698.161,00	5.126.264.564,52
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,00	3.776.290.392,00	3.023.829.963,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.340.000.000,00	7.960.100.305,00	43.656.977.293,00
JUMLAH	38.921.025.000,00	42.289.931.898,60	70.676.578.950,52

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 per SKPD sebagai berikut.

Tabel 17: Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 per SKPD

Uraian	Perangkat Daerah	Realisasi
Pajak Hotel	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	591.201.712,00
Pajak Restoran	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	13.505.117.774,00
Pajak Restoran	Kecamatan Basarang	7.360.000,00
Pajak Restoran	Kecamatan Timpah	7.149.313,00
Pajak Restoran	Kecamatan Kapuas Barat	33.106.384,00
Pajak Restoran	Kecamatan Pulau Petak	32.305.670,00
Pajak Restoran	Kecamatan Kapuas Kuala	18.598.076,00
Pajak Restoran	Kecamatan Kapuas Hulu	7.966.200,00
Pajak Restoran	Kecamatan Selat	48.342.520,00
Pajak Restoran	Kecamatan Kapuas Hilir	21.098.700,00
Pajak Restoran	Kecamatan Kapuas Timur	15.561.895,00
Pajak Restoran	Kecamatan Mantangai	48.891.850,00
Pajak Restoran	Kecamatan Kapuas Tengah	23.300,00
Pajak Restoran	Kecamatan Kapuas Murung	15.468.033,00
Pajak Restoran	Kecamatan Bataguh	51.632.000,00
Pajak Restoran	Kecamatan Tamban Catur	30.408.074,60
Pajak Restoran	Kecamatan Dadahup	7.490.020,00
Pajak Restoran	Kecamatan Mandau Telawang	3.698.005,00
Pajak Restoran	Kecamatan Pasak Telawang	1.900.000,00
Pajak Hiburan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	144.259.087,00
Pajak Hiburan	Kecamatan Timpah	3.000.000,00
Pajak Hiburan	Kecamatan Pulau Petak	350.000,00
Pajak Hiburan	Kecamatan Kapuas Murung	1.000.000,00
Pajak Reklame	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	389.710.851,00
Pajak Reklame	Kecamatan Pasak Telawang	2.260.000,00
Pajak Reklame	Kecamatan Tamban Catur	5.144.000,00
Pajak Reklame	Kecamatan Bataguh	1.755.675,00
Pajak Reklame	Kecamatan Timpah	26.123.625,00
Pajak Reklame	Kecamatan Kapuas Murung	1.155.000,00
Pajak Reklame	Kecamatan Kapuas Tengah	2.960.200,00
Pajak Reklame	Kecamatan Mantangai	6.604.000,00
Pajak Reklame	Kecamatan Basarang	2.887.000,00
Pajak Reklame	Kecamatan Kapuas Timur	2.380.200,00
Pajak Reklame	Kecamatan Kapuas Hilir	335.000,00
Pajak Reklame	Kecamatan Kapuas Hulu	4.950.000,00
Pajak Reklame	Kecamatan Kapuas Kuala	5.180.320,00
Pajak Reklame	Kecamatan Pulau Petak	1.330.000,00
Pajak Reklame	Kecamatan Mandau Talawang	3.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	10.501.990.617,00
Pajak Parkir	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	73.913.200,00
Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	310.886.739,00
Pajak Sarang Burung Walet	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	18.072.850,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Kapuas Hulu	3.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Selat	12.006.300,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Kapuas Hilir	12.676.100,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Mantangai	25.452.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Kapuas Murung	1.500.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Timpah	34.523.250,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Tamban Catur	17.150.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Pasak Telawang	7.045.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Mandau Telawang	20.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Bataguh	15.062.500,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Dadahup	2.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Pulau Petak	2.960.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	Kecamatan Kapuas Kuala	15.900.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	816.433.353,00

Uraian	Perangkat Daerah	Realisasi
	Permukiman	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Kapuas Timur	7.512.250,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Pulau Petak	6.225.917,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Mantangai	24.968.796,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Kapuas Murung	2.688.975,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Timpah	2.717.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Tamban Catur	4.847.350,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Kapuas Barat	730.125,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Bataguh	2.633.500,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Kapuas Tengah	503.500,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.558.255.570,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	181.825,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.776.290.392,00
BPHBT- Pemindahan Hak	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	7.960.100.305,00
	JUMLAH	42.289.931.898,60

7.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	7.644.300.000,00	5.983.885.900,00	5.888.173.171,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.983.885.900,00 dan Rp5.888.173.171,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18: Pendapatan Retribusi Daerah 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	191.564.900,00	677.540.730,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	608.000.000,00	317.617.000,00	418.510.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	550.000.000,00	535.310.000,00	552.622.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar	442.000.000,00	412.288.900,00	560.341.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	240.000.000,00	87.262.500,00	103.145.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	30.000.000,00	50.850.000,00	28.850.000,00
Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	2.100.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	50.000.000,00	50.080.000,00	58.110.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	9.050.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000,00	457.725.832,00	318.966.750,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.517.000.000,00	1.296.110.596,00	446.292.071,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.402.300.000,00	787.270.000,00	1.217.400.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	95.000.000,00	36.000.000,00	46.000.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	400.000.000,00	255.280.000,00	227.675.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	300.000.000,00	36.370.400,00	73.415.600,00
Retribusi Penyeberangan Air	60.000.000,00	54.600.000,00	59.500.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	348.000.000,00	149.128.000,00	202.454.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	211.627.020,00
Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	500.000.000,00	707.440.000,00	680.480.000,00
Pemberian izin Gangguan tempat Usaha/ Kegiatan	0,00	0,00	3.143.500,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	702.000.000,00	549.937.772,08	0,00
Jumlah	7.644.300.000,00	5.983.885.900,08	5.888.173.171,00

Rincian Pendapatan Retribusi per SKPD sebagai berikut.

Tabel 19: Rincian Pendapatan Retribusi per SKPD

SKPD	Anggaran	Realisasi
Dinas Pendidikan	120.000.000	91.000.001,00
Dinas Kesehatan	50.000.000	200.614.900,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	530.000.000	844.922.839,00
Dinas Lingkungan Hidup	838.000.000	287.097.000,00

SKPD	Anggaran	Realisasi
Dinas Perhubungan	1.192.000.000	763.073.900,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	350.000.000	457.725.832,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.000.000	1.249.675.147,08
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	50.000.000	10.500.000,00
Dinas Perikanan	227.000.000	85.128.000,00
Dinas Pertanian	796.000.000	355.280.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.585.000.000	1.082.377.000,00
Sekretariat Daerah	200.000.000	186.300.256,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	79.500.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	60.000.000	2.880.000,00
Kecamatan Kapuas Barat	25.000.000	15.131.900,00
Kecamatan Pulau Petak	15.000.000	8.000.000,00
Kecamatan Kapuas Kuala	15.000.000	9.200.000,00
Kecamatan Kapuas Hulu	12.000.000	2.652.625,00
Kecamatan Selat	200.000.000	20.400.000,00
Kecamatan Kapuas Hilir	20.000.000	9.100.000,00
Kecamatan Kapuas Timur	45.000.000	10.000.000,00
Kecamatan Basarang	18.000.000	12.400.000,00
Kecamatan Mantangai	9.000.000	5.950.000,00
Kecamatan Kapuas Tengah	100.300.000	165.531.500,00
Kecamatan Kapuas Murung	20.000.000	7.200.000,00
Kecamatan Timpah	16.000.000	6.000.000,00
Kecamatan Bataguh	14.000.000	6.500.000,00
Kecamatan Tamban Catur	17.000.000	7.245.000,00
Kecamatan Dadahup	10.000.000	2.500.000,00
Kecamatan Pasak Talawang	5.000.000	0,00
Kecamatan Mandau Talawang	5.000.000	0,00
JUMLAH	7.644.300.000,00	5.983.885.900,08

7.5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	4.695.000.000,00	27.049.142,65	7.704.570.345,00

Realisasi pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp27.049.142,65 berasal dari pendapatan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida Kalimantan Tengah.

Tabel 20: Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.695.000.000,00	27.049.142,65	7.704.570.345,00
Jumlah	4.695.000.000,00	27.049.142,65	7.704.570.345,00

Realisasi pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp27.049.142,65 berasal dari PT. Bank Pembangunan Kalteng

7.5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	74.608.455.784,00	89.868.413.079,57	67.204.381.407,57

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp89.868.413.079,57 dan Rp67.204.381.407,57 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21: Realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Hasil Penjualan Aset Lainnya	50.000.000,00	676.947.838,00	0,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	50.000.000,00	64.000.000,00	52.550.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.000.000.000,00	8.146.453.676,94	2.957.020.323,09
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	199.234.928,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Jasa Giro pada Rekening dana BOS	0,00	0,00	200.200,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.831.166.485,93	1.488.457.794,36
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Terhadap Bendahara	0,00	285.495.573,00	111.193.170,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	426.326.933,20	392.639.065,38
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	3.862.681.804,02	1.674.401.978,74
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	62.723.780,00	117.842.204,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	384.059.810,00	218.455.922,00
Pendapatan Dari Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	9.849.630,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	139.483.027,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	1.208.363,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	11.250.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	25.038.250,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	799.451.452,74	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	14.883.677,31	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	319.923.244,62	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Naisoanal (JKN)	0,00	0,00	15.222.100,00
Pendapatan BLUD	65.858.455.748,00	69.807.469.533,81	59.977.163.722,00
Pendapatan Dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP)	650.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	74.608.455.784,00	89.868.413.079,57	67.204.381.407,57

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu sebagai berikut.

Tabel 22: Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per SKPD

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan	0,00	434.031.733,43	161.499.022,15
Dinas Kesehatan	650.000.000,00	375.535.153,08	115.020.097,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	0,00	4.428.094.141,30	1.990.380.356,45
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	18.300.000,00	100.652.325,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	72.510.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	40.828.400,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.308.363,00	0,00

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Sosial	0,00	0,00	3.200.200,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	922.600,00	30.000.100,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	5.237.153,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	26.073.600,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	22.575.800,00	20.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	0,00	142.804.700,00	0,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	50.000.000	71.450.000,00	52.550.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	39.380,00
Dinas Pertanian	0,00	94.440.185,77	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	344.188.030,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	5.179.100,00	0,00
Dinas Transmigrasi	0,00	136.900,00	4.113.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	67.618.916,00	88.313.360,23
Sekretariat DPRD	0,00	61.537.000,00	116.890.000,00
Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	0,00	14.900,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	15.978.277,31	270.270,00
Kecamatan Kapuas Barat	0,00	8.718.580,00	0,00
Kecamatan Dadahup	0,00	4.841.500,00	0,00
Kecamatan Selat	0,00	16.342.000,00	0,00
Kecamatan Kapuas Timur	0,00	5.600.000,00	0,00
Kecamatan Kapuas Kuala	0,00	10.769.250,00	0,00
Kecamatan Basarang	0,00	0,00	79.339,00
Kecamatan Timpah	0,00	69.639,00	0,00
Kecamatan Tamban Catur	0,00	2.994.000,00	263.964,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	50.000.000	660.985.138,00	6.000.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	8.000.000.000	13.032.094.735,87	4.557.907.396,74
Badan Pengelola Paja Retribusi Daerah	0,00	7.873.100,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	15.679.500,00	18.875,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	65.211.150,00	0,00
BLUD Puskesmas Anjir Serapat	1.912.632.811	1.896.114.507,00	1.587.321.250,00
BLUD Puskesmas Barimba	603.898.471	603.018.361,00	413.982.305,00
BLUD Puskesmas Dadahup	422.522.084	389.473.184,00	200.484.363,00
BLUD Puskesmas Basarang	618.089.472	611.505.434,00	469.525.680,00
BLUD Puskesmas Danau Rawah	188.744.830	177.927.378,00	128.900.864,00
BLUD Puskesmas Jangkang	335.519.932	320.408.336,00	296.323.120,00
BLUD Puskesmas Lamunti	190.498.534	179.017.029,00	247.412.720,00
BLUD Puskesmas Lupak	637.141.149	663.623.558,00	476.172.665,00
BLUD Puskesmas Mandomai	656.831.684	666.464.371,00	551.835.100,00
BLUD Puskesmas Mantangai	498.936.045	486.213.908,00	389.374.687,00
BLUD Puskesmas Melati	1.574.026.441	1.380.936.550,00	971.935.200,00
BLUD Puskesmas Palangkau	182.790.537	156.977.828,00	88.979.720,00
BLUD Puskesmas Palingkau	1.252.093.588	1.032.676.203,00	503.111.691,00
BLUD Puskesmas Panamas	289.292.893	279.991.976,00	166.759.200,00
BLUD Puskesmas Pujon	792.913.210	622.466.731,00	312.704.640,00
BLUD Puskesmas Pulau Kupang	880.883.953	914.100.002,00	524.695.675,00
BLUD Puskesmas Pulau Telo	400.117.506	425.254.605,00	256.009.396,00
BLUD Puskesmas Sei Hanyo	363.689.812	365.593.384,00	230.541.426,00
BLUD Puskesmas Sei Pinang	210.674.067	211.031.460,00	180.873.823,00
BLUD Puskesmas Sei Tatas	1.028.547.117	858.222.351,00	543.709.647,00

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
BLUD Puskesmas Selat	1.016.140.120	878.256.909,00	680.446.930,00
BLUD Puskesmas Talekung Punei	94.351.363	89.131.627,00	81.728.600,00
BLUD Puskesmas Tamban Baru	294.145.030	311.973.726,00	223.981.650,00
BLUD Puskesmas Tamban Catur	522.933.005	417.339.262,00	334.928.700,00
BLUD Puskesmas Terusan Tengah	414.446.847	447.697.031,00	291.040.200,00
BLUD Puskesmas Timpah	476.595.283	461.354.745,00	469.381.250,00
BLUD RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	50.000.000.000	54.960.699.077,81	49.355.003.220,00
Jumlah	74.608.455.784,00	89.868.413.079,57	67.204.381.407,57

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	2.225.630.730.000,00	2.482.886.214.563,00	2.018.455.830.856,20

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 per jenis adalah sebagai berikut.

Tabel 23: Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.133.090.730.000,00	2.344.130.128.576,00	1.916.526.045.574,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.540.000.000	138.756.085.987,00	101.929.785.282,20
Jumlah	2.225.630.730.000,00	2.482.886.214.563,00	2.018.455.830.856,20

7.5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	2.133.090.730.000,00	2.344.130.128.576,00	1.916.526.045.574,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar sebesar Rp2.344.130.128.576,00 dan Rp1.916.526.045.574,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24: Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Pusat			
Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil (DBH)	752.496.154.000,00	976.740.916.291,00	586.640.653.808,00
Dana Transfer Pusat Umum - Dana Alokasi Umum - (DAU)	808.731.231.000,00	808.725.785.465,00	777.279.406.867,00
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus - (DAK) Fisik	160.989.714.000,00	155.922.847.825,00	191.191.616.615,00
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus - (DAK) Non Fisik	229.037.707.000,00	215.901.190.995,00	178.894.925.240,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	1.770.863.000,00
Dana Desa	181.835.924.000,00	186.839.388.000,00	180.748.580.044,00
Jumlah	2.133.090.730.000,00	2.344.130.128.576,00	1.916.526.045.574,00

7.5.1.1.2.1.1. Dana Transfer Pusat Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	752.496.154.000,00	976.740.916.291,00	586.640.653.808,00

Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri atas.

Tabel 25: Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	53.826.684.000,00	59.171.580.583,00	87.488.580.143,00
DBH PPh Pasal 21	6.491.585.000,00	7.288.045.873,00	6.346.430.000,00
DBH Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN	75.000.000,00	72.235.531,00	69.875.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	123,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	22.604.100,00	2.108.111,00	33.968.650,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	52.742.900,00	95.300.758,00	680.684.650,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Baru Bara – Landrent	3.957.349.000,00	4.663.237.981,00	21.159.419.545,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Baru Bara – Royalty	674.149.991.000,00	872.390.190.530,00	458.251.512.820,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	12.445.991.000,00	31.353.272.437,00	10.502.604.050,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	18.984.153,00	149.267.950,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.474.207.000,00	1.685.960.211,00	1.958.311.000,00
Jumlah	752.496.154.000,00	976.740.916.291,00	586.640.653.808,00

7.5.1.1.2.1.2. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	808.731.231.000,00	808.725.785.465,00	777.279.406.867,00

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp808.725.785.465,00 dan Rp777.279.406.867,00 merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Selama Tahun 2023 dan 2022.

7.5.1.1.2.1.3. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	160.989.714.000,00	155.922.847.825,00	191.191.616.615,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp155.922.847.825,00 dan Rp191.191.616.615,00 merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas selama Tahun 2023 dan 2022. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pada Tahun 2023 dan 2022 terdiri atas.

Tabel 26: Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
DAK Fisik -Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	448.522.000,00	448.522.000,00	1.415.398.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler -SD	1.629.146.000,00	1.625.241.000,00	25.345.631.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler -SMP	1.674.204.000,00	1.674.204.000,00	18.115.618.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	17.689.091.847,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	6.379.654.096,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – Penguatan Intervensi Stunting	0,00	8.605.393.535,00	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – KB	0,00	0,00	2.510.833.500,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan – Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	1.530.094.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan	122.155.000,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			
DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan – Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	17.496.787.000,00	17.167.537.005,00	30.747.545.812,00
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	0,00	0,00	5.082.146.350,00
DAK Fisik – Bidang Jalan – Reguler – Jalan	18.535.269.000,00	0,00	15.205.086.000,00
DAK Fisik – Bidang Jalan – Penugasan – Jalan	29.470.150.000	47.378.128.000,00	10.593.301.500,00
DAK Fisik – Bidang Air Minum – Reguler	0,00	0,00	10.273.931.000,00
DAK Fisik – Bidang Sanitasi – Reguler	0,00	0,00	6.014.676.000,00
DAK Fisik – Bidang Irigasi – Penugasan	6.372.264.000,00	5.305.001.200,00	2.586.502.310,00
DAK Fisik - Penugasan - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan –Lingkungan Hidup	0,00	0,00	1.705.440.400,00
DAK Fisik – Bidang Kesehatan dan KB – Reguler – Kesiapan Sitem Kesehatan	0,00	0,00	35.996.666.600,00
DAK Fisik – Bidang Kesehatan dan KB – Penugasan – Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	9.360.238.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	121.366.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	75.880.979.000,00	73.597.455.085,00	0,00
Jumlah	160.989.714.000,00	155.922.847.825,00	191.191.616.615,00

7.5.1.1.2.1.4. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
229.037.707.000,00	215.901.190.995,00	178.894.925.240,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp215.901.190.995,00 dan Rp178.894.925.240,00 merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas selama tahun 2023 dan 2022. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri atas.

Tabel 27: Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
DAK NON Fisik – BOS Reguler	46.171.240.000,00	41.999.535.000,00	40.810.993.984,00
DAK NON Fisik – BOS Kinerja	3.240.000.000,00	2.860.000.000,00	2.080.000.000,00
DAK Non Fisik -TPG - PNSD	102.125.154.000,00	101.348.051.775,00	95.312.205.105,00
DAK Non Fisik – Tamsil Guru PNSD	1.034.250.000,00	470.171.600,00	1.402.288.000,00
DAK Non Fisik – TKG PNSD	21.572.257.000,00	20.247.188.000,00	21.303.377.000,00
DAK Non Fisik – BOP PAUD	9.036.000.000,00	8.986.554.000,00	301.800.000,00
DAK Non Fisik – BOP Pendidikan Kesetaraan	2.155.200.000,00	2.065.200.000,00	0,00
DAK Non Fisik – BOKKB – BOK	9.665.008.000,00	5.398.051.850,00	1.640.613.601,00
DAK Non Fisik – BOKKB – Pengawasan Obat dan Makanan	425.516.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik – BOKKB – Akreditasi Puskesmas	26.661.447.000,00	26.661.447.000,00	0,00
DAK Non Fisik – BOKKB – BKO	5.183.010.000,00	1.966.248.270,00	2.138.324.750,00
DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan perempuan dan Anak	375.000.000,00	75.147.000,00	451.800.000,00
DAK Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal	417.400.000,00	272.368.500,00	190.414.800,00
DAK Non Fisik – BOKKB – KB	0,00	2.591.505.000,00	13.013.748.000,00
DAK Non Fisik – Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	976.225.000,00	959.723.000,00	249.360.000,00
Jumlah	229.037.707.000,00	215.901.190.995,00	178.894.925.240,00

7.5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
181.835.924.000,00	186.839.388.000,00	182.519.443.044,00

7.5.1.1.2.2.1. Dana Transfer Khusus – Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID)	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	0,00	0,00	1.770.863.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp1.770.863.000,00 merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas selama tahun 2023 dan 2022.

7.5.1.1.2.2.2. Dana Transfer Khusus – Dana Desa (DD)

Dana Desa (DD)	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	181.835.924.000,00	186.839.388.000,00	180.748.580.044,00

Realisasi Dana Desa (DD) Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp186.839.388.000,00 dan Rp180.748.580.044,00 merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas selama tahun 2023 dan 2022.

7.5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	92.540.000.000,00	138.756.085.987,00	101.929.785.282,20

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp138.756.085.987,00 dan Rp101.929.785.282,20 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28: Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000.000,00	11.099.047.214,74	8.519.536.215,98
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.500.000.000,00	13.698.331.308,21	9.352.112.888,81
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	62.900.000.000,00	94.988.217.340,23	61.241.277.455,52
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	120.000.000	436.280.334,82	52.015.622,89
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.000.000.000	18.364.209.789,00	22.764.843.099,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	150.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Jumlah	92.540.000.000,00	138.756.085.987,00	101.929.785.282,20

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	0,00	600.009.057,00	1.208.231.852,00

Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.208.231.852,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29: Rincian Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah	0,00	600.009.057,00	1.208.231.852,00
Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	600.009.057,00	1.208.231.852,00

7.5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	2.521.918.363.231,00	2.133.296.541.651,40	1.985.108.336.829,24

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.133.296.541.651,40 dan Rp1.985.108.336.829,24 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30: Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Operasi	1.504.884.416.444,00	1.263.553.235.537,40	1.194.662.544.893,99
Belanja Modal	610.505.117.487,00	497.590.153.221,00	503.575.728.816,25
Belanja Tidak Terduga	45.476.804.500,00	6.170.159.923,00	3.457.327.575,00
Belanja Transfer	361.052.145.800,00	365.982.992.970,00	283.412.735.544,00
Jumlah	2.521.918.363.231,00	2.133.296.541.651,40	1.985.108.336.829,24

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	1.504.884.295.444,00	1.263.553.235.537,40	1.194.662.544.893,99

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.263.553.235.537,40 dan Rp1.194.662.544.893,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31: Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	791.596.132.986,00	617.979.936.208,00	648.471.012.472,92
Belanja Barang dan Jasa	584.259.070.997,00	535.019.096.570,40	459.074.769.793,29
Belanja Bunga	6.150.000.000,00	5.508.154.324,00	5.614.736.389,90
Belanja Hibah	122.622.803.186,00	104.789.760.160,00	79.937.515.037,88
Belanja Bantuan Sosial	256.288.275,00	256.288.275,00	1.564.511.200,00
Jumlah	1.504.884.295.444,00	1.263.553.235.537,40	1.194.662.544.893,99

7.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	791.596.132.986,00	617.979.936.208,00	648.471.012.472,92

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp617.979.936.208,00 dan Rp648.471.012.472,92 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32: Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Gaji Pokok ASN	334.375.915.591,00	286.067.566.404,00	296.700.647.064,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.471.994.000,00	25.100.333.216,00	25.819.896.104,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.341.694.000,00	6.966.715.700,00	7.102.471.200,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.502.000.000,00	20.378.657.185,00	21.274.426.084,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.413.045.000,00	3.633.849.838,00	3.024.839.704,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	17.178.820.000,00	14.293.642.260,00	14.963.547.168,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.064.727.000,00	918.382.471,00	1.154.248.565,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	56.065.100,00	4.234.725,00	4.274.563,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.898.649.000,00	11.734.026.341,00	12.129.779.501,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.020.098.000,00	869.326.703,00	682.237.643,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.252.174.000,00	1.487.177.574,00	1.810.897.345,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	143.446.566.000	96.450.984.530,00	109.583.070.713,92
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	49.915.661.000,00	8.385.000,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.655.333.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas	1.850.112.000,00	1.422.221.163,00	2.931.999.848,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pemungutan Pajak Daerah			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	339.873.500,00	142.106.378,00	174.959.802,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	102.942.452.425,00	101.196.101.908,00	103.521.241.195,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	22.647.343.400,00	21.216.319.500,00	20.706.719.860,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.635.828.400,00	1.023.000.000,00	967.687.500,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	36.000.000,00	5.985.000,00	29.048.223,00
Belanja Honorarium	522.388.820,00	423.010.000,00	664.310.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	810.583.000,00	810.583.000,00	892.290.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	90.627.000,00	66.717.000,00	66.055.500,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.800.000,00	103.126.080,00	86.976.420,00
Belanja Uang Paket DPRD	68.032.000,00	68.032.000,00	76.482.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.175.339.000,00	1.175.339.000,00	1.293.820.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	145.042.000,00	112.725.924,00	112.634.568,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD	153.750.000,00	21.741.300,00	21.284.550,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.232.400.000,00	7.056.000.000,00	7.056.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.808.100.000,00	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	54.219.000,00	54.219.000,00	59.678.320,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	10.689.000,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.238.931.000,00	5.827.948.497,00	5.613.026.112,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.023.940.000,00	6.660.000.000,00	6.660.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	352.764.000,00	0,00	0,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	170.700.000,00	26.100.000,00	46.800.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/ WKDH	7.048.000,00	2.610.000,00	4.680.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	109.434.000,00	58.320.000,00	84.240.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.499.000,00	2.027.760,00	2.896.800,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.670.000,00	583.357,00	1.052.727,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.034.000,00	840,00	1.200,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	8.020.000,00	2.610.000,00	4.524.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	775.000,00	54.000,00	100.620,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	837.000,00	162.000,00	280.800,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	533.814.200,00	208.185.839,00	626.742.994,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	37.516.500,00	8.338.765,00	38.663.279,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.500.000,00	312.480.000,00	312.480.000,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	502.791.000,00	240.000.000,00	400.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	68.538.050,00	64.390.950,00	0,00
Jumlah	791.596.132.986,00	617.988.321.208,00	648.471.012.472,92

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 berdasarkan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 33: Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 berdasarkan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan	434.330.864.225	361.979.699.116,00	380.766.303.799,00
Dinas Kesehatan	116.249.363.461	88.633.420.544,00	89.612.866.667,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	17.713.801.000	12.576.238.327,00	13.716.286.063,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.409.281.000	2.884.540.925,00	2.789.566.901,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.492.321.000	4.818.259.571,00	4.781.655.462,00
Dinas Sosial	3.713.181.000	2.512.215.806,00	2.487.429.270,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.322.921.000	2.136.532.854,00	2.190.130.895,00
Dinas Tenaga Kerja	3.529.401.000	2.352.101.386,00	2.374.733.529,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.478.761.000	2.608.053.515,00	3.027.186.063,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.840.361.000	2.985.241.710,00	3.169.266.601,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.924.771.000	4.149.058.641,00	4.432.765.784,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.364.413.000	2.149.009.878,00	2.277.216.746,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.536.161.000	2.492.672.857,00	2.461.027.746,00
Dinas Perhubungan	6.373.511.000	3.801.624.373,00	4.091.104.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.596.901.000	2.311.498.212,00	2.353.817.656,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.082.416.000	2.534.038.445,00	2.661.718.641,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.114.541.000	1.462.837.823,00	1.703.289.622,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.847.351.000	2.892.857.436,00	3.463.832.144,00
Dinas Perikanan	5.526.446.000	3.945.335.272,00	4.023.825.812,00
Dinas Pertanian	26.799.850.000	17.975.848.465,00	19.827.106.352,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	4.649.491.000	2.876.378.953,00	2.734.562.730,00
Dinas Transmigrasi	3.767.151.000	2.619.318.100,00	2.769.001.546,00
Sekretariat Daerah	18.526.789.000	11.735.671.337,00	13.596.169.746,00
Sekretariat DPRD	29.615.597.000	26.638.795.388,00	26.676.547.637,00
Kecamatan Kapuas Barat	2.181.400.000	1.665.352.415,00	1.634.914.742,00
Kecamatan Pulau Petak	2.074.395.000	1.552.079.063,00	1.414.529.417,00
Kecamatan Kapuas Kuala	1.852.660.000	1.212.042.051,00	1.253.723.478,92
Kecamatan Kapuas Hulu	1.454.060.000	881.358.443,00	922.304.224,00
Kecamatan Selat	4.798.739.000	5.147.793.643,00	4.641.177.169,00
Kecamatan Kapuas Hilir	4.102.500.000	3.051.115.084,00	3.293.050.272,00
Kecamatan Kapuas Timur	2.691.920.000	1.363.850.434,00	1.431.254.557,00
Kecamatan Basarang	1.867.595.000	1.360.228.489,00	1.442.387.813,00
Kecamatan Mantangai	1.621.370.000	1.155.895.003,00	1.270.872.372,00
Kecamatan Kapuas Tengah	1.637.330.000	1.028.562.299,00	1.335.423.113,00
Kecamatan Kapuas Murung	2.197.490.000	1.718.601.515,00	1.571.966.491,00
Kecamatan Timpah	1.580.520.000	1.147.360.163,00	1.188.368.609,00
Kecamatan Bataguh	1.632.745.000	993.738.640,00	1.344.230.112,00
Kecamatan Tamban Catur	1.560.630.000	1.129.484.603,00	979.622.556,00
Kecamatan Dadahup	1.438.480.000	1.032.876.463,00	983.251.370,00
Kecamatan Pasak Talawang	1.926.320.000	1.330.429.151,00	1.170.435.357,00

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Kecamatan Mandau Talawang	1.332.880.000	1.013.208.416,00	1.095.011.392,00
Sekretariat Dewan Pembina KORPRI	1.401.100,00	10.080.928,00	527.767.357,00
Inspektorat	5.084.436.000	3.558.212.999,00	3.635.798.372,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.991.241.000	3.204.222.502,00	3.556.141.914,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.465.128.000	3.785.307.213,00	3.749.840.683,00
Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	8.957.927.200	6.335.678.223,00	8.528.551.960,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.330.321.000	3.231.209.534,00	3.512.977.230,00
Jumlah	791.586.132.987,00	617.979.936.208,00	648.471.012.472,92

7.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	584.259.070.997,00	535.019.096.570,40	459.074.769.793,29

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing sebesar Rp535.019.096.570,40 dan Rp459.074.769.793,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34: Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 per akun

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Bahan Pakai Habis	70.065.565.737,00	62.219.226.509,00	58.895.586.497,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	5.889.000,00
Belanja Jasa Kantor	109.682.867.696,00	101.406.396.337,00	108.080.325.855,00
Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	27.302.493.633,00	26.687.390.536,00	26.803.139.696,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	22.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.595.555.395,00	1.362.522.670,00	917.972.840,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	710.047.500,00	511.430.000,00	520.318.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	35.113.500,00	35.113.500,00	3.200.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	15.491.213.400,00	13.651.092.730,00	11.533.623.100,00
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.625.000.000,00	1.070.658.622,00	2.041.621.354,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	174.000.000,00	64.500.000,00	29.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis seta Pendidikan Pelatihan	8.395.855.485,00	6.973.847.029,00	3.908.414.032,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.750.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	1.532.429.850,00	830.365.000,00	598.560.485,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.147.002.538,00	5.456.078.090,00	3.864.692.912,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.686.428.910,00	12.643.079.254,00	7.011.811.163,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.056.914.134,00	1.872.389.606,00	1.869.259.380,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.071.053.896,00	164.883.854.652,00	106.047.198.974,00
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	20.243.017.500,00	14.434.666.500,00	4.429.736.500,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	60.596.440.000,00	56.124.835.340,00	46.318.045.135,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.816.821.823,00	64.784.150.195,40	76.173.874.869,89
Jumlah	584.259.070.997,00	535.019.096.570,40	459.074.769.793,29

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 berdasarkan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 35: Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 per SKPD

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan	83.318.096.707	75.728.414.675,00	71.031.252.325,00
Dinas Kesehatan	163.368.253.682	152.967.973.895,00	165.039.124.882,29
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	21.886.189.688	20.414.215.614,00	16.503.798.165,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.218.324.821	4.074.280.464,00	2.271.806.877,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.613.615.600	4.482.509.109,00	3.842.123.382,00
Dinas Sosial	3.235.933.150	2.965.045.156,00	2.468.870.539,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.009.350.775	3.240.934.074,00	2.407.853.751,00
Dinas Tenaga Kerja	1.993.879.270	1.959.084.799,00	1.509.089.761,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	8.009.708.690	6.389.205.211,00	3.804.961.317,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.718.915.606	3.559.733.253,00	8.045.667.792,00
Dinas Lingkungan Hidup	15.093.547.700	14.200.511.837,00	11.752.880.928,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.789.517.280	5.590.809.652,00	4.828.103.613,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.905.155.260	4.856.118.287,00	5.953.165.833,00
Dinas Perhubungan	10.339.245.600	8.927.541.923,00	5.526.389.123,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.424.627.852	6.311.504.613,00	5.147.109.547,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.323.631.627	2.132.361.069,00	1.937.527.303,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	13.556.913.984	6.738.105.468,00	2.382.906.738,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.060.405.700	2.017.856.401,00	1.394.784.437,00
Dinas Perikanan	3.157.788.675	3.095.806.084,00	2.579.364.663,00
Dinas Pertanian	20.810.775.656	19.480.400.188,00	10.119.515.341,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	9.876.268.469	9.467.836.449,00	9.513.894.623,00
Dinas Transmigrasi	2.023.138.056	1.978.813.227,00	1.347.552.212,00
Sekretariat Daerah	23.646.623.127	22.717.690.078,00	20.513.227.065,00
Sekretariat DPRD	105.984.251.200	100.085.828.203,00	56.318.027.624,00
Kecamatan Kapuas Barat	1.694.011.825	1.675.824.643,00	1.487.384.624,00
Kecamatan Pulau Petak	965.118.162	922.857.901,00	856.004.833,00
Kecamatan Kapuas Kuala	938.492.160	859.869.404,00	775.664.256,00
Kecamatan Kapuas Hulu	1.364.591.300	1.182.039.543,00	781.601.268,00
Kecamatan Selat	6.984.109.432	6.880.350.187,00	5.687.029.288,00
Kecamatan Kapuas Hilir	3.064.996.776	2.862.898.390,00	2.332.345.273,00
Kecamatan Kapuas Timur	833.299.400	790.578.326,00	719.470.240,00
Kecamatan Basarang	1.043.450.500	956.302.534,00	691.008.384,00
Kecamatan Mantangai	1.612.960.820	1.607.903.549,00	960.708.574,00
Kecamatan Kapuas Tengah	1.202.331.100	1.003.032.680,00	675.999.076,00
Kecamatan Kapuas Murung	2.375.341.440	2.246.194.100,00	1.913.128.867,00
Kecamatan Timpah	1.066.219.220	934.751.734,00	887.635.642,00
Kecamatan Bataguh	1.619.216.650	1.507.619.203,00	1.330.264.663,00
Kecamatan Tamban Catur	744.305.495	734.217.675,00	716.521.268,00
Kecamatan Dadahup	886.498.670	606.090.191,00	523.423.188,00
Kecamatan Pasak Talawang	1.002.814.300	845.236.579,00	777.887.720,00
Kecamatan Mandau Talawang	1.024.984.000	997.519.737,00	847.340.835,00
Sekretariat Dewan Pembina KORPRI	0,00	0,00	84.500.000,00
Inspektorat	6.633.489.740	4.870.339.683,00	3.817.744.901,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.053.412.342	4.193.939.043,00	5.419.728.382,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.562.787.900	5.522.682.500,00	4.917.384.926,00
Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	4.813.896.090	4.525.635.186,00	3.215.168.686,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.408.585.500	5.910.634.053,00	3.417.827.058,00
Jumlah	584.259.070.997,00	535.019.096.570,40	459.074.769.793,29

7.5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	6.150.000.000	5.508.154.324,00	5.614.736.389,90

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing masing sebesar

Rp5.508.154.324,00 dan Rp5.614.736.389,90 merupakan pembayaran Pinjaman Daerah Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36: Rincian Belanja Bunga Kabupaten Kapuas

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Tagihan Kewajiban Jatuh Tempo (Bunga) untuk Pinjaman No. SLA1227/DSMI/2009 Jatuh Tempo pada Tanggal 01 Mei 2023 Kab. Kapuas TA. 2023	989.677.930,00
2	Pembayaran Tagihan Kewajiban Jatuh Tempo (Bunga) untuk Pinjaman No. SLA1227/DSMI/2009 Jatuh Tempo pada Tanggal 01 November 2023 Kab. Kapuas TA. 2023	960.266.917,00
3	Pembayaran Kewajiban Bunga Pemkab Kapuas Periode Bulan Januari 2023 Kepada PT.SMI (PERSERO) Sesuai Dengan Lampiran Surat No: S3/SMI/DPPPP/DPPU-1/0123 Tanggal 10 Januari 2023 Kab Kapuas TA 2023	1.055.303.898,00
4	Pembayaran Kewajiban Bunga Pemkab Kapuas Periode Bulan April 2023 Kepada PT.SMI (PERSERO) Sesuai Dengan Lampiran Surat No: S286/SMI/DPPPP/DPPU-1/0423 Tanggal 6 April 2023 Kab Kapuas TA 2023	929.126.262,00
5	Pembayaran Kewajiban Bunga Pemkab Kapuas Periode Bulan Juli 2023 Kepada PT.SMI (PERSERO) Sesuai Dengan Lampiran Surat No: S496/SMI/DPPPP/DPPU-1/0723 Tanggal 10 Juli 2023 Kab Kapuas TA 2023	835.066.573,00
6	Pembayaran Kewajiban Bunga Pemkab Kapuas Periode Bulan Oktober 2023 Kepada PT.SMI (PERSERO) Sesuai Dengan Lampiran Surat No: S679/SMI/DPPPP/DPPU-1/1023 Tanggal 9 Oktober 2023 Kab Kapuas TA 2023	738.712.744,00
Jumlah		5.508.154.324,00

7.5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	122.622.803.186,00	104.789.760.160,00	79.937.515.037,88

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp104.789.760.160,00 dan Rp79.937.515.037,88 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37: Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 per akun

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	11.511.348.000,00	10.949.975.500,00	7.563.983.639,00
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	170.000.000,00	100.000.000,00	253.038.200,0
Belanja Hibah Kepada BUMD	5.628.211.350,00	2.380.820.000,00	626.830.000,00
Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	103.995.013.836,00	90.040.734.660,00	70.175.433.198,88
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	53.045.667.936,00	46.197.777.319,00	0,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000,00	27.543.000,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.318.230.000,00	1.318.230.000,00	1.318.230.000,00
Jumlah	122.622.803.186,00	104.789.760.160,00	79.937.515.037,88

Realisasi belanja hibah TA 2023 dan 2022 berdasarkan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 38: Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 berdasarkan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan	3.275.095.900	3.194.049.900,00	2.773.609.370,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	299.983.520,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.944.081.436	29.144.484.200,00	36.821.927.939,00
Badan Kesatuan Bangsa dan	26.437.055.000	19.963.613.000,00	2.283.230.000,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Politik			
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	875.000.000	875.000.000,00	0,0
Dinas Sosial	1.718.500.000	1.707.500.000,00	604.100.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	964.250.000,00
Dinas komunikasi dan Informatika	250.000.000	250.000.000	205.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.000.000	20.000.000,00	0,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	9.296.663.650	7.815.805.583,00	3.588.651.100,00
Dinas Perikanan	6.575.000.000	6.559.448.240,00	6.414.758.950,00
Dinas Pertanian	11.389.017.200	10.523.882.384,00	12.904.020.982,88
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	11.918.000,00
Dinas Transmigrasi	125.000.000	124.833.853,00	54.000.000,00
Sekretariat Daerah	20.965.000.000	20.097.043.000,00	10.649.669.900,00
Inspektorat	75.000.000	75.000.000,00	0,00
Kecamatan Kapuas Barat	0,00	0,00	344.945.276,00
Kecamatan Selat	0,00	0,00	60.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.677.390.000	4.439.100.000,00	1.957.450.000,00
Jumlah	122.622.803.186,00	104.789.760.160,00	79.937.515.037,88

Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran**.

7.5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	256.288.275,00	256.288.275,00	1.564.511.200,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp256.288.275,00 dan Rp1.564.511.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39: Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 Per Akun

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan kepada Individu	182.800.000,00	182.800.000,00	87.750.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan Kepada Individu	73.488.275,00	73.488.275,00	8.477.800,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	0,00	0,00	1.468.283.400,00
Jumlah	256.288.275,00	256.288.275,00	1.564.511.200,00

Adapun Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 Per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 40: Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 per SKPD

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Sosial	133.488.275	133.488.275,00	8.477.800,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	1.468.283.400,00
Sekretariat Daerah	122.800.000	122.800.000,00	87.750.000,00
Jumlah	256.288.275,00	256.288.275,00	1.564.511.200,00

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	610.505.117.487,00	497.590.153.221,00	503.575.728.816,25

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

Tabel 41: Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah	10.250.000.000,00	8.607.417.219,00	1.874.805.530,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.394.175.908,00	79.563.896.620,00	70.405.239.790,00
Belanja Modal Gedung dan	106.225.682.172,00	96.495.440.040,00	88.084.233.307,58

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Bangunan			
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	410.999.937.907,00	312.313.886.972,00	341.442.656.648,67
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	535.321.500,00	509.512.370,00	1.768.793.540,00
Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Jumlah	610.505.117.487,00	497.590.153.221,00	503.575.728.816,25

7.5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	10.250.000.000,00	8.607.417.219,00	1.874.805.530,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.607.417.219,00 dan Rp1.874.805.530,00. Rincian Belanja Modal per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 42: Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Lingkungan Hidup	8.000.000.000	7.920.005.283,00	1.831.105.530,00
Dinas Pertanian	150.000.000	150.000.000,00	18.700.000,00
Kecamatan Kapuas barat	0,00	0,00	25.000.000,00
Sekretariat Daerah	1.300.000.000	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	800.000.000	537.411.936,00	0,00
Jumlah	10.250.000.000,00	8.607.417.219,00	1.874.805.530,00

7.5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Peralatan dan Mesin	82.394.175.908,00	79.563.896.620,00	70.405.239.790,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp79.563.896.620,00 dan Rp70.405.239.790,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 43: Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan	3.663.107.486	3.514.635.000,00	16.054.937.341,00
Dinas Kesehatan	34.242.114.033	32.898.824.841	23.385.107.918,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.362.932.521	5.118.741.000,00	162.497.562,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	798.644.649	796.430.400,00	121.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.989.686.400	3.968.140.000,00	8.820.820.500,00
Dinas Sosial	135.084.325	108.811.325,00	252.440.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.157.665	203.185.000,00	141.527.000,00
Dinas Tenaga Kerja	56.119.450	50.030.450,00	31.136.800,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	131.185.310	129.263.400,00	1.823.948.038,00
Dinas Ketahanan Pangan	26.180.000	23.402.000,00	50.061.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	716.582.600	702.763.660,00	1.850.461.750,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	788.442.720	685.105.000,00	373.908.630,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	112.123.700	111.643.700,00	42.664.000,00
Dinas Perhubungan	982.434.400	973.360.000,00	346.560.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	442.371.380	431.012.600,00	259.358.800,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	320.163.373	315.756.150,00	110.893.440,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	324.783.887	210.217.210,00	60.457.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	41.878.300	41.878.300,00	10.389.600,00
Dinas Perikanan	251.541.325	250.690.000,00	400.553.000,00
Dinas Pertanian	4.079.169.781	4.022.066.950,00	961.761.936,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	90.363.100	90.275.000,00	122.240.000,00
Dinas Transmigrasi	351.861.303	319.120.992,00	84.000.000,00
Sekretariat Daerah	8.567.778.010	8.374.905.262,00	1.188.485.400,00
Sekretariat DPRD	5.664.161.115	5.586.278.750,00	3.102.015.845,00
Kecamatan Kapuas Barat	77.998.175	77.998.175,00	555.289.000,00
Kecamatan Pulau Petak	8.641.660	8.500.000,00	325.328.000,00
Kecamatan Kapuas Kuala	121.092.840	118.399.100,00	315.085.000,00
Kecamatan Kapuas Hulu	19.168.700	19.000.000,00	0,00
Kecamatan Selat	796.689.770	762.293.970,00	770.324.729,00
Kecamatan Kapuas Hilir	468.417.000	456.623.200,00	763.237.900,00
Kecamatan Kapuas Timur	25.010.600	25.010.000,00	319.677.000,00
Kecamatan Basarang	46.059.110	46.059.000,00	328.005.000,00
Kecamatan Mantangai	260.799.180	260.799.180,00	507.564.000,00
Kecamatan Kapuas Tengah	11.428.900	11.423.000,00	690.719.000,00
Kecamatan Kapuas Murung	239.418.560	239.418.560,00	544.853.000,00

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Kecamatan Timpah	27.540.780	27.531.566,00	283.000.000,00
Kecamatan Bataguh	37.403.350	37.376.500,00	283.000.000,00
Kecamatan Tamban Catur	59.454.505	59.454.360,00	311.188.000,00
Kecamatan Dadahup	57.182.360	43.240.000,00	320.339.320,00
Kecamatan Pasak Talawang	100.945.700	99.935.700,00	492.551.000,00
Kecamatan Mandau Talawang	77.876.000	76.639.999,00	30.243.000,00
Inspektorat	416.510.260	416.350.000,00	266.236.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	144.086.715	143.383.020,00	765.224.675,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.342.082.000	6.169.234.800,00	1.147.506.856,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	886.103.910	817.550.000,00	713.500.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	731.399.000	721.139.500,00	914.642.000,00
Jumlah	82.394.175.908,00	79.563.896.620,00	70.405.239.790,00

7.5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	106.225.682.172,00	96.495.440.040,00	88.084.233.307,58

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp88.084.233.307,58. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 44: Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan	13.180.899.867,00	12.994.592.500,00	34.148.172.156,11
Dinas Kesehatan	49.804.623.622,00	42.409.811.468,00	17.747.758.464,47
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	28.002.500.000,00	27.359.723.061,00	27.474.195.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	798.663.800,00	797.410.000,00	299.373.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	99.850.000,00
Dinas Sosial	1.330.634.250,00	1.330.634.250,00	1.024.910.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	194.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	94.950.000,00
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	60.000.000,00	59.630.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.500.000.000,00	2.200.000.039,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	528.112.000,00
Dinas Perhubungan	2.600.000.000,00	1.877.536.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	185.100.000,00	183.500.000,00	82.627.000,00
Dinas Perikanan	310.000.000,00	309.250.000,00	1.646.619.900,00
Dinas Pertanian	3.495.477.977,00	3.303.018.000,00	1.325.437.687,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	84.000.000,00	83.500.000,00	199.850.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	737.006.000,00	734.499.999,00	0,00
Sekretariat Daerah	350.000.000,00	345.000.000,00	1.297.041.200,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	388.241.300,00
Kecamatan Kapuas Barat	478.671.656,00	478.670.000,00	140.000.000,00
Kecamatan Kapuas Kuala	0,00	0,00	199.885.500,00
Kecamatan Selat	150.000.000,00	150.000.000,00	185.000.000,00
Kecamatan Kapuas Hilir	200.000.000,00	199.995.223,00	369.961.100,00
Kecamatan Kapuas Tengah	0,00	0,00	150.000.000,00
Kecamatan Bataguh	13.065.000,00	13.065.000,00	0,00
Kecamatan Kapuas Murung	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.170.000.000,00	994.697.000,00	488.250.000,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	600.000.000,00	496.000.000,00	0,00
Badan Kepegawaian dan	70.040.000,00	69.907.500,00	0,00

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Jumlah	106.225.682.172,00	96.495.440.040,00	88.084.233.307,58

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 tersebut tidak termasuk

- kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 10 paket pekerjaan di empat SKPD senilai Rp445.927.362,90;
- potensi kelebihan pembayaran pada satu paket pekerjaan di Dinas Kesehatan senilai Rp540.016.700,38.

7.5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	410.999.937.907,00	312.313.886.972,00	341.442.656.648,67

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp312.313.886.972,00 dan Rp341.442.656.648,67. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 45: Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) per Perangkat Daerah

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Kesehatan	3.172.690.000	3.163.700.000,00	19.542.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	403.568.961.907	304.928.574.277,00	319.790.868.862,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	1.650.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	669.200.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	175.000.000	174.567.400,00	6.600.000,00
Dinas Perhubungan	3.280.890.000	3.273.826.200,00	505.734.000,00
Dinas Perikanan	200.000.000	199.000.000,00	6.650.000,00
Dinas Pertanian	16.050.000	13.229.455,00	9.619.600,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.000.000	49.643.640,00	0,00
Kecamatan kapuas Barat	0,00	0,00	100.000.000,00
Kecamatan Kapuas Hilir	311.346.000	311.346.000,00	808.484.186,67
Kecamatan Kapuas Murung	50.000.000	50.000.000,00	0,00
Kecamatan Bataguh	150.000.000	150.000.000,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	1.650.000,00
Jumlah	410.999.937.907,00	312.313.886.972,00	341.442.656.648,67

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 tersebut tidak termasuk

- kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada sepuluh paket pekerjaan di Dinas PUPRPPK senilai Rp5.439.826.075,14; dan
- potensi kelebihan pembayaran pada lima paket pekerjaan di Dinas PUPRPPK senilai Rp1.628.102.125,28.

7.5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	535.321.500,00	509.512.370,00	1.768.793.540,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp509.512.370,00 dan Rp1.768.793.540,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 46: Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan	158.512.000,00	147.940.000,00	453.040.500,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	676.944.490,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	26.000.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	35.520.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	40.514.800,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	150.000.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	6.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	135.000.000,00	135.000.000,00	195.288.750,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	115.004.500,00	113.833.470,00	179.985.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.505.000,00	8.491.500,00	0,00
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
Dinas Pertanian	24.800.000,00	24.786.300,00	0,00
Sekretariat Daerah	45.500.000,00	31.461.100,00	0,00
Kecamatan Kapuas Hilir	0,00	0,00	5.000.000,00
Kecamatan Kapuas Kuala	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Jumlah	535.321.500,00	509.512.370,00	1.768.793.540,00

7.5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp0,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 pada BPKAD untuk Pembayaran Atas Pembuatan Aplikasi RKBMD Pemerintah Kab. Kapuas.

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	45.476.804.500,00	6.170.159.923,00	3.457.327.575,00

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial yang belum dialokasikan dalam kegiatan Pemerintah Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.170.159.923,00 dan Rp3.583.963.275,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 47: Rekapitulasi Peruntukkan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi (Rp)
Bantuan Musibah	394.979.000,00
Dana Mengantisipasi Bencana Banjir	3.535.595.731,00
Dana Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan	1.567.891.446,00
Pembayaran sanksi denda penerangan jalan umum oleh Pemkab. Kapuas kepada PT.PLN (Persero)	671.693.746,00
Jumlah	6.170.159.923,00

Keterangan : rincian Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada lampiran X

7.5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	361.052.145.800,00	365.982.992.970,00	283.412.735.544,00

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp365.982.992.970,00 dan Rp 283.412.735.544,00.

Tabel 48: Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 per akun

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Bagi Hasil	9.020.483.300,00	9.020.483.300,00	4.213.038.800,00
Belanja Bantuan Keuangan	352.031.662.500	356.962.509.670,00	279.199.696.744,00
Jumlah	361.052.145.800,00	365.982.992.970,00	283.412.735.544,00

7.5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.020.483.300,00 dan Rp4.213.038.800,00.

7.5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp352.031.662.500 dan Rp356.962.509.670,00 yang direalisasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi senilai Rp245.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ke Desa senilai Rp356.717.509.670,00.

7.5.1.3 Pembiayaan**7.5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	208.256.073.447,00	388.444.301.902,16	224.366.417.319,37

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp388.444.301.902,16 dan Rp224.366.417.319,37

7.5.1.3.1.1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	208.256.073.447,00	388.444.301.902,16	169.571.792.319,37

Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Lalu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp388.444.301.902,16 dan Rp169.571.792.319,37.

7.5.1.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	0,00	0,00	54.794.625.000,00

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp54.794.625.000,00

7.5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	35.400.000.000,00	35.186.961.309,13	21.951.545.170,26

Pengeluaran Pembiayaan merupakan realisasi pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp35.186.961.309,13 dan Rp21.951.545.170,26

7.5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp6.200.000.000,00 diperuntukkan kepada PT. Bank Pembangunan Kalteng senilai Rp6.200.000.000,00 dengan SP2D nomor 8042/SP2D-BO/PPKD-BPKAD/2022.

7.5.1.3.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	29.200.000.000,00	28.986.961.309,13	15.751.545.170,26

Realisasi Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.986.961.309,13 dan Rp15.751.545.170,26.

7.5.1.3.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	172.856.073.447,00	353.257.340.593,03,00	202.414.872.149,11

Pembiayaan Netto merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp353.257.340.593,03,00 dan Rp202.414.872.149,11.

7.5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	2.437.221.000,00	841.616.302.582,53	388.444.301.902,16

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp841.616.302.582,53 dan Rp388.444.301.902,16

Tabel 49: Rincian Sisa lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun)
Kas di Kas Daerah	481.713.203.741,00	386.244.286.618,04	95.468.917.122,96
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
Kas di BLUD	4.650.900.056,53	2.057.253.485,12	2.593.646.571,41
Kas di Bendahara Dana Bos	10.804.060,00	224.350.400,00	(213.546.340,00)
Hutang PFK	(81.588.601,00)	(81.588.601,00)	0,00
Koreksi Kas Lainnya (BOK Puskesmas)	4.322.983.326,00	0,00	4.322.983.326,00
Deposito Jangka Pendek KAS DAERAH	350.000.000.000,00	0,00	350.000.000.000,00
Jumlah	841.616.302.582,53	388.444.301.902,16	453.172.000.680,37

Rincian LPSAL tersebut dapat dirinci lebih lanjut peruntukannya sebagai berikut.

1	~ SILPA DAK S/D TAHUN 2015		
	Silpa DAK s/d TAHUN 2015	Rp6.655.694.832,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Tahun 2015		
	SILPA DAK S/D TAHUN 2015 di Kas Daerah		Rp6.655.694.832,00
2	~ DAK FISIK TAHUN 2016		
	Silpa DAK TAHUN 2016	Rp632.023.008,59	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Fisik Tahun 2016		
	DAK FISIK TAHUN 2016 di Kas Daerah		Rp632.023.008,59
3	~ DAK FISIK TAHUN 2017		
	Silpa DAK TAHUN 2017	Rp31.581.500,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Fisik Tahun 2017		
	DAK FISIK TAHUN 2017 di Kas Daerah		Rp31.581.500,00
4	~ DAK FISIK TAHUN 2018		
	Silpa DAK TAHUN 2018	Rp1.364.096.306,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Fisik Tahun 2018		
	DAK FISIK TAHUN 2018 di Kas Daerah		Rp1.364.096.306,00
5	~ DAK FISIK REGULER BIDANG PERTANIAN TAHUN 2019		
	Silpa DAK TAHUN 2019	Rp100.502.050,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Bid. Pertanian Tahun 2019		
	DAK FISIK TAHUN 2019 di Kas Daerah		Rp100.502.050,00
6	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PASAR TAHUN 2019		
	Silpa DAK TAHUN 2019	Rp10.800.000,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK FISIK PENUGASAN Tahun 2019		
	DAK FISIK TAHUN 2019 di Kas Daerah		Rp10.800.000,00
7	~ DAK FISIK - AFFIRMASI BIDANG AIR MINUM TAHUN 2019		
	Silpa DAK TAHUN 2019	Rp10.753.020,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK FISIK- AFFIRMASI Tahun 2019		
	DAK FISIK TAHUN 2019 di Kas Daerah		Rp10.753.020,00

8	~ BANTUAN KEUANGAN UNTUK KEL. SELAT DALAM pada TAHUN 2019		
	Saldo Akhir Tahun 2019	Rp40.383.500,00	
	Realisasi Belanja TA 2019		
	Sisa Bantuan Keuangan pada Tahun 2019 di Kas Daerah		Rp40.383.500,00
9	~ DAK FISIK REGULER JALAN TAHUN 2021		
	Silpa DAK JALAN TAHUN 2021	Rp16.585.000,00	
	Realisasi Penyerapan silpa DAK Fisik Jalan Tahun 2021		
	Silpa Dak Fisik Reguler Jalan Tahun 2021 di Kas Daerah		Rp16.585.000,00
10	~ DAK FISIK AFFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI pada TAHUN 2020		
	Silpa DAK TAHUN 2020	Rp43.746.222,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Affirmasi Bid. Transport Tahun 2020		
	DAK FISIK TAHUN 2020 di Kas Daerah		Rp43.746.222,00
11	~ DAK FISIK PERUMAHAN & PERMUKIMAN pada TAHUN 2020		
	Silpa DAK TAHUN 2020	Rp3.882.000,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Fisik Tahun 2020		
	DAK FISIK TAHUN 2020 di Kas Daerah		Rp3.882.000,00
12	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG KELAUTAN & PERIKANAN TAHUN 2021		
	Silpa DAK TAHUN 2021	Rp401.000,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Bid. Kelautan & Perikanan Tahun 2021		
	Dak Fisik Penugasan Tahun 2021 di Kas Daerah		Rp401.000,00
13	~ DAK FISIK PENUGASAN BID. KELAUTAN & PERIKANAN CADANGAN pada TAHUN 2020		
	Silpa DAK TAHUN 2020	Rp9.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Bid. Kelautan & Perikanan Cadangan Thn 2020		
	DAK FISIK TAHUN 2020 di Kas Daerah		Rp9.000,00
14	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN PADA TAHUN 2021		
	Silpa DAK TAHUN 2021	Rp35.665.000,00	
	Realisasi Penyerapan silpa DAK Bid. Pertanian Tahun 2021		
	DAK FISIK TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp35.665.000,00
15	~ DAK FISIK AFFIRMASI BIDANG PENDIDIKAN PADA TAHUN 2020		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2020	Rp205.415.000,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Affirmasi Bid. Pendidikan Tahun 2020		
	DAK FISIK TAHUN 2020 di Kas Daerah		Rp205.415.000,00
16	~ DAK FISIK REGULER BID. PENDIDIKAN PADA TAHUN 2020		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2020	Rp426.734.650,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Bid. Pendidikan & Perpustakaan Tahun 2020		
	DAK FISIK TAHUN 2020 di Kas Daerah		Rp 426.734.650,00
17	~ DAK FISIK REG BID. PENDIDIKAN SUBBIDANG SMP PADA TAHUN 2021		
	Silpa DAK TAHUN 2021	Rp32.000,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK Bid. Pendidikan Subbidang SMP Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp32.000,00
18	~ DAK FISIK REG BID. PENDIDIKAN SUBBIDANG PAUD PADA TAHUN 2021		
	Silpa DAK TAHUN 2021	Rp5.370.000,00	
	Realisasi Penyerapan silpa DAK Bid. Pendidikan Subbidang PAUD Tahun 2021		
	DAK FISIK TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp5.370.000,00
19	~ DAK FISIK REG BID. PENDIDIKAN SUBBIDANG SD PADA TAHUN 2021		
	Silpa DAK TAHUN 2021	Rp4.156.000,00	

	Realisasi Penyerapan silpa DAK Bid.Pendidikan Subbidang SD Tahun 2021		
	DAK FISIK TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp4.156.000,00
20	~ DAK FISIK REGULER BIDANG AIR MINUM PADA TAHUN 2020		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2020	Rp128.290.780,00	
	Realisasi Penyerapan silpa DAK FISIK REGULER Tahun 2019 s/d 2020		
	DAK FISIK TAHUN 2019 s/d 2020 di Kas Daerah		Rp128.290.780,00
21	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG AIR MINUM PADA TAHUN 2021		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2020	Rp26.559.750,00	
	Silpa DAK TAHUN 2021	Rp1.208.143,00	
	Realisasi Penyerapan silpa DAK FISIK PENUGASAN Tahun 2019 s/d 2021		
	DAK FISIK TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp27.767.893,00
22	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG IRIGASI PADA TAHUN 2021		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2020	Rp0,85	
	Silpa DAK TAHUN 2021	Rp47.705.000,00	
	Realisasi Penyerapan silpa DAK FISIK PENUGASAN Tahun 2019 s/d 2021		
	DAK FISIK TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp47.705.000,85
23	~ DAK FISIK - AFFIRMASI BIDANG SANITASI PADA TAHUN 2020		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2020	Rp19.802.000,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK FISIK - AFFIRMASI Tahun 2019 s/d 2020		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp19.802.000,00
24	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG SANITASI PADA TAHUN 2021		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2020	Rp57.180.500,00	
	Silpa DAK TAHUN 2021	Rp610.100,00	
	Realisasi Penyerapan silpa DAK FISIK PENUGASAN Tahun 2019 s/d 2021		
	DAK FISIK TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp57.790.600,00
25	~ DAK FISIK REGULER BIDANG SANITASI PADA TAHUN 2020		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2020	Rp23.356.000,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK FISIK REGULER Tahun 2019 s/d 2020		
	DAK FISIK TAHUN 2020 di Kas Daerah		Rp23.356.000,00
26	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG KESEHATAN PADA TAHUN 2020		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2020	Rp571.320.178,00	
	Realisasi Penyerapan DAK FISIK PENUGASAN Tahun 2019 s/d 2020		
	DAK FISIK TAHUN 2020 di Kas Daerah		Rp571.320.178,00
27	~ DAK FISIK REGULER BIDANG KESEHATAN PADA TAHUN 2020		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2020	Rp196.152.972,00	
	Realisasi Penyerapan Silpa DAK FISIK REGULER Tahun 2019 s/d 2020		
	DAK FISIK TAHUN 2020 di Kas Daerah		Rp196.152.972,00
28	~ DAK FISIK REGULER BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG KB PADA TAHUN 2021		
	Silpa DAK TAHUN 2021	Rp7.500.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK REG Bid Kesehatan Subbidang KB Tahun 2021		
	DAK FISIK TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp7.500.000,00
29	~ DAK FISIK REGULER BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG PELAYANAN PELAYANAN KEFARMASIAN DAN BAHAN HABIS PAKAIAHUN 2021		
	Silpa DAK TAHUN 2021	Rp172.232.076,00	
	Realisasi Penyerapan DAK REG Bid Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan habis pakai Tahun 2021		

	DAK FISIK TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp172.232.076,00
30	~ DAK FISIK AFFIRMASI BIDANG KESEHATAN PADA TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2019 s/d 2022	Rp3.546.931.434,00	
	Realisasi Penyerapan DAK FISIK AFFIRMASI Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp3.546.931.434,00
31	~ DAK FISIK REGULER JALAN TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp2.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Fisik Jalan Tahun 2022		
	DAK FISIK REGULER TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp2.000,00
32	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG KELAUTAN & PERIKANAN TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp125.500,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Bid. Kelautan&Perikanan Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp125.500,00
33	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN PADA TAHUN 2023		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp442.278.001,00	
	TRANSFER DAK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN 2023	Rp17.167.537.005,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Bid. Pertanian Tahun 2023	Rp16.950.340.000,00	
	DAK FISIK TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp659.475.006,00
34	~ DAK FISIK REG BID. PENDIDIKAN SUBBIDANG SMP PADA TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp86.937.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Bid. Pendidikan Subbidang SMP Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp86.937.000,00
35	~ DAK FISIK REG BID. PENDIDIKAN SUBBIDANG PAUD PADA TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp 341.500,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Bid. Pendidikan Subbidang PAUD Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp341.500,00
36	~ DAK FISIK REG BID. PENDIDIKAN SUBBIDANG SD PADA TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp1.193.500,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Bid. Pendidikan Subbidang SD Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp1.193.500,00
37	~ DAK FISIK REGULER SANITASI TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp6.173.600,00	
	Realisasi Penyerapan DAK SANITASI Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp6.173.600,00
38	~ DAK FISIK REGULER AIR MINUM TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp1.204.800,00	
	Realisasi Penyerapan DAK AIR MINUM Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp1.204.800,00
39	~ DAK FISIK REGULER PENGUATAN SISTEM KESEHATAN TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp1.600.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Fisik KESEHATAN Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp1.600.000,00
40	~ DAK FISIK REGULER PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp8.929.999,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Fisik KESEHATAN Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp8.929.999,00
41	~ DAK FISIK REGULER KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp129.324.930,00	
	Realisasi Penyerapan DAK KB Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp129.324.930,00

42	~ DAK FISIK PENUGASAN IRIGASI TAHUN 2023		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp3.719.000,00	
	TRANSFER DAK IRIGASI TAHUN 2023	Rp5.305.001.200,00	
	Realisasi Penyerapan DAK IRIGASI Tahun 2023	Rp5.253.541.200,00	
	DAK FISIK TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp55.179.000,00
43	~ DAK FISIK PENUGASAN JALAN TAHUN 2023		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp20.000,00	
	TRANSFER DAK JALAN TAHUN 2023	Rp18.115.134.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK JALAN Tahun 2023	Rp15.789.042.250,00	
	DAK FISIK TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp2.326.111.750,00
44	~ DAK FISIK REGULER PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp243.554.400,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Fisik KESEHATAN Tahun 2022		
	DAK FISIK TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp243.554.400,00
45	~ DAK FISIK PENUGASAN bidang jalan -tematik TAHUN 2023		
	TRANSFER DAK JALAN TAHUN 2023	Rp29.262.994.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK JALAN Tahun 2023	Rp29.156.454.000,00	
	DAK FISIK TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp106.540.000,00
46	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PENDIDIKAN-subbidang SMP TAHUN 2023		
	TRANSFER DAK bid.pendidikan-subbidang smp TAHUN 2023	Rp1.674.204.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Fisik pendidikan Tahun 2023	Rp1.674.154.500,00	
	DAK FISIK TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp49.500,00
47	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PENDIDIKAN-subbidang SD TAHUN 2023		
	TRANSFER DAK bid.pendidikan-subbidang SD TAHUN 2023	Rp1.625.241.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Fisik pendidikan Tahun 2023	Rp1.625.000.000,00	
	DAK FISIK TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp241.000,00
48	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PENDIDIKAN-subbidang PAUD TAHUN 2023		
	TRANSFER DAK bid.pendidikan-subbidang paud TAHUN 2023	Rp448.522.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Fisik pendidikan Tahun 2023	Rp443.705.900,00	
	DAK FISIK TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp4.816.100,00
49	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG KESEHATAN-subbidang Pengendalian Penyakit TAHUN 2023		
	TRANSFER DAK KESEHATAN TAHUN 2023	Rp121.366.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Fisik KESEHATAN Tahun 2023	Rp121.366.000,00	
	DAK FISIK KESEHATAN TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp -
50	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG KESEHATAN-subbidang Penguatan Sistem Kesehatan TAHUN 2023		
	TRANSFER DAK KESEHATAN TAHUN 2023	Rp73.597.455.085,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Fisik KESEHATAN Tahun 2023	Rp67.046.595.085,00	
	DAK FISIK KESEHATAN TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp6.550.860.000,00
51	~ DAK FISIK PENUGASAN BIDANG KESEHATAN-subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, bayi dan intervensi stunting TAHUN 2023		
	TRANSFER DAK KESEHATAN TAHUN 2023	Rp8.605.393.535,00	
	Realisasi Penyerapan DAK Fisik KESEHATAN Tahun 2023	Rp8.601.393.535,00	
	DAK FISIK KESEHATAN TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp4.000.000,00
52	~ DAK NON FISIK BOK DINAS PADA TAHUN 2022		
	Silpa DAK NON FISIK BOK TAHUN 2022	Rp4.692.472.150,00	
	Transfer DAK NON FISIK BOK TAHUN 2023	Rp5.398.051.850,00	
	Realisasi Penyerapan DAK NON FISIK BOK (SP2D) Tahun 2023	Rp7.603.136.210,00	

	DAK NON FISIK BOK TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp2.487.387.790,00
53	~ DAK NON FISIK BOKB PADA Tahun 2023		
	Silpa DAK NON FISIK BOKB TAHUN 2022	Rp625.256.730,00	
	Transfer DAK NON FISIK BOKB TAHUN 2023	Rp4.557.753.270,00	
	Realisasi Penyerapan DAK NON FISIK BOKB pada 2023	Rp3.819.169.864,00	
	DAK NON FISIK BOKB TAHUN 2023 di Kas Daerah		Rp1.363.840.136,00
54	~ DAK NF DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN PADA TAHUN 2022		
	Silpa DAK TAHUN 2022	Rp5.200.000,00	
	Realisasi Penyerapan DAK NF KEPARIWISATAAN Tahun 2022		
	DAK NON FISIK PELAY. KEPARIWISATAAN TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp5.200.000,00
55	~ DAK NON FISIK ADMINDUK PADA TAHUN 2022		
	SILPA s/d Tahun 2022	Rp245.535,00	
	Realisasi Belanja TA 2022		
	Sisa DAK NON FISIK ADMINDUK pada Tahun 2022 di Kas Daerah		Rp245.535,00
56	~DBH PAJAK ROKOK PROVINSI KALTENG PADA TAHUN 2023		
	SILPA s.d Tahun 2022	Rp22.767.265.176,21	
	Transfer Dari Kas Daerah Provinsi TA 2023 (Rp.18.364.209.789,00 x 50%)	Rp9.182.104.894,50	
	Realisasi Penyerapan TA. 2023	Rp22.232.366.770,00	
	Sisa DBH PAJAK ROKOK TA. 2022 di Kas Daerah		Rp9.717.003.300,71
57	~ DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA TAHUN 2022		
	SILPA s.d Tahun 2022	Rp6.014.817,00	
	Realisasi Penyerapan DBH CHT TA. 2022		
	SILPA DBH CHT S.D TAHUN 2022 di Kas Daerah		Rp6.014.817,00
58	~DAK TAMBAHAN P3K2		
	Silpa Tahun 2016	Rp137.108.597,00	
	Realisasi Penyerapan TA. 2021		
	SisaDAK TAMBAHAN P3K2 TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp137.108.597,00
59	~DAK TAMBAHAN USULAN DAERAH		
	Silpa Tahun 2016	Rp19.257.443,00	
	Realisasi Penyerapan TA. 2021		
	Sisa DAK TAMBAHAN USULAN DAERAH TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp19.257.443,00
60	~DAK PROVINSI KALTENG		
	SILPA DAK Provinsi Tahun 2016	Rp51.777.905,00	
	Realisasi Penyerapan TA. 2021		
	SisaDAKPROV. KALTENG TAHUN 2021 di Kas Daerah		Rp51.777.905,00
61	~ Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi		
	Silpa DP2D2 s.d Tahun 2019	Rp183.175.334,00	
	Realisasi Penyerapan DP2D2 TA 2021		
	Sisa DP2D2 pada Tahun 2021 di Kas Daerah		Rp183.175.334,00
62	~ DPDF dan PPD		
	Silpa DPDF dan PPD Tahun 2016	Rp2.740.622,00	
	Realisasi Penyerapan TA. 2021		
	Sisa DPDF dan PPD pada Tahun 2021 di Kas Daerah		Rp2.740.622,00
63	~ DPIP		
	Silpa DPIP Tahun 2010 pada akhir Tahun 2016	Rp1.103.720,00	
	Realisasi Penyerapan TA. 2021		
	Sisa DPIP pada Tahun 2021 di Kas Daerah		Rp1.103.720,00
64	~ DPPIP		
	Silpa DPPIP Tahun 2010 pada akhir Tahun 2017	Rp8.354.300,00	
	Realisasi Penyerapan pada TA. 2021		
	Sisa DPPIP pada Tahun 2021 di Kas Daerah		Rp8.354.300,00
65	~ DPID		
	Silpa DPID Tahun 2016	Rp273.690.001,00	
	Realisasi Penyerapan TA. 2021		

	Sisa DPID pada Tahun 2021 di Kas Daerah		Rp273.690.001,00
66	~ TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD (Sertifikasi)		
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp817.298.425,00	
	Realisasi Belanja TA 2023	p101.348.051.775,00	
	Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp4.428.402.200,00
67	~ TUNJANGAN TAMSIL GURU (Non Sertifikasi)		
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp601.578.400,00	
	Realisasi Belanja TA 2023 (SP2D)	Rp470.171.600,00	
	Sisa Dana Tunjangan TAMSIL Guru pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp48.750.000,00
68	~ TUNJANGAN KHUSUS GURU		
	Transfer dari Kas Negara TA. 2017	Rp1.075.086.400,00	
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp20.247.188.000,00	
	Realisasi Belanja TA 2023 (SP2D)	Rp21.216.319.500,00	
	Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp105.954.900,00
69	~ DANA INSENTIF DAERAH		
	SILPA s.d TA. 2022	Rp7.740.183.359,38	
	Sisa DANA INSENTIF DAERAH pada Tahun 2022 di Kas Daerah		Rp7.740.183.359,38
70	~ DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN		
	Silpa TAHUN 2020	Rp401.255.500,00	
	Sisa DID TAMBAHAN pada Tahun 2020 di Kas Daerah		Rp401.255.500,00
71	~ DANA BAGI HASIL -DANA REBOISASI		
	Saldo Tahun 2008 S.D Tahun 2022	Rp68.869.158.517,00	
	Realisasi Belanja DBH DR TA 2023	Rp8.329.282.629,00	
	Sisa Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp60.539.875.888,00
72	~ DAK -DANA REBOISASI		
	Saldo Akhir Tahun 2022	Rp19.300.652.448,50	
	Pendapatan Jasa Giro TA. 2023	Rp291.450.130,00	
	Sisa DAK- Dana Reboisasi pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp19.592.102.578,50
73	~ DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM		
	Silpa TAHUN 2020	Rp363.650.521,00	
	Sisa Dana Bagi Hasil - SDA pada Tahun 2020 di Kas Daerah		Rp363.650.521,00
74	~ BANTUAN KEUANGAN DARI GRAHA		
	Saldo Akhir Tahun 2020	Rp26.933.127,00	
	Sisa Bantuan Keuangan dari Graha pada Tahun 2020 di Kas Daerah		Rp26.933.127,00
75	~ DAU TAMBAHAN		
	Saldo Akhir Tahun 2020	Rp1.578.250.006,00	
	Sisa DAU Tambahan pada Tahun 2020 di Kas Daerah		Rp1.578.250.006,00
76	~ DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL		
	Silpa TAHUN 2022	Rp145.031.500,00	
	Realisasi Penyerapan Dana Fasilitas Penanaman Modal Thn 2023	Rp272.368.500,00	
	SISA DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL 2023 di Kas Daerah		Rp81.245.500,00
77	~ DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	SILPA s.d TA. 2022	Rp16.502.000,00	
	TRANSFER DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2023	Rp959.723.000,00	
	Realisasi Penyerapan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Thn 2023	Rp881.138.000,00	
78	SISA DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2023 di Kas Daerah		Rp95.087.000,00
	~ Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2023		
	Silpa TAHUN 2022	Rp299.853.000,00	
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp375.000.000,00	

	Realisasi Belanja TA. 2023	Rp237.931.090,00	
	Sisa pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp137.068.910,00
79	~ DAU DANA KELURAHAN		
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp3.400.000.000,00	
	Realisasi Belanja TA. 2023	Rp3.387.570.167,00	
	Sisa pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp12.429.833,00
80	~ DAU BIDANG KESEHATAN		
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp73.097.909.000,00	
	Realisasi Belanja TA. 2023	Rp69.689.099.972,00	
	Sisa pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp3.408.809.028,00
81	~ DAU BIDANG PENDIDIKAN		
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp83.451.729.000,00	
	Realisasi Belanja TA. 2023	Rp64.841.406.958,00	
	Sisa pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp18.610.322.042,00
82	~ DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM		
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp74.667.396.000,00	
	Realisasi Belanja TA. 2023	Rp69.588.619.441,00	
	Sisa pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp5.078.776.559,00
83	~ DAU PPPK		
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp45.362.532.000,00	
	Realisasi Belanja TA. 2023	Rp4.535.446.714,00	
	Sisa pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp40.827.085.286,00
84	~ DBH SAWIT		
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp17.774.473.000,00	
	Realisasi Belanja TA. 2023	Rp -	
	Sisa pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp17.774.473.000,00
84	~ Dana TDF		
	Transfer dari Kas Negara TA. 2023	Rp37.063.150.168,00	
	Realisasi Belanja TA. 2023	Rp-	
	Sisa Dana TDF pada Tahun 2023 di Kas Daerah		Rp37.063.150.168,00
	<i>a. Jumlah ptk (taperum) yang belum disetorkan ke kas Negara</i>	Rp11.394.000,00	
			Rp11.394.000,00
	<i>b. Jumlah ptk lainnya</i>	Rp70.194.601,00	
			Rp70.194.601,00
	2. TOTAL DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		Rp256.825.632.115,03
	3. SALDO KAS DAERAH YANG TIDAK DIBATASI PENGGUNAANNYA (1-2)		Rp574.887.571.625,10
	TOTAL SALDO KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2023 (2+3)		Rp831.713.203.740,13

7.5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SILPA/SIKPA, Koreksi dan SAL Akhir. Berikut adalah rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Tabel 50: Rincian LPSAL Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun)
Saldo Anggaran Lebih Awal	388.444.301.902,16	169.567.800.342,89	218.876.501.559,27
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	388.444.301.902,16	169.571.792.319,37	218.872.509.582,79
Sub Total	0,00	(3.991.976,48)	3.991.976,48
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	841.616.302.582,53	388.444.301.902,16	453.172.000.680,37

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun)
(SILPA/SIKPA)			
Sub Total	841.616.302.582,53	388.440.309.925,68	453.175.992.656,85
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	3.991.976,48	(3.991.976,48)
Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	841.616.302.582,53	388.444.301.902,16	453.172.000.680,37

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih (awal) merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-TA sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (awal) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp388.444.301.902,16 dan Rp169.567.800.342,89

7.5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp388.444.301.902,16 dan Rp169.571.792.319,37.

7.5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp388.444.301.902,16 dan Rp169.567.800.342,89.

7.5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih (akhir) merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (akhir) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp841.616.302.582,53 dan Rp388.444.301.902,16.

7.5.3 Penjelasan Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta dan aset sebesar Rp5.875.150.806.346,94 Kewajiban sebesar Rp204.169.859.524,70 dan Ekuitas sebesar Rp5.670.980.946.822,24.

7.5.3.1 Aset

Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset	5.875.150.806.346,94	4.401.247.080.772,58

Total saldo Aset Pemerintah Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.875.150.806.346,94 dan Rp4.401.247.080.772,58 dengan rincian sebagai berikut.

Aset	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/ Turun	
			%	(Rp)
Aset Lancar	915.871.888.935,08	449.050.331.050,65	103,96	466.821.557.884,43
Investasi Jangka Panjang	64.587.986.866,00	78.088.435.785,00	(17,29)	(13.500.448.919,00)
Aset Tetap	4.089.336.398.416,42	3.812.826.255.138,91	7,25	276.510.143.277,51
Aset Lainnya	805.354.532.129,44	61.282.058.798,02	1.214,18	744.072.473.331,42
Jumlah	5.875.150.806.346,94	4.401.247.080.772,58	33,49	1.473.903.725.574,36

Tabel 51: Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

7.5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	915.871.888.935,08	449.050.331.050,65

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan asset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp915.871.888.935,08 naik dari saldo sebelumnya sebesar Rp466.821.557.884,43 sebagai berikut.

Tabel 52: Rincian Aset Lancar 31 Desember 2023 dan 2022

Aset Lancar	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)	
			%	Rp
Kas di Kas Daerah	481.713.203.741,00	386.244.286.618,04	24,72	95.468.917.122,96
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	4.650.900.056,53	2.057.253.485,12	126,07	2.593.646.571,41
Kas Dana BOS	10.804.060,00	224.350.400,00	(95,18)	(213.546.340,00)
Kas Lainnya (Kas BOK)	4.322.983.326,00	0,00	100,00	4.322.983.326,00
Investasi Jangka Pendek (Deposito)	350.000.000.000,00	0,00	100,00	350.000.000.000,00
Piutang Pajak	28.111.231.711,00	25.627.385.783,00	9,69	2.483.845.928,00
Piutang Retribusi Daerah	4.447.301.023,00	3.747.771.119,00	18,67	699.529.904,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang lain-lain PAD yang Sah	23.312.137.097,42	22.708.435.283,96	2,66	603.701.813,46
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	17.242.309.336,00	26.535.232.313,73	(35,02)	(9.292.922.977,73)
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(34.713.829.576,43)	(33.339.784.529,57)	4,12	(1.374.045.046,86)
Beban Dibayar Dimuka	197.752.318,00	199.052.114,99	(0,65)	(1.299.796,99)
Persediaan	36.577.095.842,56	15.046.348.462,38	143,10	21.530.747.380,18
Jumlah	915.871.888.935,08	449.050.331.050,65	103,96	466.821.557.884,43

7.5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

7.5.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	481.713.203.741,00	386.244.286.618,04

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang tersimpan pada rekening PT. Bank Kalteng Cabang Kapuas, rekening PT.Bank Mandiri Cabang Kapuas, PT. BRI Cabang Kapuas dan PT.BNI Kuala Kapuas. Saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang tersimpan pada rekening PT. Bank Kalteng Cabang Kapuas, rekening PT.Bank Mandiri Cabang Kapuas, PT. BRI Cabang Kapuas dan PT.BNI Kuala Kapuas per 31 Desember 2023.

Tabel 53: Rincian Kas di Kas Daerah

No Rekening	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	(Naik / Turun)	
				%	(Rp)

No Rekening	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	(Naik / Turun)	
				%	(Rp)
031.000215791.8 KUD	Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Mandiri Kuala Kapuas	186.600.500.590,67	30.004.866.744,80	521,90	156.595.633.845,87
0180-01-000102-30-5 (KASDA)	Rek.BI Cabang Kuala Kapuas	0,00	132.356.889,30	(100,00)	-132.356.889,30
0600-010-1001630	Rek. Kas pada PT. Bank (KAPembangunan Kalteng Cabang Kapuas (RKUD)	173.765.065.690,66	317.145.425.784,44	(45,21)	-143.380.360.093,78
0600-010-1000018	Rek. Kas pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kapuas (DAK-DR)	19.588.249.190,50	19.296.799.060,50	1,51	291.450.130,00
031.00021579.18	Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Mandiri Kuala Kapuas	0,00	0,00	0,00	0,00
0180-01-000102-30-5	Rek. Kas Daerah pada BRI Cabang Kuala Kapuas	3.673.283.552,30	0,00	100,00	3.673.283.552,30
71564588	Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kuala Kapuas (RKUD)	98.082.251.328,00	19.660.984.751,00	398,87	78.421.266.577,00
157897771	Rekening pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kuala Kapuas (DAK DR)	3.853.388,00	3.853.388,00	0,00	0,00
Kurang lebih debit bank BPK Kalteng			0,00		
Jumlah Kas di Kas Daerah setelah Rekon Tidak termasuk Deposito Pemerintah Daerah		481.713.203.741,00	386.244.286.618,04	24,72	95.468.917.122,96

Terdapat selisih sebesar Rp0,87 antar Kas di Kas Daerah di Rekening Koran Bank dan Perhitungan Kas melalui perhitungan Aplikasi SIPD karena pada Aplikasi SIPD untuk untuk pembayaran yang bersifat koma, akan dibuat pembulatan terbaca naik jadi Rp. 1,00 sehingga antar SP2d tercetak dan yang ada di aplikasi berbeda untuk pengeluaran. (Selisih terdapat pada SP2D pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk pembayaan Pokok utang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.lewat pengeluaran pembiayaan Daerah. (Selisih terdapat pada SP2D pembayaran pokok utang SNI jangka pajang yang terdapat pada pengeluaran pembiayaan Daerah SP2D nomor 14.03/04.0/4/LS/S.02.5.02.5.02.29.0000/M/04/2023 tanggal 17 April 2023 di PPKD.

7.5.3.1.1.1.2. Kas di Kas Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.1.3. Kas di Kas Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dengan

tabel dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 54: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	4.650.900.056,53	2.057.253.485,12

Kas di BLUD merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroadmodjo dan Kas di BLUD Puskesmas. Jumlah Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.650.900.056,53 dan Rp2.057.253.485,12 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55: Rincian Kas di BLUD

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kas di BLUD RSUD	3.513.392.193,93	686.514.709,12	411,77	2.826.877.484,81
Kas di BLUD Puskesmas	1.137.507.862,60	1.370.738.776,000	(17,01)	(233.230.913,40)
Jumlah	4.650.900.056,53	2.057.253.485,12	126,07	2.593.646.571,41

Mutasi Saldo Kas di BLUD RSUD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 56: Mutasi Kas di BLUD RSUD

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	686.514.709,12
Pendapatan BLUD RSUD	54.960.699.077,81
Belanja BLUD RSUD	52.133.821.593,00
Saldo Akhir	3.513.392.193,93

Rincian Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 57: Rincian Kas di BLUD

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (turun)	
			%	(Rp)
BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroadmodjo pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 600-201-000022402-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek. Penerimaan BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroadmodjo pada BRI 18001000573302	1.099.491.903,28	107.685.214,00	921,02	991.806.689,28
Rek. Pengeluaran BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroadmodjo pada Bank Mandiri 159-00-0139824-6	2.399.965.092,65	577.335.297,12	315,70	1.822.629.795,53
Rek. Pengeluaran BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroadmodjo pada Bank Mandiri 159-00-0328504-5	12.441.000,00	0,00	100,00	12.441.000,00
Rek. Pengeluaran BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroadmodjo pada bank BRI 18001001415303	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00	0,00	0,00
BNI Cab Kapuas 206706524	1.494.198,00	1.494.198,00	0,00	0,00
Jumlah Saldo	3.513.392.193,93	686.514.709,12	411,77	2.826.877.484,81

BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroadmodjo yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian sebagai tercantum pada Laporan Hasil Audit dengan Nomor 000020/3.0260/AU.1/11/0785/2/II/2024 tanggal, 19 Februari 2024.

Rincian saldo per 31 Desember tahun 2023 yang berada di rekening Koran dan di Bendahara BLUD di setiap Puskesmas sebagai berikut.

Tabel 58: Rincian Saldo Kas di BLUD Tunai dan Bank

NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL	REALISASI 2023		SALDO AKHIR	Keterangan Saldo	
		Pendapatan	Belanja		Bank	Tunai Bendahara
Selat	180.056.827,00	878.256.909,00	1.055.246.498,00	3.067.238,00	3.067.238,00	0,00

NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL	REALISASI 2023		SALDO AKHIR	Keterangan Saldo	
		Pendapatan	Belanja		Bank	Tunai Bendahara
Melati	234.500.225,00	1.380.936.550,00	1.375.656.728,00	239.780.047,00	239.778.543,00	1.504,00
Panamas	12.970.235,00	279.991.976,00	282.104.091,00	10.858.120,00	10.858.066,00	54,00
Pulau Telo	79.213.657,00	425.254.605,00	452.872.688,00	51.595.574,00	51.595.574,00	-
Terusan Tengah	2,00	447.697.031,00	447.697.033,00	0,00	0,00	0,00
Tamban Catur	41.684.897,00	417.339.262,00	405.257.977,20	53.766.181,80	52.919.790,00	846.391,80
Pulau Kupang	35.289.772,00	914.100.002,00	941.059.214,80	8.330.559,20	8.327.658,00	2.901,20
Barimba	0,00	603.018.361,00	598.201.371,00	4.816.990,00	4.816.990,00	0,00
Tamban Baru	2.147.295,00	311.973.726,00	290.614.736,00	23.506.285,00	23.506.285,00	0,00
Anjir Serapat	61.860.061,00	1.896.114.507,00	1.856.865.007,00	101.109.561,00	91.958.611,00	9.150.950,00
Sei Tatas	134.840.195,00	858.222.351,00	885.531.327,00	107.531.219,00	107.061.851,00	469.368,00
Palingkau	173.186.955,00	1.032.676.203,00	1.008.171.707,00	197.691.451,00	197.396.402,00	295.049,00
Dadahup	100.229.748,00	389.473.184,00	366.497.479,00	123.205.453,00	115.809.809,00	7.395.644,00
Telekung Punei	911,00	89.131.627,00	84.642.731,40	4.489.806,60	4.452.939,00	36.867,60
Palangkau	5.836.435,00	156.977.828,00	162.519.220,00	295.043,00	295.043,00	0,00
Basarang	10.985.058,00	611.505.434,00	617.923.558,00	4.566.934,00	4.126.837,00	440.097,00
Mandomai	23.373.590,00	666.464.371,00	646.561.871,00	43.276.090,00	19.902.500,00	23.373.590,00
Lamunti	149.584,00	179.017.029,00	177.978.241,00	1.188.372,00	1.180.900,00	7.472,00
Timpah	32.892.216,00	461.354.745,00	494.246.961,00	0,00	0,00	0,00
Mantangai	13.372.513,00	486.213.908,00	491.091.565,00	8.494.856,00	7.435.368,00	1.059.488,00
Danau Rawah	11.642.982,00	177.927.378,00	180.460.176,00	9.110.184,00	4.160.184,00	4.950.000,00
Lupak	53.016.739,00	663.623.558,00	627.011.888,00	89.628.409,00	89.627.411,00	998,00
Pujon	116.788.640,00	622.466.731,00	728.067.851,60	11.187.519,40	11.187.518,80	0,60
Sei Hanyo	7.352.295,00	365.593.384,00	359.712.533,00	13.233.146,00	13.233.146,00	0,00
Jangkang	15.232.738,00	320.408.336,00	326.484.916,40	9.156.157,60	9.156.157,60	0,00
Sei Pinang	24.115.206,00	211.031.460,00	217.524.000,00	17.622.666,00	17.622.666,00	0,00
JUMLAH	1.370.738.776,00	14.846.770.456,00	15.080.001.369,40	1.137.507.862,60	1.089.477.487,40	48.030.375,20

7.5.3.1.1.1.5. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BOS	10.804.060,00	224.350.400,00

Posisi Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp 10.804.060,00 sedangkan saldo kas di bendahara BOS tahun 2022 sebesar Rp224.350.400,00 dengan rincian.

Tabel 59: Rincian Posisi Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023(Rp)	2022Rp)	Naik/ (Turun)	
			%	(Rp)
Kas di Bendahara Dana Bos	10.804.060,00	224.350.400,00	(95,18)	(213.546.340,00)

Tabel 60: Rincian Dana BOS per Jenis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2023

NO	Uraian	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja BOS Barang dan Jasa	Saldo
1	BOS Reguler SMPN	809.900,00	12.899.749.500,00	12.898.084.990,00	2.474.410,00
2	BOS Kinerja SMPN	0,00	1.030.000.000,00	1.024.119.900,00	5.880.100,00
3	BOS Reguler SDN	163.540.500,00	29.099.785.500,00	29.260.876.450,00	2.449.550,00
4	BOS Kinerja/ Afiriasi SDN	60.000.000,00	1.830.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00
5	BOP PAUD TK	0,00	8.986.554.000,00	8.986.554.000,00	0,00
6	BOP Kesetaraan TK	0,00	2.065.200.000,00	2.065.200.000,00	0,00
	Jumlah	224.350.400,00	55.911.289.000,00	56.124.835.340,00	10.804.060,00

Rincian Kas di Bendahara Dana Bos per Jenis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 61: Rincian Kas di Bendahara Dana BOS per Jenis Bantuan Operasional Sekolah

Saldo Kas Per 31 Desember 2023	Saldo Bank (Rp)	Saldo Kas Tunai (Rp)
Rekening Sekolah BOS Reguler	20.000,00	2.454.410,00
Rekening Sekolah BOS Kinerja	0,00	5.880.100,00
Rekening Sekolah BOS Reguler	0,00	2.449.550,00
Rekening Sekolah BOS Kinerja/ Afiriasi	0,00	0,00

Saldo Kas Per 31 Desember 2023	Saldo Bank (Rp)	Saldo Kas Tunai (Rp)
Rekening Sekolah BOP PAUD	0,00	0,00
Rekening Sekolah BOP Kesetaraan	0,00	0,00
Jumlah	20.000,00	10.784.060,00

7.5.3.1.1.1.6. Kas di Kas Lainnya

Kas di Bendahara	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dana Lainnya	4.322.983.326,00	0,00

Kas lainnya pada tahun anggaran 2023 merupakan Kas dari dana alokasi khusus Kesehatan yang disalurkan langsung ke Puskesmas Penerima dengan perbandingan untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp4.322.983.326,00 dan Rp0,00

Tabel 62: Rincian Dana Lainnya (BOK Kesehatan) Tahun 2023

NAMA PUSKESMAS	REALISASI 2023		SALDO AKHIR (Bank)
	Pendapatan	Belanja	
Lupak	1.262.056.000,00	802.626.891,00	459.429.109,00
Tamban Baru	884.933.000,00	791.852.955,00	93.080.045,00
Tamban Catur	862.049.000,00	728.337.251,00	133.711.749,00
Anjir Serapat	919.090.000,00	825.509.886,00	93.580.114,00
Selat	679.256.000,00	675.762.003,00	3.493.997,00
Melati	759.503.000,00	689.056.831,00	70.446.169,00
Pulau Telo	725.078.000,00	620.095.217,00	104.982.783,00
Panamas	839.163.000,00	777.691.511,00	61.471.489,00
Terusan Tengah	916.140.000,00	728.797.078,00	187.342.922,00
Pulau Kupang	930.802.000,00	899.470.908,00	31.331.092,00
Basarang	1.124.987.000,00	790.035.722,00	334.951.278,00
Barimba	952.881.000,00	907.100.000,00	45.781.000,00
Sei Tatas	1.022.469.000,00	732.520.044,00	289.948.956,00
Palingkau	1.137.462.000,00	864.369.085,00	273.092.915,00
Palangkau	1.126.019.000,00	899.490.789,00	226.528.211,00
Dadahup	965.329.000,00	607.518.972,00	357.810.028,00
Talekung Punei	953.788.000,00	776.945.252,00	176.842.748,00
Mandomai	1.183.430.000,00	1.166.970.527,00	16.459.473,00
Mantangai	1.090.461.000,00	722.832.470,00	367.628.530,00
Danau Rawah	1.181.761.000,00	986.504.924,00	195.256.076,00
Lamunti	1.228.465.000,00	1.056.467.053,00	171.997.947,00
Timpah	1.105.342.000,00	1.097.594.801,00	7.747.199,00
Pujon	1.284.066.000,00	1.182.876.869,00	101.189.131,00
Jangkang	1.158.643.000,00	1.034.182.475,00	124.460.525,00
Sei Hanyo	1.233.706.000,00	1.024.151.733,00	209.554.267,00
Sei Pinang	1.134.568.000,00	949.702.427,00	184.865.573,00
JUMLAH	26.661.447.000,00	22.338.463.674,00	4.322.983.326,00

7.5.3.1.1.2. Investasi Jangka Pendek**7.5.3.1.1.2.1. Investasi dalam Deposito**

Investasi dalam	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Deposito	350.000.000.000,00	0,00

Merupakan deposito Pemerintah Daerah dengan jangka waktu kurang/12 bulan yang terdapat pada PT. Bank Pembangunan Kalteng (DEPOSITO) 6000302002004 sebesar Rp150.000.000.000,00 dan PT. Bank Pembangunan Kalteng (DEPOSITO) 6000302001713 sebesar Rp200.000.000.000,00.

7.5.3.1.1.3. Piutang Daerah**Tabel 63: Rincian Piutang Tahun 2023**

Saldo Kas Per 31 Desember 2022	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	28.111.231.711,00	25.627.385.783,00
Piutang Retribusi	4.447.301.023,00	3.747.771.119,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.146.404.463,00	22.708.435.283,96
Piutang Transfer	17.242.309.336,00	26.535.232.313,73
Jumlah	67.947.246.533,00	78.618.824.499,69

7.5.3.1.1.3.1. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	28.111.231.711,00	25.627.385.783,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah Rp 28.111.231.711,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 25.627.385.783,00. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 terdiri dari.

Tabel 64: Saldo Piutang Pajak

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Piutang Pajak Restoran	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	83.509.875,00	83.752.875,00	(0,29)	(243.000,00)
Piutang Pajak Air Tanah		4.105.798,00	(100,00)	(4.105.798,00)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	27.825.548.439,00	25.344.052.884,00	9,79	2.481.495.555,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	194.316.007,00	194.364.226,00	(0,02)	(48.219,00)
Piutang Pajak Parkir	6.747.390,00	0,00	100	6.747.390,00
JUMLAH	28.111.231.711,00	25.627.385.783,00	9,69	2.483.845.928,00

i. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran merupakan piutang pajak Restoran melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Kapuas merupakan pajak restoran yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.110.000,00 dengan perbandingan Tahun 2022 sebesar Rp1.110.000,00 dengan rincian piutang pajak restoran sebagai berikut.

Rincian Piutang Pajak Restoran disajikan per Tahun sebagai berikut.

Tabel 65: Rincian Piutang Pajak Restoran disajikan per Tahun

No	Uraian	2023 (Rp)	Koreksi tambah & (kurang)	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
1	2014	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
	JUMLAH	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00

ii. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame merupakan piutang pajak Reklame melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Kapuas merupakan pajak reklame yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp83.509.875,00 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp83.752.875,00 dengan rincian piutang pajak reklame disajikan pada tabel berikut.

Rincian Piutang Pajak Reklame disajikan per Tahun sebagai berikut.

Tabel 66: Rincian Piutang Pajak Reklame

No	Uraian	2023 (Rp)	Koreksi tambah kurang	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
1	2021	17.721.000,00	0,00	0,00	194.400,00	17.526.600,00
2	2020	25.733.700	0,00	0,00	0,00	25.733.700,00
3	2019	14.318.775	0,00	0,00	0,00	14.318.775,00

No	Uraian	2023 (Rp)	Koreksi tambah kurang	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
4	2018	24.046.200	0,00	0,00	48.600,00	23.997.600,00
5	2017	243.000	0,00	0,00	0,00	243.000,00
6	2016	97.200	0,00	0,00	0,00	97.200,00
7	2014	1.593.000	0,00	0,00	0,00	1.593.000,00
JUMLAH		83.752.875,00	0,00	0,00	243.000,00	83.509.875,00

iii. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Kapuas merupakan pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 194.316.007,00 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp194.364.226,00.

Rincian Piutang Pajak Parkir per Tahun sebagai berikut.

Tabel 67: Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan

No	Uraian	2023(Rp)	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
1	2023	194.364.226,00	194.316.007,00	194.364.226,00	194.316.007,00
JUMLAH		194.364.226,00	194.316.007,00	194.364.226,00	194.316.007,00

iv. Piutang Pajak Parkir

Piutang pajak parkir merupakan pajak parkir melalui melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.747.390,00 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp0,00 Rincian Piutang Pajak Parkir per Tahun sebagai berikut.

Tabel 68: Rincian Piutang Pajak Parkir

No	2023 (Rp)	2023 (Rp)	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
1	2023	6.747.390,00	0,00	0,00	6.747.390,00
JUMLAH		6.747.390,00	0,00	0,00	6.747.390,00

v. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang pajak air tanah merupakan pajak air tanah melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 0,00 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp4.105.798,00 dengan perhitungan piutang pajak air tanah disajikan dengan perhitungan pada tabel berikut. Rincian Piutang Pajak Air Tanah disajikan per Tahun sebagai berikut.

Tabel 69: Rincian Piutang Pajak Air Tanah

No	Uraian	2023 (Rp)	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
1	2022	4.105.798,00	0,00	4.105.798,00	0,00
JUMLAH		4.105.798,00	0,00	4.105.798,00	0,00

vi. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Kapuas merupakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp27.825.548.439,00 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp25.344.052.884,00 disajikan pada tabel berikut. Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan disajikan per Tahun sebagai berikut.

Tabel 70: Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

No	Uraian	2023 (Rp)	Penambahan	Pembayaran	Saldo Akhir
1	s.d 2017	12.738.743.766	399.072	202.043.077	12.537.099.761
2	2018	1.840.601.403	7.810.632	40.614.340	1.807.797.695
3	2019	2.271.599.477,00	35.508.393	79.905.128	2.227.202.742
4	2020	2.095.272.700,00	39.246.217	108.385.086	2.026.133.831
5	2021	3.024.676.968,00	104.344.457	214.371.670	2.914.649.755
6	2022	3.373.158.570,00	120.625.902	413.673.669	3.080.110.803
7	2023	0,00	3.232.553.852	0,00	3.232.553.852
JUMLAH		25.344.052.884	3.540.488.525	1.058.992.970	27.825.548.439

Info tambahan :

Dari rincian Piutang PBB-P2 diketahui terdapat piutang yang telah melebihi jangka waktu penagihan pajak yaitu lima tahun. Piutang PBB-P2 yang berpotensi kadaluarsa tersebut senilai Rp21.218.543.586,00 dengan rekapitulasi per tahun sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Piutang PBB P2 Tahun Berpotensi Kadaluarsa

No	Tahun penetapan	Nilai Piutang Pokok (Rp)	Nilai Piutang Denda (Rp)	Keterangan
1	1994 – 2013	7.445.730.816,00	3.570.785.277,00	Pengelolaan di KPP
2	2014	1.196.548.393,00	574.296.656,00	Pengelolaan di Pemda
3	2015	1.193.705.828,00	571.602.650,00	Pengelolaan di Pemda
4	2016	1.311.363.898,00	628.119.565,00	Pengelolaan di Pemda
5	2017	1.389.211.694,00	664.958.606,00	Pengelolaan di Pemda
6	2018	1.807.797.695,00	864.422.508,00	Pengelolaan di Pemda
Jumlah		14.344.358.324,00	6.874.185.262,00	
Total		21.218.543.586,00		

7.5.3.1.1.3.2. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	4.447.301.023,00	3.747.771.119,00

Piutang retribusi daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.447.301.023,00 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp3.747.771.119,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71: Piutang Retribusi Daerah

No	Rincian Piutang Retribusi	SKPD	2023(Rp)	2022(Rp)
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	168.440.000,00	88.500.000,00
3	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	82.801.090,00	63.829.090,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah .	Sekretariat Daerah	555.330.433,00	491.532.529,00
5	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Daerah	107.257.700,00	107.257.700,00
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah .	Dinas Pertanian	117.750.000,00	117.750.000,00
7	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah .	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.	1.796.271.800,00	1.250.401.800,00
8	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	Dinas Kesehatan	1.619.450.000,00	1.628.500.000,00
Jumlah			4.447.301.023,00	3.747.771.119,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp555.330.433,00 berasal dari sewa rumah dinas golongan II dan III pada Sekretariat Daerah yang merupakan akumulasi dari piutang sejak tahun 2012 hingga 2023. Berdasarkan pemeriksaan atas

dokumen pendukung penetapan piutang, piutang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sebagai dasar penetapan piutang *by name by address*. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan dan Bendahara Penerima Sekretariat Daerah, pihaknya belum menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan semenjak menjabat dan hanya meneruskan pengelolaan dari pejabat sebelumnya.

7.5.3.1.1.3.3. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	18.146.404.463,00	22.708.435.283,96

Piutang Lain- Lain PAD Yang Sah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp23.312.137.097,42 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp22.708.435.283,96 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72: Piutang Lain- lain PAD yang Sah

No	Nama Rekening	SKPD	2023(Rp)	2022(Rp)
1	PiutangHasil Pengelolaan Dana Bergulir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	836.270.000,00	836.270.000,00
2	Piutang Jasa Giro atas Bagi Hasil - Landrent	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/PPKD	0,00	8.988.941,08
3	Piutang Tuntutan Ganti Rugi Ke Daerah	Dinas PUPRPKP	0	5.165.732.634,42
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	11.159.334.781,00	9.978.328.608,46
5	Piutang Pendapatan BLUD	BLUD RSUD	6.002.499.682,00	6.570.815.100,00
6	Piutang pemakaian kekayaan daerah yang dipisahkan	Dinas Pertanian	148.300.000,00	148.300.000,00
	JUMLAH		23.312.137.097,42	22.708.435.283,96

Informasi tambahan :

Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan senilai Rp1.641.350.000,00 merupakan piutang yang berasal dari tunggakan SPP mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) yang pengelolaannya berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas sejak tahun 2016 s.d 2019. Berdasarkan keterangan dari Ur. Keuangan Akper Pemkab Kapuas diketahui bahwa Akper Pemkab Kapuas sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2020 dikarenakan jenjang pendidikan yang sudah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Kemendikbudristek yaitu harus jenjang pendidikan S1. Pencatatan terkait piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan s.d tahun 2020 dilakukan oleh Ur. Keuangan Akper Pemkab Kapuas. Namun sejak Akper tidak beroperasi di tahun 2020, Ur. Keuangan Akper Pemkab Kapuas sudah tidak melakukan pencatatan dan penatausahaan lagi terkait piutang tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas diketahui Dinas Kesehatan tidak memiliki data/dokumen wajib retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak bisa melakukan upaya penagihan. Tidak ada penyerahan data/dokumen terkait piutang retribusi pelayanan pendidikan dari pihak Akper ke Dinas Kesehatan sehingga tidak ada yang melakukan pencatatan dan penatausahaan piutang. Saldo piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang tersaji dalam Laporan Keuangan didapatkan dari rekapitulasi data penerimaan piutang yang dilakukan oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Kapuas. Namun data tersebut hanya memuat informasi nama dan semester mahasiswa yang bersangkutan. Terdapat pembayaran piutang pada tahun 2021, namun bidang akuntansi dan pelaporan BKAD tidak dapat mengidentifikasi nama wajib retribusi yang melakukan pembayaran dikarenakan dalam STS tidak menyebutkan nama mahasiswa yang melakukan pembayaran.

7.5.3.1.1.3.4. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	17.242.309.336,00	26.957.451.317,82

Piutang Transfer Antar Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp17.242.309.336,00 dan tahun 2022 sebesar Rp26.957.451.317,82 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi piutang Transfer Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 73: Mutasi Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal		
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	26.957.451.317,82	26.957.451.317,62
2	Penambahan		
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	17.242.309.336,00	26.535.232.313,73
3	Pembayaran		
	Transfer bagi hasil pajak daerah	26.957.451.317,82	26.957.451.317,62
	Saldo Akhir	17.242.309.336,00	26.957.451.317,82

7.5.3.1.1.3.5. Penyisihan Piutang

Penyisihan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang	(29.548.096.942,01)	(33.339.784.529,57)

Penyisihan piutang dibentuk untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan berdasarkan persentase kualitas piutang terhadap nilai piutang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas. Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp34.713.829.576,43) dan (Rp33.339.784.529,57) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74: Penyisihan Piutang

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(17.406.025.576,55)	(15.477.806.359,43)	(1.928.219.217,11)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.528.599.521,30)	(3.027.313.847,30)	(501.285.674,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(8.613.471.844,16)	(14.834.664.322,84)	6.221.192.478,68
	Jumlah	(29.548.096.942,01)	(33.339.784.529,57)	3.791.687.587,57

Tabel 75: Rincian Penyisihan Piutang

No	Nama Akun	Uraian	2023(Rp)	2022(Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	(1.110.000,00)	(111.000,00)
2	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	(54.744.637,50)	(25.339.657,50)
3	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	(971.580,04)	(971.821,13)
4	Penyisihan Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	(20.528,99)
5	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	(33.736,95)	0,00
6	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	(17.349.165.622,06)	(15.451.363.351,81)

No	Nama Akun	Uraian	2023(Rp)	2022(Rp)
	Perkotaan (PBBP2)			
7	Penyisihan Piutang Retribusi	Dinas Perhubungan	(88.899.700,00)	(442.500,00)
8	Penyisihan Piutang Retribusi	Dinas Komunikasi dan Informatika	(11.048.722,50)	(11.130.407,50)
9	Penyisihan Piutang Retribusi	Sekretariat Daerah	(457.476.998,80)	(382.297.289,80)
10	Penyisihan Piutang Retribusi	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi	(107.257.700,00)	(263.848.060,00)
11	Penyisihan Piutang Retribusi	Dinas Pertanian	(117.750.000,00)	(117.750.000,00)
12	Penyisihan Piutang Retribusi	Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM	(1.126.716.400,00)	(623.345.590,00)
13	Penyisihan Piutang Retribusi	Dinas Kesehatan	(1.619.450.000,00)	(1.628.500.000,00)
14	Penyisihan Piutang Lain_lain PAD yang Sah	Dinas Pertanian	(148.300.000,00)	(148.300.000,00)
15	Penyisihan Piutang Lain_lain PAD yang Sah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	(836.270.000,00)	(836.270.000,00)
16	Penyisihan Piutang Lain_lain PAD yang Sah	Dinas PUPRPKP	0,00	(5.165.732.634,42)
17	Penyisihan Piutang Lain_lain PAD yang Sah	BLUD RSUD RSUD Dr. H. SOEMARNO	(30.012.498,41)	(32.854.075,50)
18	Penyisihan Piutang Lain_lain PAD yang Sah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi	(7.598.889.345,75)	(8.651.507.612,92)
	JUMLAH		(29.548.096.942,01)	(33.339.784.529,57)

Tabel 76: Penyisihan Piutang Pajak Restoran

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< 1 Tahun	0,50	0,00	0,00
2	1 - 2 Tahun	10	0,00	0,00
3	2 - 5 Tahun	50	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	100	1.110.000,00	(1.110.000,00)
	Jumlah		1.110.000,00	(111.000,00)

Tabel 77: Penyisihan Piutang Pajak Reklame

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< 1 Tahun	0,50	0,00	
2	1 - 2 Tahun	10		
3	2 - 5 Tahun	50	57.530.475,00	(28.765.237,50)
4	> 5 Tahun	100	25.979.400,00	(25.979.400,00)
	Jumlah		83.509.875,00	(54.744.637,50)

Tabel 78: Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< 1 Tahun	0,50	194.316.007,00	971.580,04
2	1 - 2 Tahun	10	0,00	0,00
3	2 - 5 Tahun	50	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	100	0,00	0,00
	Jumlah		194.316.007,00	971.580,04

Tabel 79: Penyisihan Piutang Pajak Parkir

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< 1 Tahun	0,50	6.747.390,00	33.736,95
2	1 - 2 Tahun	10		
3	2 - 5 Tahun	50		

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
4	> 5 Tahun	100		
	Jumlah		6.747.390,00	33.736,95

Tabel 80: Penyisihan Piutang PBB P2

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< 1 Tahun	0,50	3.232.553.852,00	16.162.769,26
2	1 - 2 Tahun	10	3.080.110.803,00	308.011.080,30
3	2 - 5 Tahun	50	8.975.784.023,00	4.487.892.011,50
4	> 5 Tahun	100	12.537.099.761,00	12.537.099.761,00
	Jumlah		27.825.548.439,00	17.349.165.622,06

Tabel 81: Penyisihan Piutang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< 1 Tahun	0,50	79.940.000,00	399.700,00
2	1 - 2 Tahun	10	-	-
3	2 - 5 Tahun	50	-	-
4	> 5 Tahun	100	88.500.000,00	88.500.000,00
	Jumlah		168.440.000,00	88.899.700,00

Tabel 82: Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< - 1 Bulan	0,50	36.626.500,00	(183.132,50)
2	1 - 3 Bulan	10	-	-
3	3 - 12 Bulan	50	-	-
4	> 12 Bulan	100	10.865.590,00	(10.865.590,00)
	Jumlah		47.492.090,00	(11.048.722,50)

Tabel 83: Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< 1 Bulan	0,5	98.345.160,00	(491.725,80)
2	1 - 3 Bulan	10	0,00	0,00
3	3 - 12 Bulan	50	0,00	0,00
4	> 12 Bulan	100	456.985.273,00	(456.985.273,00)
	Jumlah		555.330.433,00	(457.476.998,80)

Tabel 84: Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pertanian

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< - 1 Bulan	0,50	0,00	0,00
2	1 - 3 Bulan	10	0,00	0,00
3	3 - 12 Bulan	50	0,00	0,00
4	> 12 Bulan	100	117.750.000,00	(117.750.000,00)
	Jumlah		117.750.000,00	(117.750.000,00)

Tabel 85: Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< - 1 Bulan	0,50	672.920.000,00	3.364.600,00
2	1 - 3 Bulan	10	0,00	0,00
3	3 - 12 Bulan	50	0,00	0,00
4	> 12 Bulan	100	1.123.351.800,00	1.123.351.800,00
	Jumlah		1.796.271.800,00	1.126.716.400,00

Tabel 86: Penyisihan Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	< 2 Bulan	0,50		
2	2 - 12 Bulan	10		
3	12 - 24 Bulan	50		
4	> 24 Bulan	100	1.619.450.000,00	(1.619.450.000,00)
	Jumlah		1.619.450.000,00	(1.619.450.000,00)

Tabel 87: Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Dinas Pertanian

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	0 - 6 Bulan	0,50	0,00	0,00
2	> 6 - 12 Bulan	10	0,00	0,00
3	> 12 - 24 Bulan	50	0,00	0,00
4	> 24 Bulan	100	148.300.000,00	(148.300.000,00)
	Jumlah		148.300.000,00	(148.300.000,00)

Tabel 88: Penyisihan Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	Sampai dengan tanggal Jatuh Tempo	0,50	0,00	0,00
2	> 1 Bulan dari Surat Tagihan Pertama	10	0,00	0,00
3	> 1 Bulan dari Surat Tagihan Kedua	50	0,00	0,00
4	> 1 Bulan dari Surat Tagihan Ketiga	100	836.270.000,00	(836.270.000,00)
	Jumlah		836.270.000,00	(836.270.000,00)

Tabel 89: Penyisihan Piutang Kerugian Keuangan Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	0 - 6 Bulan	0,50	0,00	0,00
2	> 6 - 12 Bulan	10	0,00	0,00
3	> 12 - 24 Bulan	50	0,00	0,00
4	> 24 Bulan	100	5.165.732.634,42	(5.165.732.634,42)
	Jumlah		5.165.732.634,42	(5.165.732.634,42)

Tabel 90: Penyisihan Piutang BLUD

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	0 - 6 Bulan	0,50	6.002.499.682,00	(30.012.498,41)
2	> 6 - 12 Bulan	10	0,00	0,00
3	> 12 - 24 Bulan	50	0,00	0,00
4	> 24 Bulan	100	0,00	0,00
	Jumlah		6.002.499.682,00	(30.012.498,41)

Tabel 91: Penyisihan Piutang Denda PBB P2

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1	0 - 6 Bulan	0,50	863.801.029,00	4.319.005,15
2	> 6 - 12 Bulan	10	1.395.194.781,00	139.519.478,10
3	> 12 - 24 Bulan	50	2.890.576.217,00	1.445.288.108,50
4	> 24 Bulan	100	6.009.762.754,00	6.009.762.754,00
	Jumlah		11.159.334.781,00	7.598.889.345,75

7.5.3.1.1.4. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Dibayar Dimuka	197.752.318,00	199.052.114,99

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp197.752.318,00 dan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp 199.052.114,99, terdiri dari. Adapun rincian untuk setiap Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 92: Rincian Beban dibayar Dimuka

No	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Dinas Pendidikan	1.044.299,00	916.775,00
2	Dinas Kesehatan	9.086.917,00	498.666,67
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.746.192,00	14.470.808,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	4.985.399,00
5	Dinas Sosial	1.135.042,00	906.208,33
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.750.000,00	4.891.733,00
7	Dinas Tenaga Kerja	2.000.000,00	1.356.500,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	4.710.733,00

No	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.246.300,00	867.442,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.718.375,00	9.707.708,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	850.850,00	1.287.500,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.042.892,00	2.708.983,00
13	Dinas Perhubungan	7.517.775,00	9.763.083,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.563.533,00	3.209.665,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.657.866,67	3.190.633,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	2.750.000,00	947.508,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.887.566,00	2.235.683,00
18	Dinas Perikanan	2.917.883,00	2.156.883,00
19	Dinas Pertanian	3.382.833,00	2.549.917,00
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.764.958,00	1.397.292,00
21	Dinas Transmigrasi	953.333,00	953.333,00
22	Sekretariat Daerah	124.325.975,00	89.606.590,00
23	Sekretariat DPRD	-	15.387.925,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.798.000,00	2.673.875,00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.006.933,00	4.342.200,00
26	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.537.275,00	2.416.525,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.363.650,00	684.917,00
28	Inspektorat Daerah	1.118.867,00	2.606.547,00
29	Kecamatan Pulau Petak	1.083.958,00	-
30	Kecamatan Kapuas Kuala	142.968,00	1.340.533,00
31	Kecamatan Kapuas Hulu	324.292,00	110.083,33
32	Kecamatan Selat	1.910.911,00	786.600,00
33	Kecamatan Kapuas Hilir	1.663.958,00	701.617,00
34	Kecamatan Kapuas Timur	-	95.583,33
35	Kecamatan Mantangai	59.125,00	-
36	Kecamatan Kapuas Murung	985.417,00	1.118.058,00
37	Kecamatan Timpah	1.246.458,00	362.100,00
38	Kecamatan Bataguh	1.083.958,33	1.322.583,00
39	Kecamatan Tamban Catur	1.083.958,00	775.833,33
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.008.092,00
	JUMLAH	197.752.318,00	199.052.114,99

7.5.3.1.1.5. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	36.577.095.842,56	15.046.348.462,38

Saldo persediaan sebesar Rp36.577.095.842,56 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2023 berdasarkan hasil perhitungan fisik atau hasil investasi fisik menggunakan nilai perolehan terakhir. Persediaan per 31 Desember 2022 berdasarkan jenis persediaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 93: Rincian Persediaan per jenis dan SOPD

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.310.000,00	3.850.000,00	(40,00)	(1.540.000,00)
Bahan-Bahan Kimia	436.716.500,00	741.877.799,00	(41,13)	(305.161.299,00)
Bahan/Bibit Tanaman	3.370.000,00	0,00	100	3.370.000,00
Bahan/ Bibit Ternak/ Bibit Ikan	105.842.650,00	158.629.260,00	(33,28)	(52.786.610,00)
Bahan Lainnya	18.553.875,00	18.553.875,00	0,00	0,00
ATK	123.816.912,40	56.254.659,07	120,10	67.562.253,33
Kertas dan Cover	48.836.751,00	33.636.007,00	45,19	15.200.744,00
Bahan Cetak	307.327.650,00	86.576.088,00	254,98	220.751.562,00
Benda Pos	3.463.000,00	2.884.000,00	20,08	579.000,00
Bahan Computer	97.788.308,00	162.661.905,00	(39,88)	(64.873.597,00)
Perabot Kantor	171.770.872,00	17.221.150,00	897,44	154.549.722,00
Alat listrik	65.347.570,00	78.643.142,30	(16,91)	(13.295.572,30)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Suvenir/Cendera Mata	0,00	525.000,00	185,60	3.293.500,00
Bahan Bakar	5.068.000,00	1.774.500,00	185,60	3.293.500,00
Minyak/Gas				
Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0,00	87.474.650,00	(100,00)	(87.474.650,00)
Persediaan Bibit Ternak/ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Obat-obatan	0,00	10.208.089.926,08	(100,00)	(10.208.089.926,08)
Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.037.150.752,00	937.179.087,25	10,67	99.971.664,75
Obat	7.466.780.100,98	0,00	100	7.466.780.100,98
Persediaan Makanan Pokok./natura	15.082.230,00	19.461.200,00	(22,50)	(4.378.970,00)
Persediaan Natura / dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya	1.875.000,00	1.386.000,00	35,28	489.000,00
Persediaan Barang Yang Akan diberikan Kepada Pihak Ketiga	32.304.500,00	80.079.000,00	(59,66)	(47.774.500,00)
Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	85.223.081,00	156.277.927,00	(45,47)	(71.054.846,00)
Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	2.376.000,00	(100,00)	(2.376.000,00)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.954.000,00	8.862.500,00	(55,39)	(4.908.500,00)
Benih ikan	2.000.000,00	3.588.660,00	(44,27)	(1.588.660,00)
Komponen-komponen lainnya	0,00	12.400.000,00	(100,00)	(12.400.000,00)
Obat-obatan Puskesmas	1.809.751.588,67	0,00	100	1.809.751.588,67
Obat-obatan JKN	36.625.100,00	0,00	100	36.625.100,00
Persediaan Obat-obatan GFK	2.187.754.201,51	0,00	100	2.187.754.201,51
Persediaan Hibah	22.468.093.200,00	2.188.742.473,18	926,53	20.279.350.726,82
Persediaan dari aset Peralatan dan mesin	40.290.000,00	0,00	100	40.290.000,00
Jumlah	36.577.095.842,56	15.023.692.115,88	143,46	21.553.403.726,68

Tabel 94: Rincian Persediaan SOPD

No	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Dinas Pendidikan	2.469.960.450,00	4.731.300,00
2	Dinas Kesehatan	10.469.926.005,16	11.385.677.364,59
3	BLUD RSUD DR. H. SOEWARNO SOSROATMODJO	2.005.626.693,00	1.956.975.293,09
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.778.744.950,40	45.330.625,40
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.209.880,00	1.119.100,00
6	Dinas Sosial	0,00	2.474.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.318.500,00	110.981.200,00
8	Dinas Tenaga Kerja	0,00	491.680,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	85.223.081,00	156.277.927,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	8.530.335,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	104.504.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91.189.000,00	34.707.388,00

No	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
13	Dinas Perhubungan	25.669.200,00	30.640.362,30
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.264.700,00	2.973.975,00
15	Dinas Perikanan	139.531.090,00	97.272.660,00
16	Dinas Pertanian	731.366.006,00	918.586.522,00
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	11.623.750,00	8.747.750,00
18	Sekretariat Daerah	17.864.350,00	31.649.850,00
19	Sekretariat DPRD	386.773.487,00	64.162.125,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.575.500,00	8.294.600,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	256.500.000,00	0,00
22	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	52.536.200,00	61.141.800,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	709.000,00	223.000,00
24	Inspektorat Daerah	1.100.000,00	2.851.705,00
25	Kecamatan Pulau Petak	0,00	316.000,00
26	Kecamatan Selat	0,00	3.339.700,00
27	Kecamatan Kapuas Timur	0,00	4.214.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	384.000,00	134.200,00
JUMLAH		36.577.095.842,56	15.046.348.462,38

7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	64.587.986.866,00	78.088.435.785,00

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp64.587.986.866,00 terdiri dari investasi non permanen sebesar Rp. 0,00 dan investasi Permanen sebesar Rp64.587.986.866,00 Apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar minus (Rp13.500.448.919,00)

Tabel 95: Rincian Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
PT Bank Pembangunan Kalteng	51.830.000.000,00	45.630.000.000,00	13,59	6.200.000.000,00
PDAM Tirta Pabelum Kabupaten Kapuas	7.833.998.716,00	27.534.447.635,00	(71,55)	(19.700.448.919,00)
PD Panunjung Tarung Kabupaten Kapuas	3.923.988.150,00	3.923.988.150,00	0,00	0,00
PT Jamkrida Kalimantan Tengah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	64.587.986.866,00	78.088.435.785,00	(17,29)	(13.500.448.919,00)

Tabel 96: Metode Pencatatan per Investasi

Uraian	Metode Pencatatan
PT Bank Pembangunan Kalteng	Metode Biaya
PDAM Kabupaten Kapuas	Metode Ekuitas
PD Panunjung Tarung Kabupaten Kapuas	Metode Ekuitas
PT Jamkrida Kalimantan Tengah	Metode Biaya

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

PT. Bank Pembangunan Kalteng (*Cost Method*)

Tabel 97: Penyertaan Modal di PT. Bank Pembangunan Kalteng

No	Uraian	2023 (Rp)	2022(Rp)
1	Saldo Awal	45.630.000.000,00	39.430.000.000,00
2	Penambahan Penyertaan Modal	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00
3	Pengurangan	0,00	0,00
	Saldo Akhir	51.830.000.000,00	45.630.000.000,00

Terdapat perbedaan antara saldo Investasi Permanen Pemerintah Kapuas dengan Saldo Penyertaan Modal pada Laporan Keuangan Bank Kalteng untuk saldo Tahun 2022 sejumlah Rp6.200.000.000,00 yang disebabkan oleh untuk Laporan Bank Kalteng setoran modal tersebut akan dicetak lembar sahamnya setelah dilaporkan ke OJK, jadi setoran modal dari Pemerintah Daerah akan disahkan di RUPS berikutnya sedang untuk Pemerintah Daerah nilai investasi akan dicatat sesuai pengeluaran yang riil dari Kas Daerah (metode biaya)

PDAM Tirta Pambelum Kabupaten Kapuas (*Equity Method*)

Tabel 98: Penyertaan Modal di PDAM Tirta Pabelum Kapuas

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	27.534.447.635,00	76.091.298.355,00
2	Penambahan Penyertaan Modal	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas /RK.PPKD (Kerugian s.d Tahun sebelumnya)	0,00	(38.205.217.429,00)
4	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(19.700.448.919,00)	(10.351.633.291,00)
5	Pembayaran Dividen Tunai ke Pemkab Kapuas		
	Saldo Akhir	7.833.998.716,00	27.534.447.635,00

Laporan Keuangan Perumda Tirta Pabelom

Laporan Auditor Independen KAP Ribka Aretha dan Rekan dengan nomor 00395/2.1349/AU.2/11/0287-3/1/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023 bahwa untuk Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Pabelum yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun anggaran yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Pada Laporan Auditor Independen tersebut, KAP tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Perusahaan. Basis opini tidak menyatakan pendapat sebagai berikut.

1. Setoran dari beberapa unit usaha atas pelunasan dari pelanggan belum disetor ke Bank sebesar Rp1.655.963.484,00 namun dicatat sebagai kas *intrasis* yang kenyataannya adalah penggunaan langsung kas oleh beberapa unit atas hasil pelunasan dari pelanggan. Selain itu, bukti-bukti pengeluaran dari unit usaha tersebut tidak dapat dilakukan pengujian oleh KAP;
2. Saldo piutang usaha per 31 Desember 2022 menunjukkan saldo piutang pelanggan yang belum dilunasi sebesar Rp17.622.931.270,00 namun nilai tersebut tidak didukung dengan data rinci nama pelanggan yang belum melunasi tunggakan. Selain itu, berdasarkan data *billing system* Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Pabelum hanya sebesar Rp6.012.770.635,00 sehingga terlalu tinggi sebesar Rp11.650.160.635,00;
3. Diluar penyajian Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.786.858.473,00 yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2022 belum semuanya telah disajikan, masih terdapat utang yang belum dicatat dalam laporan keuangan. Atas utang kepada pihak ketiga tersebut tidak didukung dengan Surat Penjanjian Pinjam Meminjam maupun bukti atau surat lainnya yang menyatakan keberadaan utang tersebut. Berdasarkan bukti penerimaan uang dengan nilai Rp847.500.000,00 dan atas penerimaan uang tersebut, diberikan sertifikat tanah milik Perumda Air Minum Tirta Pabelom sebanyak 13 sertifikat dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak satu buah sebagai jaminan

Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Pabelom Tahun Buku 2023 telah diperiksa oleh KAP Mohammad Sunusi dan Rekan. Laporan Auditor Independen Nomor 00187/2.1392/AU.2/11/1878 1/1/IV/2024 tanggal 1 April 2024 menunjukkan hasil opini Wajar Dengan Pengecualian. Basis opini wajar dengan pengecualian adalah pengelolaan Piutang, Piutang Lain-lain, Persediaan, Aset Tetap, Hutang Usaha dan Beban Usaha Perumda Air Minum Tirta Pabelom belum optimal. Hal ini disebabkan kurang tertibnya

pencatatan dan pengadministrasian bukti-bukti atas transaksi pengelolaan Piutang, Piutang Lain-lain, Persediaan, Aset Tetap, Hutang Usaha dan Beban Usaha yang kemungkinan perlu ditelusuri transaksi yang terjadi secara mendalam.

Nilai Investasi pada Perumda Air Minum Tirta Pabelom Tahun Buku 2024 berpotensi bersaldo nihil dengan pertimbangan tren pendapatan dan beban usaha tahun-tahun sebelumnya. Perumda Air Minum Tirta Pabelom mengalami kasus kebakaran gedung Kantor Administrasi Perumda Air Minum Tirta Pabelom yang terdiri dari Ruang Direktur, Ruang Humas, Ruang Dewas, Ruang Bendahara, Ruang Pelayanan pelanggan, Ruang keuangan, dan Ruang kasir. Kebakaran tersebut menghancurkan seluruh dokumen keuangan tahun buku 2021 s.d Februari 2024, yang terdiri dari dokumen transaksi, *billing systems*, dokumen Bagian Hubungan Pelanggan (Hublang) juga habis terbakar.

Laporan Kepolisian atas dugaan terbakar tersebut belum selesai dari Polres Kapuas dan Polda Kalteng. Laporan Kepolisian nomor STTLP/11/III/RES.1.24/2024/Kalteng/Res Kapuas tanggal 1 Maret 2024. Penyebab kebakaran sementara dari Laporan Kepolisian adalah konsleting di ruangan kasir.

Berdasarkan basis opini tersebut, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan mendalam atas permasalahan pengelolaan Piutang, Piutang Lain-lain, Persediaan, Aset Tetap, Hutang Usaha dan Beban Usaha dengan hasil sebagai berikut.

a) Kantor Administrasi Perumda Air Minum Tirta Pabelom Kebakaran

Pada tanggal 1 Maret 2024, kantor Perumda Air Minum Tirta Pabelom terbakar dengan kantor yang terbakar adalah Kantor Administrasi Perumda Air Minum Tirta Pabelom yang terdiri dari Ruang Direktur, Ruang Humas, Ruang Dewas, Ruang Bendahara, Ruang Pelayanan pelanggan, Ruang keuangan, dan Ruang kasir. Kebakaran tersebut menghancurkan seluruh dokumen keuangan tahun buku 2021 s.d Februari 2024, yang terdiri dari dokumen transaksi, *billing systems*, dokumen Bagian Hubungan Pelanggan (Hublang) juga habis terbakar.

Laporan Kepolisian atas dugaan terbakar tersebut belum selesai dari Polres Kapuas dan Polda Kalteng. Laporan Kepolisian nomor STTLP/11/III/RES.1.24/2024/Kalteng/Res Kapuas tanggal 1 Maret 2024. Penyebab kebakaran sementara dari Laporan Kepolisian adalah konsleting di ruangan kasir.

b) Penatausahaan pelaporan keuangan belum sepenuhnya tertib

Untuk permasalahan sebagaimana diungkap dalam LHP BPK Tahun sebelumnya diatas terkait dengan Buku besar akun-akun pada laporan keuangan tidak memuat transaksi yang diposting dari jurnal, Perumda Air Minum Tirta Pabelom telah menindaklanjuti dengan menyusun jurnal tiap bulan. Jurnal tersebut terdiri dari jurnal koreksi, Jurnal pendapatan air, jurnal penerimaan kas, Jurnal Kewajiban, jurnal persediaan dan pemeliharaan, jurnal penyusutan aset dan jurnal pengeluaran.

Perumda Air Minum Tirta Pabelom selama tahun 2023 menyelenggarakan penatausahaan pelaporan keuangan menggunakan kebijakan akuntansi sesuai Permen Otda Nomor 8 Tahun 2000 namun Permen Otda tersebut tidak dijabarkan Kembali lebih rinci dengan penetapan Direktur.

c) Penyajian masalah per akun laporan

1) Piutang

Pada LK Tahun 2022 saldo piutang senilai Rp17.662.931.270,00 masih menggunakan catatan per Mei 2023 bukan 31 Desember 2022. Namun komunikasi antara KAP dengan Perumda Air Minum Tirta Pambelum belum optimal sehingga koreksi untuk disesuaikan dengan saldo 31 Desember 2022 belum dilaksanakan.

Pencatatan akuntansi Piutang pada tahun buku 2022 menggunakan data dari keuangan sedangkan pada tahun 2023 menggunakan data dari Bagian Hublang (Hubungan Pelanggan). Catatan piutang di Bagian Hublang senilai Rp14.324.379.053,00 namun di bagian keuangan senilai Rp20.607.100.410,00. Catatan piutang di Bagian Hublang tersebut tidak dapat ditelusuri lebih lanjut karena dokumen sumber serta *server* penyimpanan data telah terbakar. Selisih piutang TA 2022 dan TA 2023 senilai Rekonsiliasi selisih piutang senilai Rp6.282.721.357,00 (Rp20.607.100.410,00 - Rp14.324.379.053,00) tersebut tidak dapat dijelaskan.

2) Aset Tetap

Aset Tetap Perumda Air Minum Tirta Pambelum disajikan senilai Rp13.970.149.986,00 dengan nilai perolehan Aset Tetap Rp180.828.788.381,00 dan Akumulasi Penyusutan senilai Rp166.858.638.395,00. Berdasarkan data rincian Aset Tetap diketahui terdapat permasalahan rincian belum terdapat penyajian harga perolehannya, Kendaraan di bawa Pegawai yang telah tidak bekerja dan sebagai jaminan.

BPKB Kendaraan bermotor yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Pambelum seharusnya sebanyak delapan buah namun terdapat satu BPKB yang dijadikan jaminan kewajiban kepada pihak ketiga. Selain itu, terdapat empat motor dan dua mobil yang dibawa oleh pegawai yang sudah tidak bekerja lagi di Perumda Air Minum Tirta Pambelum. Daftar pegawai yang membawa aset tetap milik perusahaan senilai Rp808.972.728,00.

Selain itu, sertifikat tanah milik Perumda Air Minum Tirta Pambelum menjadi jaminan pinjaman kepada pihak ketiga sebanyak 12 sertifikat dan enam sertifikat yang tidak disimpan oleh Perumda Air Minum Tirta Pambelum. Sertifikat yang disimpan juga masih terdapat sertifikat yang Salinannya saja, masih atas nama pihak lain dan belum ada legalitas sertifikat hak milik Perumda Air Minum Tirta Pambelum.

3) Kewajiban

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Pambelum diketahui bahwa terdapat surat nomor PE.09.03/S-1056/PW15/4/2022 tanggal 25 Juli 2022 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang diantaranya menyatakan terdapat permasalahan prosedur pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan yang diantaranya tanpa persetujuan kepala daerah selaku pemilik modal dengan rincian tahun 2020 senilai Rp12.000.000.000,00 dan tahun 2021 senilai Rp3.750.000.000,00. Permasalahan lainnya adalah perhitungan pembayaran dan maupun sisa pinjaman tidak dapat ditelusuri dalam catatan akuntansi Perumda Air Minum

Tirta Pabelum. Atas hal tersebut, Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Pabelum tahun buku 2023 tidak menyajikan sebagai kewajiban kepada pihak ketiga.

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Pabelum dan hasil persidangan kasus nomor 31/Pdt.G/2023/PN Klk tanggal 17 November 2023 diketahui bahwa terdapat surat pinjam meminjam dari perorangan di Perumda Air Minum Tirta Pabelum dengan kondisi Dewan Pengawas tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui. Atas hal tersebut, terdapat pelampauan kewenangan jabatan dalam melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan tidak diketahui oleh Kepala Daerah selaku pemilik modal.

Atas tindakan tersebut, terdapat 12 Sertifikat Tanah dan satu BPKB yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga yang **diduga dilakukan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Pabelum periode 2020 dan 2021 bersama-sama dengan Manajemer Umum dan Keuangan pada periode yang sama.** Atas Aset yang telah dijadikan jaminan tersebut, belum ada Upaya dari Perumda Air Minum Tirta Pabelum dan Pemkab Kapuas dalam mengambil kembali bukti kepemilikan aset yang dijadikan pinjaman atau melakukan mediasi terkait Aset yang dijaminkan tersebut.

Berdasarkan penelusuran data SIPP Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas diketahui terdapat dua tututan wanprestasi kepada Perumda Air Minum Tirta Pabelum dengan nomor perkara 31/Pdt.G/2023/PN Klk tanggal 17 November 2023 serta nomor perkara 32/Pdt.G/2023/PN Klk tanggal 28 November 2023.

Pada penelusuran hasil putusan perkara nomor 31/Pdt.G/2023/PN Klk tanggal 17 November 2023 diketahui adanya peminjaman mengatasnamakan Perumda Air Minum Tirta Pabelum kepada para penggugat senilai Rp550.000.000,00 yang ditransfer dari rekening pribadi sdr AH kepada rekening atas nama PDAM Tirta Pabelom Kabupaten Kapuas tertanggal 28 April 2021. Namun hasil akhir penetapan perkara tersebut, hakim menetapkan bahwa eksepsi tergugat dan turut tergugat ditolak seluruhnya dan dalam pokok perkara bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan penelusuran hasil putusan perkara nomor 32/Pdt.G/2023/PN Klk tanggal 28 November 2023 diketahui bahwa diketahui adanya peminjaman mengatasnamakan Perumda Air Minum Tirta Pabelum kepada para penggugat senilai Rp2.785.000.000,00 baik melalui transfer tanggal 28 September 2020 ke rekening BRI Perumda Air Minum Tirta Pabelum dan tunai pada 29 Januari 2021, 22 Februari 2021 dan 22 Maret 2021 yang selanjutnya dibuatkan perjanjian utang piutang tanggal 6 Juni 2022. Hasil akhir penetapan perkara tersebut, hakim menetapkan diantaranya bahwa : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pidana (wanprestasi); 3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000.000,00; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00.

Berdasarkan hal tersebut diatas serta penelusuran lebih lanjut pada LK Perumda Air Minum Tirta Pabelom diketahui tidak terdapat penyajian

kewajiban pinjam meminjam dalam Laporan Keuangan. Selain itu, pada saat terjadinya transaksi, tidak ada pencatatan kas masuk, pembayaran gaji dan tunjangan serta pengakuan utang.

- 4) Penyesuaian Beban di Laporan Arus Kas belum disajikan dalam Laporan Laba Rugi

Berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Arus Kas diketahui terdapat pembebanan pada laba ditahan yaitu koreksi kurang ekuitas pada Hutang tahun 2020 senilai Rp200.000.000,00, koreksi Hutang Tahun 2021 senilai Rp415.102.290,00, koreksi piutang usaha tahun 2022 senilai Rp6.282.721.409,00 serta koreksi tambah pada Reklasifikasi Aset dan Akumulasi Penyusutan senilai Rp291.704.008,00. Koreksi tambah kurang tersebut seharusnya disajikan dalam laporan laba rugi bukan di Laporan Arus Kas. Atas permasalahan tersebut tidak dilakukan koreksi oleh KAP yang melakukan pemeriksaan di TA 2023.

- 5) Potensi Investasi Jangka Panjang pada tahun selanjutnya bersaldo nihil

Berdasarkan pemeriksaan atas saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai Rp7.833.998.716,00, trend laba/rugi Perusahaan senilai Rp10 milyar – Rp13 milyar dengan Pendapatan hanya Rp30 milyar dan Beban Perusahaan senilai Rp40 milyar maka nilai Investasi Jangka Panjang pada Perumda Air Minum Tirta Pabelum berpotensi bersaldo negatif pada tahun berikutnya.

PD Panunjung Tarung (*Equity Method*)

Tabel 99: Penyertaan Modal di PD Panunjung Tarung

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	3.923.988.150,00	3.923.988.150,00
2	Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
3	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	0,00	0,00
4	Pembayaran Dividen Tunai ke Pemkab Kapuas	0,00	0,00
	Saldo Akhir	3.923.988.150,00	3.923.988.150,00

Laporan Keuangan PD Panunjung Tarung Kabupaten Kapuas tahun buku 2023 dan 2022, sampai dengan penerbitan laporan keuangan ini, belum diaudit oleh Pemeriksa Eksternal. Hal tersebut mengakibatkan belum adanya pengakuan laba/rugi perusahaan pada TA 2023 dan 2022. Berdasarkan hasil *due diligence* oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa PD Panunjung Tarung sudah tidak layak untuk dilanjutkan kembali usahanya.

Tabel 100: Perkembangan Investasi ke PD Panunjung Tarung tahun 2006 - 2023

TA	Penyertaan Modal (Rp)	Laba (Rugi) (Rp)	Saldo Akhir Penyertaan Modal (Rp)	Keterangan
2006 s.d. 2010	8.540.000.000,00	0,00	8.540.000.000,00	Tahun 2000 s.d. 2005 PD PT belum melakukan aktivitas. Tahun 2006 s.d. 2007 melakukan pengurusan izin usaha yang dicatat sebagai beban yang ditangguhkan. Tahun 2008 melakukan kegiatan aneka usaha
2011	750.000.000,00	(2.763.748.432,00)	6.013.854.445,00	Rugi sebesar Rp2.763.748.432,00

		(512.397.123,00)		dan koreksi ekuitas sebesar Rp512.397.123,00 merupakan akumulasi dari TA 2008 s.d. 2011.
2012	1.000.000.000,00	(906.729.025,00) (519.337.507,00)	5.587.787.913,00	Berdasarkan LK Audited PD PT Tahun 2012 oleh KAP Drs. Fahmi Rizani, diketahui rugi sebesar Rp906.729.025,00 dan koreksi ekuitas sebesar Rp519.337.507,00
2013	0	(938.164.971,00)	4.649.622.942,00	Berdasarkan LK Audited PD PT Tahun 2013 oleh KAP Drs. Fahmi Rizani, diketahui rugi sebesar Rp938.164.971,00 Nilai Penyertaan Modal berdasarkan LHP LKPD Kapuas TA 2013 adalah Rp0,00.
2014	0	(436.558.602,00)	4.213.064.340,00	Berdasarkan LK Unaudited PD PT TA 2014 rugi sebesar Rp436.558.602,00 Nilai Penyertaan Modal berdasarkan LHP LKPD Kapuas TA 2014 adalah Rp0,00.
2015	0	(40.882.316,00) (40.850.791,00)	4.131.331.233,00	Berdasarkan LK Unaudited PD PT TA 2015 rugi sebesar Rp40.882.316,00 dan koreksi ekuitas sebesar Rp40.850.791,00. Nilai Penyertaan Modal berdasarkan LHP LKPD Kapuas TA 2015 adalah Rp0,00.
2016	0	(14.215.566,00)	4.117.115.667,00	Berdasarkan LK Unaudited PD PT TA 2016 Tahun 2016 sudah tidak mencatat pendapatan usaha. Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kapuas TA 2016 tercatat penyertaan modal sebesar Rp4.117.115.667,00 dengan koreksi kerugian tahun sebesar Rp14.215.566,00.
2017	0	(55.017.740,00) (36.049,00)	4.062.061.878,00	Berdasarkan LK Unaudited PD PT TA 2017 rugi sebesar Rp55.017.740,00 dan koreksi ekuitas sebesar Rp36.049,00
2018	0	(80.906.615,00) (36.049,00)	3.981.119.214,00	Berdasarkan LK Unaudited PD PT TA 2018 rugi sebesar Rp80.906.615,00 dan koreksi ekuitas sebesar Rp36.049,00
2019	0	(600.095.009,00) (35.049,00)	3.380.989.156,00	Berdasarkan LK Unaudited PD PT TA 2019 rugi sebesar Rp600.095.009,00 dan koreksi ekuitas sebesar Rp35.049,00
2020	0	544.539.994	3.925.529.150,00	Berdasarkan LK Unaudited PD PT TA 2020. Penyajian Rp544.539.994 merupakan koreksi ekuitas PD PT
2021	0	(1.541.000,00)	3.923.988.150,00	Berdasarkan LK Unaudited PD PT TA 2021.
2022	0	0	3.923.988.150,00	Tidak ada LK
2023	0	0	3.923.988.150,00	Tidak ada LK

PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah (*Cost Method*)

Tabel 101: Penyertaan Modal di PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Penambahan Penyertaan Modal	0,00	0,00
3	Pengurangan	0,00	0,00
	Saldo Akhir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

7.5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap

31 Desember 2023

31 Desember 2022

4.089.331.898.416,42

3.812.826.255.138,91

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.089.331.898.416,42 kenaikan sebesar Rp276.505.643.277,51 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 102: Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Tanah	546.424.290.829,00	526.983.846.672,00	368,90	19.440.444.157,00
Aset Peralatan dan Mesin	648.864.664.792,56	568.766.348.925,28	14,08	80.098.315.867,28
Aset Gedung dan Bangunan	1.339.810.743.520,67	1.207.699.086.528,56	10,94	132.111.656.992,11
Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.249.015.735.792,46	3.816.609.483.980,85	11,33	432.406.251.811,61
Aset Tetap Lainnya	9.776.093.547,52	9.777.242.244,52	(0,01)	(1.148.697,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	246.464.578.099,00	254.957.450.223,00	(3,33)	(8.492.872.124,00)
Akumulasi Penyusutan	(2.951.024.208.164,79)	(2.571.967.203.435,30)	14,74	(379.057.004.729,49)
Jumlah	4.089.331.898.416,42	3.812.826.255.138,91	7,25	276.505.643.277,51

Dari saldo Aset Tetap tersebut terdapat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp4.249.015.735.792,46 belum menerapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas terkait tentang penambahan masa manfaat dan kapitalisasi ke aset induknya sehingga saldo Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan Tahun 2023 belum mencerminkan saldo yang [akuntabel wajar](#). Namun, BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas

Penjelasan lebih lanjut mengenai asset tetap adalah sebagai berikut.

7.5.3.1.3.1. Tanah

Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	546.424.290.829,00	526.983.846.672,00

Saldo Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp546.424.290.829,00 mengalami peningkatan sebesar Rp19.440.444.157,00 atau sebesar 5,89% dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 103: Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Tanah	546.424.290.829,00	526.983.846.672,00	3,69	19.440.444.157,00
Jumlah	546.424.290.829,00	526.983.846.672,00	3,69	19.440.444.157,00

Tabel 104: Mutasi aset tetap tanah disajikan pada tabel sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	526.983.846.672,00
2	Pertambahan	
	Pengadaan Belanja Modal Tanah Tahun 2023	8.607.417.219,00
	Reklas /pindah Ruang Aset	1.151.987.000,00
	Reklas dari belanja barang dan jasa tahun	413.844.574,00
	Hibah	56.998.600,00
	Bertambah dari Aset yang belum tercatat	9.372.658.700,00
	Koreksi Aset	0,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Jumlah Pertambahan	19.602.906.093,00
3	Pengurangan	
	Reklas /pindah Ruang Aset	162.461.936,00
	Jumlah Pengurangan	162.461.936,00
4	Saldo Akhir	546.424.290.829,00

Pertambahan – Belanja Modal Tanah Tahun 2023**Tabel 105: Belanja Modal Tanah Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Modal Tanah di Tahun 2023	7.920.005.283,00
2	Dinas Pertanian	Belanja Modal Tanah di Tahun 2023	150.000.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Modal Tanah di Tahun 2023	537.411.936,00
	Jumlah		8.607.417.219,00

Pertambahan – Reklas /Pindah Ruang Aset Tahun 2023**Tabel 106: Reklas /Pindah Ruang Aset Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Reklas dari KIB C (Bangunan Gedung tempat pendidikan)	701.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Reklas dari KIB C (Bangunan tempat kerja)	450.987.000,00
	Jumlah		1.151.987.000,00

Pertambahan – Reklas dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023**Tabel 107: Reklas dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	47.850.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp. 306.458.044 2. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung Rp 18.858.957 3 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Kontruksi Rp8.302.572	333.619.574,00
3	Kecamatan Kapuas Kuala	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	32.375.000,00
	Jumlah		413.844.574,00

Penambahan Aset Tetap Tanah dari Hibah Pusat /Provinsi/ Desa**Tabel 108: Aset Tetap Tanah dari Hibah Pusat /Provinsi/ Desa**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Merpakan Hibah tanah tempat kerja lain dari Desa : 1 Desa Sei Dusun RT.04 di Pinggir Sungai Kali Kapuas Rp 5.152.000,00 2. Desa Katimpun RT.02 Kecamatan Mantangai Rp1.325.000,00 3 Desa Katimpun Seberang Kecamatan Mantangai Rp3.750.000,00 4 Desa Sei Ahas RT.02 Kecamatan Mantangai Rp18.000.000,00 5 Desa Sei Ahas Seberang RT.02 Kecamatan Mantangai Rp4.000.000,00 6 Desa Manusup Hulu RT.002 RW.001 Kecamatan Mantangai Rp 1.646.800,00 7 Desa Manusup Hilir RT.03/02 Kecamatan Mantanga	56.998.600,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
		Rp15.124.800,00 i	
		8 Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya - Tamban Catur Tengah RT 007 RW 001 Kecamatan Tamban Catur	
		Rp8.000.000,00	
		Jumlah	56.998.600,00

Pertambahan – Aset Tanah Yang Belum Tercatat

Penambahan berasal dari Aset yang belum tercatat pada tahun 2022 dari hasil rekon aset antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2023 sebesar Rp9.372.658.700,00

Tabel 109: Aset Yang Belum Tercatat

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Lapangan Bukit Ngalangkang Kuala Kapuas	6.717.504.000,00
2	Dinas Perikanan	Merupakan tanah untuk bangunan gedung	740.700,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 Tanah untuk Bangunan Ged. Perdagangan/Perusahaan (Blok F) Rp2.073.337.000 2 Tanah untuk Bangunan Ged. Perdagangan/Perusahaan (Psr. Setia Kawan) Rp581.077.000	2.654.414.000,00
		Jumlah	9.372.658.700,00

Berkurang – Reklas Pindah Ruang Aset

Reklas Pindah Ruang Aset

Aset tanah berkurang dari reklas antar ruang aset pada tahun 2023 terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 162.461.936,00 yang direklas ke bangunan tempat tinggal lainnya.

7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	648.864.664.792,56	568.766.348.926,56

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp648.864.664.792,56 mengalami peningkatan sebesar Rp80.098.315.867,28 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 110: Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Peralatan dan mesin	648.864.664.792,56	568.766.348.926,56	14,08	80.098.315.867,28
Jumlah	648.864.664.792,56	568.766.348.926,56	14,08	80.098.315.867,28

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 bertambah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 111: Rincian Saldo Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		568.766.348.926,56
2	Pertambahan		
	Pengadaan Belanja Modal Tahun 2023	79.563.896.620,00	
	Reklas /pindah Ruang Aset	131.186.300,00	

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Belanja melalui Dana BOS	2.424.529.295,00	
	Hibah / Hibah Pemerintah Pusat	2.765.043.976,00	
	Koreksi Aset dari reklas belanja barang dan jasa	164.120.800,00	
	Jumlah Pertambahan		85.048.776.991,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan Aset	3.690.242.832,00	
	Reklas /pindah Ruang Aset	377.699.800,00	
	Pindah ke Extra Kompatabel	354.057.757,00	
	Hibah	381.400.000,00	
	Koreksi Aset dari reklas belanja barang dan jasa	147.060.736,00	
	Jumlah Pengurangan		4.950.461.125,00
4	Saldo Akhir		648.864.664.792,56

Pertambahan - Bertambah dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Penambahan berasal dari Belanja Modal sesuai dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 sebesar Rp96.495.440.040,00. Rincian sebagai berikut :

Tabel 112: Bertambah dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

NO	Perangkat Daerah	Peralatan dan Mesin
1	Dinas Pendidikan	3.514.635.000,00
2	Dinas Kesehatan	23.895.450.032,00
3	RSUD DR. H. SOEWARNO SOSROATMODJO	8.234.725.895,00
4	BLUD RSUD DR. H. SOEWARNO SOSROATMODJO	768.648.914,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.118.741.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.968.140.000,00
7	Dinas Sosial	108.811.325,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	203.185.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	50.030.450,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	129.263.400,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	23.402.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	702.763.660,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	685.105.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	111.643.700,00
15	Dinas Perhubungan	973.360.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	431.012.600,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	315.756.150,00
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	210.217.210,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	41.878.300,00
20	Dinas Perikanan	250.690.000,00
21	Dinas Pertanian	4.022.066.950,00
22	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	90.275.000,00
23	Dinas Transmigrasi	319.120.992,00
24	Sekretariat Daerah	8.374.905.262,00
25	Sekretariat DPRD	5.586.278.750,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	143.383.020,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.169.234.800,00
28	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	817.550.000,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	721.139.500,00
30	Inspektorat Daerah	416.350.000,00
31	Kecamatan Kapuas Barat	77.998.175,00
32	Kecamatan Pulau Petak	8.500.000,00
33	Kecamatan Kapuas Kuala	118.399.100,00
34	Kecamatan Kapuas Hulu	19.000.000,00

NO	Perangkat Daerah	Peralatan dan Mesin
35	Kecamatan Selat	762.293.970,00
36	Kecamatan Kapuas Hilir	456.623.200,00
37	Kecamatan Kapuas Timur	25.010.000,00
38	Kecamatan Basarang	46.059.000,00
39	Kecamatan Mantangai	260.799.180,00
40	Kecamatan Kapuas Tengah	11.423.000,00
41	Kecamatan Kapuas Murung	239.418.560,00
42	Kecamatan Timpah	27.531.566,00
43	Kecamatan Bataguh	37.376.500,00
44	Kecamatan Tamban Catur	59.454.360,00
45	Kecamatan Dadahup	43.240.000,00
46	Kecamatan Pasak Talawang	99.935.700,00
47	Kecamatan Mandau Talawang	76.639.999,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	796.430.400,00
JUMLAH		79.563.896.620,00

Pertambahan - Pindah Ruang / KIB**Tabel 113: Mutasi Tambah Pindah Ruang/ KIB**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Alat rumah tangga lainnya bertambah dari reklas aset tetap lainnya	99.900.000,00
2	Dinas Pertanian	Alat rumah tangga lainnya bertambah dari reklas aset tetap lainnya	24.786.300,00
3	Kecamatan Kapuas Kuala	Alat rumah tangga lainnya bertambah dari reklas aset tetap lainnya	6.500.000,00
Jumlah			131.186.300,00

Pertambahan – Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Dari Dana BOS**Pertambahan – Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Dari Dana BOS**

Penambahan berasal dari Belanja belanja barang dan jasa BOS Dana Bos tahun 2023 dan di reklas ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.424.529.295,00.

Pertambahan – Hibah Peralatan dan Mesin dari Hibah

Penambahan peralatan dan mesin berasal dari Hibah yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat/daerah swasta, dll ke Kabupaten Kapuas melalui SOPD sesuai senilai Rp2.765.043.976,00.

Tabel 114: Penambahan Peralatan dan Mesin dari Hibah

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Hibah dari Kemenkes merupakan alat kesehatan	2.488.412.044,00
2	Dinas Kependudukan dan Capil	Hibah dari Disdukcapil Provinsi Kalimantan Tengah berupa Personal Computer Rp17.269.028 dan Peralatan personal computer Rp 74.632.300	91.901.328
3	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	Merupakan hibah dari Perpustakaan berupa : 1 Alat penyimpanan perlengkapan kator Rp24.040.555,00 2 Mebel Rp37.341.954 3 Alat rumah tangga lainnya Rp11.605.295 4 Lemari dan arsip pejabat Rp10.966.800 5 Peralatan studio Rp22.724.000	184.730.604

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
		6 Personal computer Rp63.232.000	
		7 Peralatan Jaringan Rp14.820.000	
		Jumlah	2.765.043.976,00

Pertambahan – Dari Reklas Barang dan Jasa

Tabel 115: Pertambahan Dari Reklas Barang dan Jasa

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Perikanan	Pembelian alat Rumah tangga pompa Rp2.207.000, lemari es Rp 5.028.300 dan lemari kaca Rp 2.020.200	9.255.500,00
2	Dinas Pertanian	Alat Kegiatan kantor –Perabot Kantor	107.337.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Alat kegiatan kantor – Perabot Kantor	10.050.000,00
4	Kecamatan Kapuas Barat	Pembelian mebel sebesar Rp 9.715.000 dan alat pembersih Rp 1.109.800 dari belanja barang dan jasa	10.824.800,00
5	Kecamatan Selat	Pembelian alat rumah tangga dari belanja alat tulis kantor	2.500.000,00
6	Kecamatan Mantangai	Pembelian mebel dari barang dan jasa	17.755.000,00
7	Kecamatan Kapuas Murung	Pembelian alat pembersih dari belanja barang dan jasa	3.350.000,00
8	Kecamatan Tamban catur	Pembelian alat pembersih (mesin potong rumput) dari belanja barang dan jasa	3.048.500,00
		Jumlah	164.120.800,00

Pengurangan – Penghapusan

Tabel 116: Pengurangan Penghapusan

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
	Dinas Pendidikan	156.443.023,00
1	Dinas Kesehatan	262.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	390.056.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	48.018.750,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	313.680.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	308.900.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	231.016.000,00
8	Dinas Perhubungan	83.994.500,00
9	Dinas Perikanan	143.555.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	221.108.105,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	734.241.454,00
12	Inspektorat	81.480.000,00
13	Kecamatan Kapuas Kuala	211.350.000,00
14	Kecamatan Kapuas Tengah	338.000.000,00
15	Kecamatan Bataguh	157.400.000,00
	Jumlah	3.690.242.832,00

Mutasi Kurang - Pindah Ruang / KIB

Tabel 117: Mutasi Kurang Pindah Ruang / KIB

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat	Reklas dari KIB B ke KIB F (Konstruksi)	99.000.000,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
	Daerah	dalam pengerjaan) Rumah Negara Gol I Type A Permanen	
2	Kecamatan Kapuas Hilir	Reklas dari KIB B ke KIB D (Aset Jalan, Jaringan dan irigasi) Bangunan Pengambilan irigasi	213.699.800,00
3	Kecamatan Kapuas Murung	Reklas dari KIB B ke KIB D (Aset Jalan, Jaringan dan irigasi) Bangunan Pengambilan irigasi	65.000.000,00
	Jumlah		377.699.800,00

Mutasi Kurang - Pindah Ekstra Kompetabel**Tabel 118: Mutasi Kurang Pindah Ekstra Kompetabel**

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	85.195.000,00
2	Dinas Kesehatan	10.945.000,00
3	BLUD RSUD DR. H. Soewarno Sosroatmodjo	1.267.757,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	110.900.000,00
5	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	8.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	117.750.000,00
7	Kecamatan Selat	20.000.000,00
	Jumlah	354.057.757,00

Mutasi Kurang - Hibah**Mutasi Kurang - Hibah**

Aset peralatan dan mesin berkurang karena hibah, merupakan aset peralatan dan mesin (mebel) pada Dinas Pendidikan yang dihibahkan kepada Sekolah Swasta dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Sebesar Rp381.400.000,00.

Mutasi Kurang – Reklas ke Barang dan Jasa**Tabel 119: Mutasi Kurang – Reklas ke Barang dan Jasa**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Reklas dari KIB B merupakan belanja modal peralatan dan mesin, di reklas ke Belanja barang dan jasa (merupakan pembelian obat)	23.408.000,00
2	BLUD DR. H. Soewarno Sosroatmodjo	Reklas dari belanja modal peralatan dan mesin reklas ke barang dan jasa	2.826.676,00
3	Dinas Tenaga Kerja	Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 merupakan pemeliharaan komputer	4.735.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 (pembelian bahan untuk kegiatan kantor – perabot kantor)	9.521.660,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pembelian Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	6.000.000,00
6	Dinas Pertanian	Belanja modal Peralatan dan mesin merupakan pembelian Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	40.290.000,00
7	Kecamatan Selat	Reklas dari KIB B ke Barang dan jasa (Pembelian tinta printer masuk ke belanja modal peralatan dan mesin)	9.000.000,00
8	Kecamatan Tamban Catur	Reklas dari KIB B ke Barang dan jasa (Pembelian Penggantian Hardisk Laptop)	1.500.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		49.779.400,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
	Jumlah		147.060.736,00

7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	1.339.810.743.520,67	1.207.699.086.528,67

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.339.810.743.520,67 mengalami peningkatan sebesar Rp132.111.656.992,11 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 120: Peningkatan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Gedung dan Bangunan	1.339.810.743.520,67	1.207.699.086.528,67	10,94	132.111.656.992,11
Jumlah	1.339.810.743.520,67	1.207.699.086.528,67	10,94	132.111.656.992,11

Mutasi Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 121: Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		1.207.699.086.528,67
2	Pertambahan		
	Pengadaan Belanja Modal Tahun 2023	96.495.440.040,00	
	Reklas / Pindah Ruang	47.726.213.922,00	
	Belanja melalui Dana BOS reklas dari barjas - Belanja melalui Dana BLUD	20.000.000,00	
	Hibah	20.067.811.600,00	
	Temuan Aset yang belum dicatat	1.118.811.751,00	
	Reklas dari Barang dan Jasa selain dari Barang Jasa BOS	7.584.537.274,00	
	Utang Pengadaan	287.098.405,00	
	Jumlah Pertambahan		173.299.912.992,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	1.521.392.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang	38.802.354.000,00	
	Hibah	864.510.000,00	41.188.256.000,00
	Jumlah Pengurangan		
4	Saldo Akhir		1.339.810.743.520,67

Pertambahan - Pengadaan Belanja Modal

Pertambahan - Pengadaan Belanja Modal

Penambahan berasal dari Belanja Modal sesuai dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 sebesar Rp96.495.440.040,00. Rincian sebagai berikut :

Tabel 122: Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Gedung dan Bangunan
1	Dinas Pendidikan	12.994.592.500,00
2	Dinas Kesehatan	42.409.811.468,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.359.723.061,00
4	Dinas Sosial	1.330.634.250,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	2.200.000.039,00
6	Dinas Perhubungan	1.877.536.000,00
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	183.500.000,00

No	Perangkat Daerah	Gedung dan Bangunan
	Satu Pintu	
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	59.630.000,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	734.499.999,00
10	Dinas Perikanan	309.250.000,00
11	Dinas Pertanian	3.303.018.000,00
12	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	83.500.000,00
13	Sekretariat Daerah	345.000.000,00
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	994.697.000,00
15	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	496.000.000,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.907.500,00
17	Kecamatan Kapuas Barat	478.670.000,00
18	Kecamatan Selat	150.000.000,00
19	Kecamatan Kapuas Hilir	199.995.223,00
20	Kecamatan Kapuas Murung	105.000.000,00
21	Kecamatan Bataguh	13.065.000,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	797.410.000,00
JUMLAH		96.495.440.040,00

Mutasi Tambah - Pindah Ruang/ KIB**Tabel 123: Mutasi Tambah Pindah Ruang/ KIB**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Reklas dari : KIB F (Konstruksi dalam pengerjaan) – Bangunan gedung kantor Rp106.057.500,00 dan reklas dari aset lain-lain (Aset rusak berat) Rp 377.994.807,00	484.052.307,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bertambah dari reklas KIB F (Konstruksi dalam pengerjaan) menyesuaikan kondisi pekerjaan - Rumah Negara Golongan I Rujab Bupati Kapuas	41.195.238.534,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bertambah dari KIB A reklas ke KIB C (Bangunan tempat tinggal lainnya)	162.461.936,00
4	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Bertambah dari reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) - Bangunan Peninggalan	21.000.000,00
5	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Bertambah dari reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) - Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	231.084.000,00
6	Kecamatan Timpah	Bertambah dari reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) - Bangunan Gedung Kantor	190.790.000,00
7	Kecamatan Tamban Catur	Bertambah dari reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) - Rumah Negara Golongan II Rp495.290.000,00 dan Bangunan Gedung Kantor Rp199.750.000,00	695.040.000,00
8	Kecamatan Kapuas Hulu	Bertambah dari reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) – Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan	34.743.500,00
9	Kecamatan Kapuas Tengah	Bertambah dari reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) – Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.267.651.645,00
10	Kecamatan Pasak Talawang	Bertambah dari reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) – Rumah Negara Golongan I Rp 746.677.000,00 dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp697.475.000,00	1.444.152.000,00
Jumlah			47.726.213.922,00

Pertambahan - Pengadaan Belanja BOS**Pertambahan - Pengadaan Belanja BOS**

Penambahan aset Gedung dan Bangunan berasal dari reklas dari Belanja barang dan jasa BOS Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas TA 2023 sesuai senilai sebesar Rp20.000.000,00

Pertambahan – Hibah

Tabel 124: Mutasi Tambah dari Hibah

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Merupakan hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari 1. Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara Permanen - Desa Lamunti - HK.201/13/20/DJPD/2023 Rp 6.171.338.000,00 2. Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen - Desa Mantangai - HK.201/13/20/DJPD/2023 Rp 13.896.473.600,00	20.067.811.600,00
		Jumlah	20.067.811.600,00

Pertambahan – Temuan Aset Yang Belum Tercatat

Tabel 125: Temuan Aset Yang Belum Tercatat

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1. Gedung Kantor sesuai Inventarisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp 811.178.058 2. Gedung Kantor sesuai Inventarisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp307.633.693	1.118.811.751,00
		Jumlah	1.118.811.751,00

Tambah Aset Gedung dan Bangunan - Reklas Belanja Barang dan Jasa

Tabel 126: Tambah Aset Gedung dan Bangunan Reklas Belanja Barang dan Jasa

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Aset gdung dan bangunan bertambah dari belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.043.514.210,00
2	RSUD DR. H.Soewarno Sosroatmodjo	Bertambah dari barang dan jasa : 1. Belanja pemeliharaan gedung dan bangnan (pekerjaan reha atap, selasar Rp 175.800.000,00 , belana perencana Rp 13.950.000,00 dan pengawasan Rp 9.990.000,00 2. Belanja bahan Belanja Barang Jasa Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk pengecatan gedung dan selasar Rp 131.550.660,00, perencanaan Rp10.411.000,00 dan pengawasan Rp 7.459.200,00	349.160.860,00
3	Dinas Perhubungan		972.457.500,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Bertambah dari barang dan jasa untuk belanja perencanaan Rp 64.700.000,00 Pengawasan Rp 39.875.000 dan pemeliharaan gedung dan bangunan Rp99.800.000	204.375.000,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
5	Sekretariat DPRD	Bertambah dari reklas belanja pemeliharaan gedung dan kantor terdiri dari : 1 Bangunan gedung kantor Rp3.825.526.917,00 2 Bangunan garasi / pool Rp149.700.000,00 3 Rumah Negara Golongan I Rp649.491.500,00	4.624.718.417,00
6	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Bertambah dari reklas belanja pemeliharaan gedung dan kantor 1 Gedung kantor Rp 124.500.000 2 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp24.617.510	149.117.510,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bertambah dari belanja pemeliharaan Rp176.087.091,00, Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Jasa Nasihat Rp10.836.128 dan Konsultansi Jasa Rekayasa Kontruksirjaan Kontruksi Bangunan Gedung Rp 4.770.558,00	191.693.777,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan	Bertambah dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	49.500.000,00
Jumlah			7.584.537.274,00

Bertambah dari – Utang Pengadaan**Tabel 127: Bertambah dari – Utang Pengadaan**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Utang Jangka Pendek /Sisa Pemby Retensi Pengadaan Tahun 2023 Bangunan gedung dan bangunan (Pembangunan / Peningkatan Halaman Rujab Bupati Kapuas	287.098.405,00
Jumlah			287.098.405,00

Pengurangan – Penghapusan**Tabel 128: Mutasi Kurang – Penghapusan**

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.208.150.000,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	313.242.000,00
JUMLAH		1.521.392.000,00

Pengurangan - Pindah Ruang / KIB**Tabel 129: Reklas Kurang Pindah Ruang/ KIB**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1. Kurang di reklas ke KIB A (aset tanah) Rp701.000.000,00 2 Kurang di reklas ke KIB F (Konstruksi dalam pengerjaan) Rp 1.035.405.000,00	1.736.405.000,00
2	Dinas Kesehatan	1. Berkurang di reklas ke KIB A (Aset tanah)	36.048.987.000,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
		Rp450.987.000,00 2 Berkurang di reklas ke KIB F (Konstruksi dalam pengerjaan Rp 35.598.000.000,00	
3	Dinas Pertanian	Berkurang direklas ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	866.962.000,00
4	Kecamatan Selat	Berkurang Belanja Modal Gedung dan Bangunan reklas ke Kontruksi dalam Pengerjaan (KIB F)	150.000.000,00
		Jumlah	38.802.354.000,00

Pengurangan - Hibah

Pengurangan karena Hibah

Merupakan bangunan gedung sekolah yang dihibahkan ke Sekolah Swasta melalui Dinas Pendidikan sebesar Rp864.510.000,00.

7.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.249.015.735.792,46	3.816.609.483.979,46

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.249.015.735.792,46 mengalami peningkatan sebesar Rp432.406.251.813,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 130: Peningkatan Saldo Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Jalan, Jaringan dan irigasi	4.249.015.735.792,46	3.816.609.483.979,46	11,33	432.406.251.813,00
Jumlah	4.249.015.735.792,46	3.816.609.483.979,46	11,33	432.406.251.813,00

Mutasi Aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 131: Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		3.816.609.483.979,46
2	Pertambahan		
	Pengadaan Belanja Modal Tahun 2023	312.313.886.972,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset	177.563.225.845,00	
	Belanja melalui Dana BOS	95.002.000,00	
	Dari Reklas Barang dan Jasa Tahun 2023	3.910.560.666,00	
	Utang Pengadaan	46.561.052.055,00	
	Jumlah Pertambahan		540.443.727.538,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	158.500.000,00	
	Reklas Aset Pindah antar Ruang Aset	107.878.975.725,00	
	Jumlah Pengurangan		108.037.475.725,00
4	Saldo Akhir		4.249.015.735.792,46

Pertambahan - Pengadaan Belanja Modal

Pengadaan Belanja Modal

Penambahan berasal dari Belanja Modal sesuai dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada TA 2023 sebesar Rp312.313.886.972,00

Tabel 132: Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Perangkat Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan
1	Dinas Kesehatan	3.163.700.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	304.928.574.277,00
3	Dinas Perhubungan	3.273.826.200,00
4	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	174.567.400,00
5	Dinas Perikanan	199.000.000,00
6	Dinas Pertanian	13.229.455,00
7	Kecamatan Kapuas Hilir	311.346.000,00
8	Kecamatan Kapuas Murung	50.000.000,00
9	Kecamatan Bataguh	150.000.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.643.640,00
JUMLAH		312.313.886.972,00

Penambahan - Pindah Ruang / KIB

Tabel 133: Reklas Pindah Ruang/ KIB

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bertambah dari reklas aset Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) 1. Peningkatan Jalan Mantangai - Timpah Paket 1 (Multy Years) Rp 66.480.162.440 2. Peningkatan Jalan Mantangai - Timpah Paket 2 (Multy Years) Rp 66.823.177.760 3 KDP Pekj. Jalan dan Jembatan Th. 2022 yang Sudah selsai Fisik/Serahterima Tahun 2023 (8 Pkt * Jembatan pada jalan Kabupaten (2 pkt) Rp16.525.391.365 *Jalan Kabupaten (8 pkt) Rp 26.588.832.480	176.417.564.045,00
2	Dinas Pertanian	Bertambah dari reklas aset KIB C (Gedung dan Bangunan)	866.962.000,00
3	Kecamatan Kapuas Hilir	Bertambah dari aset peralatan dan mesin (KIB B) belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023	213.699.800,00
4	Kecamatan Kapuas Murung	Bertambah dari aset peralatan dan mesin (KIB B) belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023	65.000.000,00
JUMLAH			177.563.225.845,00

Pertambahan – Reklas dari Belanja barang dan jasa Dana BOS

Belanja Barang dan Jasa Dana Bos

Penambahan aset jalan dan jaringan berasal dari reklas belanja barang dan jasa dana BOS Sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas TA 2023 sesuai senilai Rp95.002.000,00.

Pertambahan – Reklas dari Belanja Barang dan Jasa selain dari Dana BOS

Tabel 134: Tambah dari Belanja Barang dan Jasa

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Bertambah dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	33.119.292,00
2	RSUD Dr. H. Sowarno Sosroadmotjo	Instalasi Gardu Listrik Distribusi : 1. Belanja alat listrik Rp. Rp1.448.200.000 2 Barjas Perencanaan Arsitektur Lainnya Rp29.831.250,00 3 Barjas Pengawasan Arsitektur Rp20.873.450,00 Jaringan Distribusi : Mutasi Tambah KIB D Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Belanja Kegiatan Alat Listrik Pengadaan Tahun 2023 Rp93.323.250	1.592.227.950,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
3	Dinas Perhubungan	JARINGAN LISTRIK LAINNYA dari Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	1.249.320.448,00
4	Sekretariat DPRD	JALAN KHUSUS bertambah dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	959.737.977,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gedung Tempat Kerja - 69.954.865 2. Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung Rp 4.304.915 3 Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Kontruksi Rp 1.895.220	76.154.999,00
Jumlah			3.910.560.666,00

Pertambahan – Utang Pengadaan**Pertambahan Utang Pengadaan**

Penambahan aset Jalan, jaringan dan irigasi untuk utang pengadaan terdapat di Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Pemukiman dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 46.561.052.055,00. (Jalan Kabupaten Rp44.225.372.950,00; Jalan Kabupaten dan jembatan Rp 2.267.829.105,00; Jalan Desa Rp14.960.000,00; dan Bangunan Pengaman Irigasi Rp 52.890.000,00)

Pengurangan - Penghapusan**Tabel 135: Kurang Aset - Penghapusan**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1 Jembatan dan jalan Rp 15.000.000,00 2. Jalan Desa Rp 45.000.000,00	60.000.000,00
2	Dinas Perikanan	Bangunan Pengaman Pasang Surut	98.500.000,00
Jumlah			158.500.000,00

Pengurangan - Pindah Ruang / KIB**Tabel 136: Mutasi kurang Pindah Ruang/ KIB**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Reklas pindah ruang ke KIB D (Aset jalan, jaringan dan irigasi) ke aset Konstruksi dalam Pengerjaan	107.878.975.725,00
JUMLAH			107.878.975.725,00

7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	9.776.093.547,52	9.777.242.244,52

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.776.093.547,52 berkurang sebesar Rp1.148.697,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 137: Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		9.777.242.244,52
2	Pertambahan		
	Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	509.512.370,00	
	Reklas / pindah Ruang	0,00	
	Belanja melalui Dana BOS	10.971.810,00	
	Belanja melalui Dana BLUD		
	Hibah	0,00	

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Koreksi	0,00	
	Jumlah Pertambahan		
3	Pengurangan		
	Penghapusan	20.612.007,00	
	Reklas / pindah Ruang	467.980.870,00	
	Hibah	33.040.000,00	
	Koreksi	0,00	
	Jumlah Pengurangan		
4	Saldo Akhir		9.776.093.547,52

Pertambahan - Pengadaan Belanja Modal

Penambahan berasal dari Belanja Modal sesuai dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2023 sebesar Rp509.512.370,00

Tabel 138: Tambah dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

NO	SOPD	ASET TETAP LAINNYA
1	Dinas Pendidikan	147.940.000,00
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.491.500,00
3	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	41.500.000,00
4	Dinas Pertanian	24.786.300,00
5	Sekretariat Daerah	31.461.100,00
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	135.000.000,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	113.833.470,00
8	Kecamatan Kapuas Kuala	6.500.000,00
JUMLAH		509.512.370,00

Pertambahan - Pengadaan dari Belanja BOS

Penambahan aset tetap lainnya berasal dari reklas belanja barang dan jasa BOS Sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas TA. 2023 sesuai senilai Rp10.971.810,00

Pengurangan– Penghapusan Aset

Pengurangan karena penghapusan Aset Tetap Lainnya di Tahun Anggaran 2023 terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp20.612.007,00

Pengurangan– Reklas / Pindah Ruang KIB

Pengurangan berasal Reklas / Pindah Ruang KIB Aset Tetap Lainnya sebesar Rp467.980.870,00 sebagai berikut;

Tabel 139: Mutasi Kurang Pindah/ KIB

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1. Reklas ke KIB B(peralatan dan mesin) Rp 99.900.000,00 2. Reklas dari Aset Tetap lainnya ke Aset Tak berwujud (SOFTWARE) Rp15.000.000,00	114.900.000,00
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	Berkurang di reklas ke KIB G (Aset tidak berwujud) berupa SOFTWARE	41.500.000,00
3	Dinas Pertanian	Berkurang direklas ke KIB B (Peralatan dan mesin) peralatan rumah tangga lainnya (home house)	24.786.300,00
4	Sekretariat Daerah	Berkurang direklas ke Aset Tidak Berwujud (KIB G) berupa Lisensi dan Frenchise	31.461.100,00
5	Badan Pengelola	Berkurang di reklas ke KIB G (Aset tidak	135.000.000,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
	Keuangan dan Aset	berwujud) berupa SOFTWARE	
6	Kecamatan Kapuas Kuala	Berkurang direklas ke KIB B (Peralatan dan mesin) peralatan rumah tangga lainnya (home house)	6.500.000,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Berkurang di reklas ke KIB G (Aset tidak berwujud) berupa Aplikasi Perhitungan TPPn(SOFTWARE) Rp98.874.470 2. Berkurang di reklas ke KIB G*Aset Tidak berwujud yaitu Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIAPKa) , (SOFTWARE) Rp 14.959.000	113.833.470,00
	Jumlah		467.980.870,00

Pengurangan– Hibah

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp33.040.000,00 merupakan hibah berupa buku pelajaran ke Sekolah Swasta melalui Dinas Pendidikan tahun 2023

7.5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	246.469.078.099,00	254.957.450.223,00

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp246.469.078.099,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.488.372.124,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 140: Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		254.957.450.223,00
2	Pertambahan		
	Reklas / pindah Ruang pencatatan	144.761.380.725,00	
	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	1.307.376.200,00	
	Utang Pengadaan	69.587.199.275,00	
	Jumlah Pertambahan		215.655.956.200,00
3	Pengurangan		
	Reklas / pindah Ruang	224.144.328.324,00	
	Jumlah Pengurangan		224.144.328.324,00
4	Saldo Akhir		246.469.078.099,00

Pertambahan – Reklas/ Pindah Ruang / KIB

Tabel 141: Mutasi Tambah Pindah ruang / KIB

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Reklas dari KIB C (Aset Gedung dan bangunan)	1.035.405.000,00
2	Dinas Kesehatan	Reklas dari KIB C (Aset Gedung dan bangunan)	35.598.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Reklas dari KIB D (Aset jalan, jaringan dan irigasi)	107.878.975.725,00
4	Sekretariat Daerah	Reklas dari KIB B (Aset peralatan dan mesin)	99.000.000,00
	Kecamatan Selat	Reklas dari KIB C (Aset Gedung dan bangunan)	150.000.000,00
	Jumlah		144.761.380.725,00

Pertambahan – Reklas dari Belanja Barang dan Jasa**Tabel 142: Mutasi Tambah dari Barang dan Jasa**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Bertambah dari Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.087.060.000,00
2	Dinas Perhubungan	Bertambah dari barang dan jasa: 1. Jasa Perencanaan Konstruksi pembangunan gedung terminal / pelabuhan bandaran desa Palampai Rp 28.116.200,00 2. Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi pembangunan gedung terminal / pelabuhan bandaran desa Palampai Rp 192.200.000,00	220.316.200,00
Jumlah			1.307.376.200,00

Pertambahan – Utang Pengadaan**Pertambahan Utang Pengadaan**

Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk utang pengadaan terdapat di Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Pemukiman dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp69.522.719.275,00;

Pengurangan - Pindah Ruang / KIB

Aset tetap Konstruksi dalam pengerjaan berkurang karena reklas antar aset disesuaikan dengan kondisi aset dengan rincian sebagai berikut ;

Pengurangan – Rekla/ Pindah Ruang / KIB**Tabel 143: Mutasi kurang Pindah ruang / KIB**

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Berkurang di reklas ke KIB C (Gedug dan Bangunan)	106.057.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Berkurang direklas ke KIB C (Gedung dan bangunan) Rp 41.195.238.534,00 dan KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi) Rp 176.417.564.045,00	217.612.802.579,00
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Berkurang reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) ke KIB C -Bangunan Peninggalan Rp21.000.000,00 dan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang Rp.31.025.000,00	52.025.000,00
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Berkurang reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) ke KIB C - Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	231.084.000,00
	Kecamatan Timpah	Berkurang reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) ke KIB C - Bangunan Gedung Kantor Rp190.000.000,00 dan Aset lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang Rp495.082.100,00	685.872.100,00
	Kecamatan Tamban Catur	Berkurang reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) ke KIB C - Rumah Negara Golongan II Rp495.290.000,00 dan Bangunan Gedung Kantor Rp199.750.000,00	695.040.000,00
	Kecamatan Kapuas Hulu	Berkurang reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) ke KIB C – Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan	34.743.500,00
	Kecamatan Kapuas Tengah	Berkurang reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) ke KIB C – Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.267.651.645,00
	Kecamatan Pasak Talawang	Berkurang reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) ke KIB C – Rumah Negara Golongan I Rp 746.677.000,00 dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp697.475.000,00	1.439.652.000,00

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
		Jumlah	224.144.328.324,00

7.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (2.951.024.208.164,79)	31 Desember 2022 (2.571.967.203.435,30)
----------------------	--	--

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp2.951.024.208.164,79) mengalami peningkatan sebesar (Rp379.057.004.729,49) dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Saldo Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 berasal dari penambahan dan pengurangan penyusutan di tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 144: Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		(2.571.967.203.435,30)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(386.124.151.980,14)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	(278.211.582.607,16)	
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.907.631.468.848,00)	
2	Pertambahan		
	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(61.567.550.448,64)	
	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(28.636.289.165,00)	
	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	(288.097.857.225,00)	
	Koreksi penyusutan peralatan dan mesin	(0,85)	
	Koreksi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	(4.864.784.955,00)	
	Jumlah Pertambahan		(383.166.481.794,49)
3	Pengurangan		
	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	(3.582.813.682,00)	
	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Gedung & bangunan	(456.172.550,00)	
	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	(70.490.833,00)	
	Jumlah Pengurangan		(4.109.477.065,00)
4	Saldo Akhir		(2.951.024.208.164,79)

Pertambahan -Penyusutan Aset Tetap Bertambah dari Beban Penyusutan.

Tabel 145: Beban Penyusutan per SKPD

No	Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	27.383.751.556,00	23.959.516.519,63
2	Dinas Kesehatan	18.058.809.621,00	14.356.961.959,00
3	RSUD DR. H. Soewarno Sosroatmodjo	8.740.486.686,64	8.443.201.411,00
4	BLUD DR. H. Soewarno Sosroatmodjo	535.613.634,00	395.785.187,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	284.706.914.027,00	218.253.262.159,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.869.889.518,00	439.065.772,00
8	Dinas Sosial	355.920.847,00	309.724.409,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.498.841.645,00	4.769.578.182,00
10	Dinas Tenaga Kerja	107.541.633,00	112.054.011,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	494.326.864,00	622.160.786,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	114.273.214,00	42.687.077,00

No	Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.669.187.097,00	1.457.620.343,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	295.200.358,00	271.474.390,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	149.035.383,00	184.116.712,00
16	Dinas Perhubungan	2.624.050.323,00	7.190.208.133,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	575.466.481,00	729.562.017,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	268.808.804,00	224.965.895,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	620.535.730,00	576.264.220,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	284.233.955,00	217.672.718,00
21	Dinas Perikanan	904.146.763,00	656.721.174,00
22	Dinas Pertanian	1.993.845.772,00	1.586.975.427,00
23	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.926.561.868,00	1.975.289.529,00
24	Dinas Transmigrasi	1.446.296.016,00	1.542.656.552,00
25	Sekretariat Daerah	7.212.330.190,00	3.252.448.651,00
26	Sekretariat DPRD	2.846.223.400,00	2.236.362.132,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	432.801.783,00	395.827.378,00
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.812.348.445,00	864.672.636,00
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	403.843.966,00	322.997.049,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	545.477.971,00	423.636.474,00
33	Inspektorat Daerah	288.576.070,00	190.511.586,00
34	Kecamatan Kapuas Barat	224.925.677,00	174.842.638,00
35	Kecamatan Pulau Petak	123.382.052,00	98.001.539,00
36	Kecamatan Kapuas Kuala	133.907.550,00	87.472.565,00
37	Kecamatan Kapuas Hulu	314.793.738,00	171.809.846,00
38	Kecamatan Selat	594.879.099,00	477.657.656,00
39	Kecamatan Kapuas Hilir	460.493.773,00	287.612.719,00
40	Kecamatan Kapuas Timur	124.296.091,00	75.228.504,00
41	Kecamatan Basarang	127.856.380,00	86.127.345,00
42	Kecamatan Mantangai	210.914.334,00	127.434.978,00
43	Kecamatan Kapuas Tengah	394.936.276,00	115.145.180,00
44	Kecamatan Kapuas Murung	268.524.645,00	184.974.152,00
45	Kecamatan Timpah	223.162.867,00	216.248.613,00
46	Kecamatan Bataguh	163.793.944,00	136.485.862,00
47	Kecamatan Tamban Catur	136.373.766,00	100.605.352,00
48	Kecamatan Dadahup	138.700.071,00	103.413.522,00
49	Kecamatan Pasak Talawang	139.257.704,00	85.162.234,00
50	Kecamatan Mandau Talawang	126.590.084,00	141.646.865,00
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	228.406.709,00	143.793.185,00
	Jumlah	378.301.696.838,64	298.817.643.243,63

Penambahan – Koreksi

Penambahan akumulasi penyusutan dari koreksi tahun 2023 sebesar (Rp0,85) untuk koreksi penyusutan peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan koreksi sebesar (Rp4.864.784.955,00) untuk koreksi penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan;

Pengurangan – Penghapusan Akumulasi Penyutan Aset Tetap**Tabel 146: Pengurangan Penghapusan Akumulasi Penyutan Aset Tetap**

No	Perangkat Daerah	Akumulasi Penyusutan 2023			2023 (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	Dinas Pendidikan	(153.775.452,00)	(343.405.430,00)	(48.000.000,00)	(545.180.882,00)
2	Dinas Kesehatan	(184.023.810,00)	-	-	(184.023.810,00)

No	Perangkat Daerah	Akumulasi Penyusutan 2023			2023 (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	(9.000.000,00)	-	-	(9.000.000,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(390.056.000,00)	-	-	(390.056.000,00)
5	Dinas Ketahanan Pangan	(48.018.750,00)	-	-	(48.018.750,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup	(308.900.000,00)	-	-	(308.900.000,00)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(313.680.000,00)	-	-	(313.680.000,00)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(231.016.000,00)	-	-	(231.016.000,00)
9	Dinas Perhubungan	(83.994.500,00)	-	-	(83.994.500,00)
10	Dinas Perikanan	(143.555.000,00)	-	(22.490.833,00)	(166.045.833,00)
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(194.322.716,00)	-	-	(194.322.716,00)
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(734.241.454,00)	(112.767.120,00)	-	(847.008.574,00)
13	Inspektorat Daerah	(81.480.000,00)	-	-	(81.480.000,00)
14	Kecamatan Kapuas Kuala	(211.350.000,00)	-	-	(211.350.000,00)
15	Kecamatan Kapuas Tengah	(338.000.000,00)	-	-	(338.000.000,00)
16	Kecamatan Bataguh	(157.400.000,00)	-	-	(157.400.000,00)
Jumlah		(3.582.813.682,00)	(456.172.550,00)	(70.490.833,00)	(4.109.477.065,00)

Akumulasi Penyusutan tersebut tidak termasuk akumulasi penyusutan sebagai dampak Pemerintah Kabupaten Kapuas belum menerapkan penambahan masa manfaat dan Kebijakan Akuntansi atas atribusi aset tetap ke aset induknya senilai Rp433.966.469.193,00

7.5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	805.354.532.129,44	61.282.058.798,02

Nilai saldo Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp805.354.532.129,44 terdiri Tagihan Jangka Panjang, Aset Tak berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Dibandingkan dengan saldo aset Lainnya sebelumnya terdapat kenaikan sebesar Rp726.628.818.216,33 yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 147: Rincian Aset lainnya

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Tagihan Jangka Panjang	21.892.576.110,76	4.989.928.095,67	338,74	16.902.648.015,09
Aset Tidak Berwujud (broto)	20.821.292.603,00	20.162.109.533,00	3,27	659.183.070,00
Akumulasi Amortisasi aset Tidak Berwujud	(17.844.281.593,00)	(16.262.202.470,33)	9,73	(1.582.079.122,67)
Aset Lain-Lain (Netto)	15.094.109.008,68	15.329.073.348,68	(1,53)	(234.964.340,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	765.390.836.000,00	37.063.150.291,00	1965,10	728.327.685.709,00
Jumlah	802.908.168.061,44	61.282.058.798,02	1210,18	741.626.109.263,42

Dari saldo tersebut, senilai Rp2.446.364.068,00 merupakan saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan. Saldo tersebut ditetapkan melalui pembebanan kerugian negara sementara. Namun, BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang saldo tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas.

7.5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	21.892.576.110,76	4.989.928.095,67

Tagihan Jangka Panjang merupakan Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp19.446.212.042,76 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

7.5.3.1.4.1.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tabel 148: Tagihan Jangka Panjang Daerah - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Uraian	Perangkat Daerah	2023Rp	2022Rp
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	4.941.968.095,67
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	Sekretariat Daerah	2.494.324.068,00	47.960.000,00
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	19.398.252.042,76	
Jumlah			21.892.576.110,76	4.989.928.095,67

7.5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud (Bruto)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	20.821.292.603,00	20.162.109.533,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.821.292.603,00 merupakan saldo aset tak berwujud yang disajikan secara *bruto*, mengalami kenaikan sebesar Rp659.183.070,00 dari saldo tahun sebelumnya.

Tabel 149: Rincian Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Tidak Berwujud (Bruto)	20.821.292.603,00	20.162.109.533,00	3,27%	659.183.070,00
Jumlah	20.821.292.603,00	20.162.109.533,00	3,27%	659.183.070,00

Aset Tak Berwujud untuk masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan adalah sebagai berikut.

Tabel 150: Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

No	Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
----	------------------	-----------	-----------

No	Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	248.471.200,00	233.471.200,00
2	Dinas Kesehatan	249.850.000,00	249.850.000,00
3	RSUD DR. H.Soewarno Sosroatmodjo	219.892.000,00	219.892.000,00
4	BLUD DR. H.Soewarno Sosroatmodjo	6.244.000,00	6.244.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.833.772.000,00	11.833.772.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	35.750.000,00	35.750.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	346.960.000,00	346.960.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.000.000,00	40.000.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	175.945.000,00	175.945.000,00
11	Dinas Perhubungan	1.742.540.500,00	1.742.540.500,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	73.500.000,00	73.500.000,00
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	183.455.000,00	183.455.000,00
14	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	41.500.000,00	-
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.852.800,00	32.852.800,00
16	Dinas Pertanian	7.975.000,00	7.975.000,00
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	6.500.000,00	6.500.000,00
18	Sekretariat Daerah	341.721.100,00	310.260.000,00
19	Sekretariat DPRD	20.000.000,00	20.000.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.940.924.783,00	2.718.536.283,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	381.710.750,00	146.710.750,00
22	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.291.600.000,00	1.291.600.000,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	458.568.470,00	344.735.000,00
24	Kecamatan Selat	8.500.000,00	8.500.000,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93.060.000,00	93.060.000,00
Jumlah		20.821.292.603,00	20.162.109.533,00

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 berasal dari penambahan aset yaitu dari belanja modal aset, reklasifikasi, dan pengurangan yang berasal dari penghapusan yang disesuaikan dengan mutasi tambah kurang amortisasi aset tidak berwujud dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 151: Mutasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal		20.162.109.533,00
+/- Penambahan		
-Belanja modal Tahun 2023	100.000.000,00	

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
- Reklas Pindah Ruang /KIB	336.794.570,00	
- Reklas dari Barang dan Jasa Tahun	222.388.500,00	
Jumlah Pertambahan		659.183.070,00
Pengurangan		
Reklas Pindah Ruang		
Jumlah pengurangan		0,00
Saldo Akhir		20.821.292.603,00

Pertambahan – Pengadaan**Mutasi Tambah – Pengadaan**

Mutasi tambah dari Belanja Modal Tahun 2023 terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp100.000.000,00

Pertambahan - Pindah Ruang / KIB

Tabel 152: Pengurangan – Reklas Pindah Ruang Aset (KIB)

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Bertambah dari reklas aset tetap lainnya (KIB E) Software	15.000.000,00
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	Bertambah dari reklas aset tetap lainnya (KIB E) Software	41.500.000,00
3	Sekretariat Daerah	Bertambah dari reklas aset tetap lainnya (KIB E) Software	31.461.100,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bertambah dari reklas aset tetap lainnya (KIB E) Software	135.000.000,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bertambah dari reklas aset tetap lainnya (KIB E) merupakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIAPKa) , (SOFTWARE)	113.833.470,00
Jumlah			336.794.570,00

Pertambahan – Reklas Belanja Barang dan Jasa**Bertambah dari Reklas Barag dan Jasa**

Aset Tidak Berwujud bertambah dari belanja barang dan jasa sebesar Rp222.388.500,00 terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan belanja Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Kajian).

7.5.3.1.4.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp17.844.281.593,00) dan (Rp16.262.202.470,33) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 per SOPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 153: Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

No	Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(194.797.942,00)	(148.826.400,00)
2	Dinas Kesehatan	(206.516.667,00)	(166.516.667,00)
3	RSUD DR. H. Soewarno Sosroatmodjo	(219.892.000,00)	(215.878.467,00)
4	BLUD DR. H. Soewarno Sosroatmodjo	(1.977.267,00)	(728.467,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	(11.241.047.000,00)	(10.386.694.000,00)
6	Dinas Tenaga Kerja	(40.000.000,00)	(40.000.000,00)
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(10.725.000,00)	(3.575.000,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup	(320.677.333,00)	(264.317.000,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(40.000.000,00)	39.666.667,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(175.945.000,00)	(175.945.000,00)
11	Dinas Perhubungan	(1.679.038.200,00)	(1.647.754.000,00)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(73.091.667,00)	(64.808.333,00)
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(183.037.917,00)	(169.828.751,00)
14	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	(1.383.334,00)	0,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(9.358.440,00)	(3.359.880,00)
16	Dinas Pertanian	(7.975.000,00)	(7.975.000,00)
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	(1.516.667,00)	(216.667,00)
18	Sekretariat Daerah	(310.784.351,00)	(10.260.000,00)
19	Sekretariat DPRD	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.730.703.063,00)	(1.450.001.323,33)
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(121.663.998,00)	(91.135.181,00)
22	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	(983.150.000,00)	(858.700.000,00)
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	(15.970.747,00)	(159.597.667,00)

No	Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Sumber Daya Manusia		
24	Kecamatan Selat	(8.500.000,00)	(8.500.000,00)
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(46.530.000,00)	(27.918.000,00)
	Jumlah	(17.844.281.593,00)	(16.262.202.470,33)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud dalam Tabel per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 154: Mutasi Akumulasi amortisasi Aset per SKPD

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal		(16.262.202.470,33)
+/- Pertambahan		
- Beban Amortisasi	(1.582.079.123,00)	
Jumlah Pertambahan		(1.582.079.123,00)
Koreksi	(0,33)	
Jumlah Pengurangan		(0,33)
Saldo Akhir	0,00	(17.844.281.593,00)

Bertambah - Beban Amortisasi masing-masing Perangkat Daerah

Tabel 155: Tambah dari Beban Amortisasi per SKPD

No	Perangkat Daerah	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	45.971.542,00
2	Dinas Kesehatan	40.000.000,00
3	RSUD DR. H. Soewarno Sosroatmodjo	4.013.533,00
4	BLUD DR. H. Soewarno Sosroatmodjo	1.248.800,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	854.353.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.150.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	56.360.333,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.333,00
9	Dinas Perhubungan	31.284.200,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.283.334,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.209.166,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	1.383.334,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.998.560,00
14	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.300.000,00
15	Sekretariat Daerah	524.351,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	280.701.740,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30.528.817,00
18	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	124.450.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.373.080,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.612.000,00
	Jumlah	1.582.079.123,00

Berkurang – Koreksi

Berkurang karena Koreksi

Koreksi atas saldo awal amortisasi sebesar (Rp0,33) terdapat pada amortisasi aset tidak berwujud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

7.5.3.1.4.4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
----------------	------------------	------------------

15.094.109.008,68

15.329.073.348,68

Aset lain-lain merupakan aset yang rusak berat, pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 tersaji dengan *jumlah Netto*; untuk jumlah aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp15.098.609.008,68 dan Rp15.329.073.348,68 Aset lain-lain (aset rusak berat) per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 156: Rincian Aset lain-lain

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain (Netto)	15.094.109.008,68	15.329.073.348,68	(1,50)	(230.464.340,00)

Tabel 157: Mutasi Aset Lain-lain

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal		15.329.073.348,68
Aset Lain-lain (Broto)	29.046.047.947,68	
Akumulasi Aset Lain-lain	(13.716.974.599,00)	
Pertambahan:		
Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	541.007.100,00	
Koreksi penyusutan aset lain-lain	(651.000,00)	
Jumlah bertambah		540.356.100,00
Pengurangan:		
Penghapusan Aset Lain-lain	1.212.827.500,00	
Reklas pindah ruang aset	377.994.807,00	
Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(815.501.867,00)	
Jumlah Pengurangan		2.406.324.174,0
Saldo Akhir Aset Lain-Lain		15.094.109.008,68

Saldo Awal –Saldo Awal Aset Lain-Lain

Tabel 158: Saldo Awal Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)

NO.	Perangkat Daerah	Saldo Awal Aset Lain-Lain		Aset Lain –Lain (Netto)
		Aset Lain-Lain (Broto)	Akumulasi Penyusutan	
1	Dinas Pendidikan	11.711.441.114,68	86.735.154,00	11.624.705.960,68
2	Dinas Kesehatan	673.448.636,00	658.380.990,00	15.067.646,00
3	RSUD DR. H.Soewarno Sosroatmodjo	277.000.000,00	277.000.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.775.385.996,00	1.251.833.450,00	523.552.546,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	51.030.000,00	21.989.716,00	29.040.284,00
6	Dinas Sosial	138.585.750,00	120.634.584,00	17.951.166,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.651.000,00	29.000.000,00	651.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja	678.831.383,00	366.367.589,00	312.463.794,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	89.086.000,00	63.324.417,00	25.761.583,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.487.725.000,00	2.105.567.689,00	382.157.311,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	226.964.500,00	226.392.563,00	571.937,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	244.868.200,00	205.951.609,00	38.916.591,00

NO.	Perangkat Daerah	Saldo Awal Aset Lain-Lain		Aset Lain –Lain (Netto)
		Aset Lain-Lain (Bromo)	Akumulasi Penyusutan	
13	Dinas Perhubungan	908.045.500,00	379.794.984,00	528.250.516,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	568.700.176,00	125.534.408,00	443.165.768,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	422.818.565,00	422.818.565,00	0,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	160.334.050,00	158.505.926,00	1.828.124,00
17	Dinas Perikanan	725.248.250,00	554.815.748,00	170.432.502,00
18	Dinas Pertanian	1.278.096.000,00	1.255.301.000,00	22.795.000,00
19	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	358.935.000,00	334.860.475,00	24.074.525,00
20	Dinas Transmigrasi	648.362.040,00	610.075.843,00	38.286.197,00
21	Sekretariat Daerah	1.048.981.518,00	995.141.064,00	53.840.454,00
22	Sekretariat DPRD	200.933.044,00	184.059.694,00	16.873.350,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	183.427.300,00	183.302.716,00	124.584,00
24	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	633.830.000,00	167.499.550,00	466.330.450,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	267.450.925,00	257.771.608,00	9.679.317,00
26	Inspektorat Daerah	97.129.000,00	97.129.000,00	0,00
27	Kecamatan Kapuas Barat	208.358.250,00	171.370.127,00	36.988.123,00
28	Kecamatan Pulau Petak	117.174.000,00	116.532.333,00	641.667,00
29	Kecamatan Kapuas Kuala	155.386.750,00	149.999.283,00	5.387.467,00
30	Kecamatan Kapuas Hulu	214.942.000,00	212.879.500,00	2.062.500,00
31	Kecamatan Selat	93.983.500,00	91.428.896,00	2.554.604,00
32	Kecamatan Kapuas Hilir	200.241.500,00	176.000.165,00	24.241.335,00
33	Kecamatan Kapuas Timur	157.338.500,00	124.448.762,00	32.889.738,00
34	Kecamatan Basarang	21.285.000,00	21.285.000,00	0,00
35	Kecamatan Mantangai	156.321.500,00	156.321.500,00	0,00
36	Kecamatan Kapuas Tengah	482.053.000,00	153.713.957,00	328.339.043,00
37	Kecamatan Kapuas Murung	560.846.350,00	462.836.351,00	98.009.999,00
38	Kecamatan Timpah	276.643.450,00	275.826.783,00	0,00
39	Kecamatan Bataguh	58.690.000,00	57.525.667,00	1.164.333,00
40	Kecamatan Dadahup	131.511.700,00	108.658.102,00	22.853.598,00
41	Kecamatan Pasak Talawang	173.307.500,00	169.734.292,00	3.573.208,00
42	Kecamatan Mandau Talawang	94.806.500,00	94.301.739,00	504.761,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	56.849.500,00	34.323.800,00	22.525.700,00
Jumlah		29.046.047.947,68	13.716.974.599,00	15.329.073.348,68

Pertambahan – Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain**Tambah Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)**

Koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2023 sebesar Rp651.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pengurangan – Penghapusan Aset Lain-Lain**Tabel 159: Kurang Penghapusan Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)**

No	Perangkat Daerah	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	12.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	644.900.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.000.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.512.500,00

No	Perangkat Daerah	2023 (Rp)
5	Dinas Perhubungan	20.083.500,00
6	Dinas Perikanan	414.701.500,00
7	Inspektorat	70.630.000,00
	Jumlah	1.212.827.500,00

Pengurangan – Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain**Tabel 160: Kurang Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)**

No	Perangkat Daerah	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	12.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	282.950.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.916.667,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.512.500,00
5	Dinas Perhubungan	20.083.500,00
6	Dinas Perikanan	386.409.200,00
7	Inspektorat	70.630.000,00
	Jumlah	815.501.867,00

Pertambahan - Pindah Ruang / KIB

Penambahan Aset Lain-Lain (Aset rusak berat) tahun 2023 sebesar Rp521.607.100,00 terdapat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 161: Penambahan Aset Lain-Lain

No	Perangkat Daerah	Uraian	2023 (Rp)
1	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Bangunan Peninggalan (Betang di Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir)	31.025.000,00
2	Kecamatan Timpah	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan.	495.082.100,00
3	Kecamatan	Tugu/Tanda Batas-Pagar	14.900.000,00
	Jumlah		541.007.100,00

Pengurangan - Pindah Ruang / KIB**Pengurangan – Reklas Pindah Ruang Aset (KIB)**

Pengurangan Aset Lain-Lain (Aset rusak berat) tahun 2023 sebesar Rp377.994.807,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Reklas ke KIB C BANGUNAN GEDUNG KANTOR karena Proses rehab.

7.5.3.1.4.5. Dana Transfer Treasury Deposit Facility

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	765.390.836.000,00	37.063.150.291,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp765.390.836.000,00 merupakan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 masih belum diterima di Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas;

7.5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	204.169.859.524,70	110.546.349.028,37

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp204.169.859.524,70 mengalami kenaikan sebesar Rp93.623.510.496,33 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Tabel 162: Rincian Kewajiban

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)
Kewajiban Jangka Pendek	168.339.748.198,26	32.493.860.254,80	135.845.887.943,46
Kewajiban Jangka Panjang	35.830.111.326,44	78.052.488.773,57	(42.222.377.447,13)
Jumlah	204.169.859.524,70	110.546.349.028,37	93.623.510.496,33

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban	Jangka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendek		168.339.748.198,26	32.493.860.254,80

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.339.748.198,26 mengalami kenaikan sebesar Rp135.845.887.943,46 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Tabel 163: Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	81.588.601,00	81.588.601,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	28.986.961.308,26	15.751.545.170,26	84,03	13.235.416.138,00
Pendapatan Diterima Dimuka	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
Utang Belanja	139.270.550.289,00	16.659.101.483,54	736,00	122.611.448.805,46
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	1.625.000,00	100	(1.625.000,00)
Jumlah	168.339.748.198,26	32.493.860.254,80	413,88	135.845.887.943,46

7.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	81.588.601,00	81.588.601,00

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah Rp81.588.601,00 atau dan 31 Desember 2022 adalah Rp81.588.601,00;

7.5.3.2.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	28.986.961.308,26	15.751.545.170,26

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.986.961.308,26 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 164: Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	2.516.129.032,26	2.516.129.032,26	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	26.470.832.276,00	13.235.416.138,00	100	13.235.416.138,00
Jumlah	28.986.961.308,26	15.751.545.170,26	0,00	13.235.416.138,00

7.5.3.2.1.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	648.000,00	0,00

Jumlah Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp648.000,00 dan Rp0,00 yang bersumber dari wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sewa rumah dinas melalui Sekretariat Daerah.

7.5.3.2.1.4. Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	139.270.550.289,00	16.660.726.483,54

Saldo utang belanja yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp139.270.550.289,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.235.416.138,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Tabel 165: Rincian Utang Belanja per SKPD

Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	1.151.586.559,00	1.309.601.340,00
Dinas Kesehatan	15.937.403.963,00	10.454.572.185,54
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	116.973.217.474,00	345.517.182,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	208.421.751,00	169.517.657,00
Dinas Sosial	4.615.780,00	99.905.267,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73.749.873,00	78.068.595,00
Dinas Tenaga Kerja	35.564.057,00	21.657.004,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	26.948.976,00	105.302.156,00
Dinas Ketahanan Pangan	37.603.438,00	23.012.249,00
Dinas Lingkungan Hidup	703.110.219,00	705.750.306,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118.111.942,00	114.372.551,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.573.256,00	42.890.726,00
Dinas Perhubungan	275.223.371,00	267.543.378,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	78.020.998,00	54.768.138,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.046.424,00	35.090.208,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	38.065.664,00	39.114.658,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	36.354.194,00	28.501.484,00
Dinas Perikanan	62.442.184,00	51.177.492,00
Dinas Pertanian	188.688.175,00	155.093.288,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	50.027.361,00	100.073.123,00
Dinas Transmigrasi	60.150.025,00	40.554.654,00
Sekretariat Daerah	2.109.890.852	951.987.436,00
Sekretariat DPRD	412.267.765,00	428.430.587,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.814.021,00	41.260.286,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	44.562.467,00	169.118.200,00
Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	85.094.254,00	140.022.526,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.352.100,00	31.543.122,00
Inspektorat	25.979.419,00	21.550.194,00
Kecamatan Kapuas Barat	13.133.034,00	18.027.064,00
Kecamatan Pulau Petak	8.770.305,00	35.085.582,00
Kecamatan Kapuas Kuala	6.981.449,00	17.280.847,00
Kecamatan Kapuas Hulu	14.218.363,00	31.199.433,00
Kecamatan Selat	111.630.711,00	116.360.995,00
Kecamatan Kapuas Hilir	76.017.873,00	82.118.109,00
Kecamatan Kapuas Timur	-	33.054.657,00
Kecamatan Basarang	15.851.802,00	7.605.944,00
Kecamatan Mantangai	-	74.521.552,00
Kecamatan Kapuas Tengah	-	0,00
Kecamatan Kapuas Murung	-	60.951.995,00
Kecamatan Timpah	13.307.740,00	46.307.171,00
Kecamatan Bataguh	28.849.777,00	23.110.777,00
Kecamatan Tamban Catur	-	5.577.274,00
Kecamatan Dadahup	3.673.898,00	22.459.644,00
Kecamatan Pasak Talawang	11.856.000,00	12.780.560,00
Kecamatan Mandau Talawang	-	16.150.479,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.372.775,00	32.138.408,00

Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Jumlah	139.270.550.289,00	16.660.726.483,54

Rincian Utang Belanja tahun 2023 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp230.299.456,00; utang belanja barang dan jasa sebesar Rp22.095.605.698,00 utang belanja Hibah sebesar Rp106.041.800,00; dan utang belanja modal sebesar Rp116.838.603.335,00

7.5.3.2.1.4.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja – Utang Belanja Pegawai

Rincian Utang belanja pegawai tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp230.299.456,00 dan Rp561.818.434,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 166: Utang Belanja Pegawai

No Urut	Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	142.506.600,00	21.837.746,00
2	Dinas Kesehatan	50.571.200,00	3.469.995,00
3	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	190.004,00
4	Dinas Sosial	-	49.144.565,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	13.370.298,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.774.463,00	-
7	Dinas Pertanian	-	283.875,00
8	Dinas Perdagangan. Perindustrian. Koperasi dan UKM	2.445.693,00	55.792.366,00
9	Sekretariat DPRD	26.040.000,00	26.040.000,00
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	121.930.966,00
11	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	-	60.676.404,00
12	Kecamatan Pulau Petak	691.500,00	27.061.117,00
13	Kecamatan Kapuas Kuala	-	11.005.625,00
14	Kecamatan Kapuas Hulu	-	16.794.809,00
15	Kecamatan Selat	2.270.000,00	22.016.637,00
16	Kecamatan Kapuas Hilir	-	11.794.511,00
17	Kecamatan Kapuas Timur	-	25.750.333,00
18	Kecamatan Mantangai	-	12.049.062,00
19	Kecamatan Kapuas Murung	-	33.161.638,00
20	Kecamatan Timpah	-	28.878.211,00
21	Kecamatan Dadahup	-	18.807.482,00
22	Kecamatan Mandau Talawang	-	1.762.790,00
	Jumlah	230.299.456,00	561.818.434,00

7.5.3.2.1.4.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja – Utang Belanja Barang dan Jasa

Rincian Utang belanja barang dan jasa tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp22.095.605.698,00 dan Rp16.098.908.049,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 167: Utang Belanja Barang dan Jasa

No Urut	Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	944.599.959,00	1.287.763.594,00
2	Dinas Kesehatan	15.886.832.763,00	10.451.102.190,54
3	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Perumahan dan Kawasan Pemukiman	496.305.939,00	345.327.178,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	208.421.751,00	169.517.657,00
5	Dinas Sosial	4.615.780,00	50.760.702,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73.749.873,00	78.068.595,00

No Urut	Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
7	Dinas Tenaga Kerja	35.564.057,00	21.657.004,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	26.948.976,00	105.302.156,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	37.603.438,00	23.012.249,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	703.110.219,00	705.750.306,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118.111.942,00	114.372.551,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.573.256,00	42.890.726,00
13	Dinas Perhubungan	275.223.371,00	267.543.378,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	78.020.998,00	41.397.840,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.046.424,00	35.090.208,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	38.065.664,00	39.114.658,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.579.731,00	28.501.484,00
18	Dinas Perikanan	62.442.184,00	51.177.492,00
19	Dinas Pertanian	188.688.175,00	154.809.413,00
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	47.581.668,00	44.280.757,00
21	Dinas Transmigrasi	60.150.025,00	40.554.654,00
22	Sekretariat Daerah	1.706.637.252	951.987.436,00
23	Sekretariat DPRD	386.227.765,00	402.390.587,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.814.021,00	41.260.286,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	44.562.467,00	47.187.234,00
26	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	85.094.254,00	79.346.122,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.352.100,00	31.543.122,00
29	Inspektorat	25.979.419,00	21.550.194,00
30	Kecamatan Kapuas Barat	13.133.034,00	18.027.064,00
31	Kecamatan Pulau Petak	8.078.805,00	8.024.465,00
32	Kecamatan Kapuas Kuala	6.981.449,00	6.275.222,00
33	Kecamatan Kapuas Hulu	14.218.363,00	14.404.624,00
34	Kecamatan Selat	109.360.711,00	94.344.358,00
35	Kecamatan Kapuas Hilir	76.017.873,00	70.323.598,00
36	Kecamatan Kapuas Timur	-	7.304.324,00
37	Kecamatan Basarang	15.851.802,00	7.605.944,00
38	Kecamatan Mantangai	-	62.472.490,00
39	Kecamatan Kapuas Tengah	-	-
40	Kecamatan Kapuas Murung	-	27.790.357,00
41	Kecamatan Timpah	13.307.740,00	17.428.960,00
42	Kecamatan Bataguh	28.849.777,00	23.110.777,00
43	Kecamatan Tamban Catur	-	5.577.274,00
44	Kecamatan Dadahup	3.673.898,00	3.652.162,00
45	Kecamatan Pasak Talawang	11.856.000,00	12.780.560,00
46	Kecamatan Mandau Talawang	-	14.387.689,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.372.775,00	32.138.408,00
	Jumlah	22.095.605.698,00	16.098.908.049,54

7.5.3.2.1.4.3. Utang Belanja Hibah Utang Belanja – Utang Belanja Hibah

Rincian Utang belanja hibah tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp106.041.800,00 dan Rp0,00. Untuk utang belanja hibah pada tahun 2023 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan rentensi 5% pemeliharaan pengadaan fisik pekerjaan.

7.5.3.2.1.4.4. Utang Belanja Modal Utang Belanja – Utang Belanja Modal

Rincian Utang belanja modal tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp116.838.603.335 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 168: Rincian Utang Belanja Modal

Perangkat Daerah	Uraian	2022 Rp
Dinas Pendidikan	Merupakan utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor	64.480.000,0000
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Rp287.098.405,00 2. Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten Rp 116.083.771.330,00	116.370.869.735,00
Sekretariat Daerah	Merupakan utang belanja modal peralatan dan mesin Rp377.253.600,00 dan utang belanja modal aset tidak berwujud Rp26.000.000,00	403.253.600,00
JUMLAH		116.838.603.335,00

7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	35.830.111.326,44	78.052.488.773,57

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.830.111.326,44 mengalami penurunan sebesar Rp42.222.377.447,13 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Tabel 169: Rincian Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Utang Kepada Pemerintah Pusat	22.594.692.016,44	25.110.821.049,57	10,02	(2.516.129.033,13)
Utang Kepada LKBB	13.235.419.310,00	52.941.667.724,00	(75,00)	(39.706.248.414,00)
Jumlah	35.830.111.326,44	78.052.488.773,57		(42.222.377.447,13)

Utang Kepada Pemerintah Pusat tersebut merupakan Dana Pinjaman dari *International Bank for Reconstruction And Development Loan Agreement* Nomor 7730- ID Tanggal 01 September 2009 dalam rangka Pembiayaan *URBAN WATER SUPPLY AND SANITATION PROJECT* dan pembayaran pokok pinjaman mulai tahun 2018 s.d 2033 dengan tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga SUN seri *benchmarking* tahun berkenaan dengan tenor 20 (dua puluh) tahun.

Utang kepada LKBB merupakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dengan Perjanjian Pinjaman Nomor: PERJ- 118/SMI/0920 Kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan tujuan pembiayaan untuk membiayai Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kapuas dan kegiatan non fisik (non- konstruksi). Namun tidak terbatas pada biaya penerusan izin-izin, biaya manajemen, biaya pengelola dan pengawasan proyek tidak dibiayai oleh fasilitas pembiayaan dalam perjanjian. Jangka waktu fasilitas pembiayaan ditetapkan selama 48 bulan yaitu mulai sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan termasuk masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok fasilitas pembiayaan selama 12 bulan. Pemkab Kapuas wajib membayar bunga (*fixed rate*) sebesar 6,24% per annum. Bunga Fasilitas Pembiayaan dihitung dari fasilitas pembiayaan ditarik oleh Pemkab Kapuas.

7.5.3.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	5.670.980.946.822,24	4.290.700.731.744,21

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.670.980.946.822,24 mengalami kenaikan sebesar Rp1.380.280.215.078,03 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 170: Perbandingan Saldo Ekuitas

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)

Ekuitas	5.670.980.946.822,24	4.290.700.731.744,21	32,17	1.380.280.215.078,03
Jumlah	5.670.980.946.822,24	4.290.700.731.744,21	32,17	1.380.280.215.078,03

7.5.3.3.1 Kewajiban Dan Ekuitas

Kewajiban dan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas	5.875.150.806.346,94	4.401.247.080.772,58

Saldo kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.875.150.806.346,94 mengalami kenaikan sebesar Rp1.473.903.725.574,36 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 171: Saldo Kewajiban dan Ekuitas

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	5.875.150.806.346,94	4.290.700.731.744,21	36,93	1.584.450.074.602,73
Jumlah	5.875.150.806.346,94	4.290.700.731.744,21	36,93	1.584.450.074.602,73

7.5.4 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/ Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, LO menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

KEGIATAN OPERASIONAL

7.5.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kapuas dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 172: Rincian Pendapatan – LO

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	141.955.709.666,36	155.463.375.635,63	(8,69)	(13.507.665.969,27)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
(PAD) - LO				
Pendapatan Transfer - LO	3.015.081.589.294,27	2.055.096.762.143,11	46,71	959.984.827.151,16
Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	23.504.671.253,00	156.991.880.507,00	(85,03)	(133.487.209.254,00)
JUMLAH	3.180.541.970.213,63	2.367.552.018.285,74	34,34	812.989.951.927,89

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
– LO	141.955.709.666,36	155.463.375.635,63

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp141.955.709.666,36 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 173: Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Daerah – LO	44.773.777.826,60	73.262.397.700,52
Retribusi Daerah – LO	6.682.767.804,08	6.176.837.631,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO	27.049.142,65	7.704.570.345,00
Lain – lain PAD yang Sah – LO	90.472.114.893,03	68.319.569.959,11
Jumlah	141.955.709.666,36	155.463.375.635,63

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.4.1.1.1. Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	44.773.777.826,60	73.262.397.700,52

Pajak Daerah – LO adalah Pendapatan Asli dan pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 174: Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

Nama Akun	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak Hotel - LO	588.531.712,00	226.587.685,00
Pajak Losmen – LO	2.670.000,00	8.715.636,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya – LO	45.363.441,00	11.735.699,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya – LO	1.182.758.514,00	1.027.079.592,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya – LO	50.990.087,00	0,00
Pajak Kantin dan Sejenisnya – LO	531.273.351,60	537.694.202,00
Pajak Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya – LO	12.045.732.421,00	6.194.267.622,00
Pajak Tontonan Film – LO	84.349.087,00	0,00
Pajak Pameran – LO	850.000,00	0,00
Pajak Sirkus/ Akrobat/Sulap – LO	4.350.000,00	1.000.000,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan – LO	52.545.000,00	34.735.000,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) – LO	6.515.000,00	5.780.000,00
Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron - LO	444.130.771,00	462.422.672,00
Pajak Reklame Kain – LO	11.110.500,00	14.626.575,00
Pajak Reklame Berjalan – LO	291.600,00	291.600,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri –	669.711.163,00	0,00

Nama Akun	2023 (Rp)	2022 (Rp)
LO		
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LO	9.832.231.235,00	9.748.085.475,00
Pajak Parkir – LO	80.660.590,00	78.370.800,00
Pajak Air Tanah – LO	306.780.941,00	282.186.841,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	187.348.000,00	121.365.600,00
Pajak Pasir dan Kerikil – LO	1.773.341.784,00	554.494.388,00
Pajak Pasir Kuarsa – LO	727.594.652,00	270.270.000,00
Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) – LO	8.641.675,00	499.725.445,00
Pajak Tanah Liat – LO	43.200,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LO	1.918.076.850,00	3.801.774.731,52
PBBP2 – LO	6.257.785.947,00	5.724.210.844,00
BPHTB – Pemindahan Hak – LO	7.936.162.755,00	43.656.977.293,00
BPHTB – Pemindahan Hak Baru – LO	23.937.550,00	0,00
Jumlah	44.773.777.826,60	73.262.397.700,52

7.5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO

Retribusi Daerah – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	6.682.767.804,08	6.176.837.631,00

Retribusi Daerah pada Laporan Operasional pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.682.767.804,08 dan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.176.837.631,00 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2023 pada masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana berikut.

Tabel 175: Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Nama Akun	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	191.564.900,00	664.690.730,00
Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan - LO	317.617.000,00	415.510.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	615.250.000,00	769.439.600,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	412.288.900,00	561.341.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	87.262.500,00	63.495.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	50.850.000,00	28.850.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	0,00	2.100.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang - LO	50.080.000,00	58.110.000,00
Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	476.697.832,00	371.930.250,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.905.130.500,00	613.153.031,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	787.270.000,00	1.217.400.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan - LO	36.000.000,00	46.000.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	255.280.000,00	227.675.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	36.370.400,00	40.438.500,00
Retribusi Penyeberangan di Air - LO	54.600.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	149.128.000,00	202.454.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0,00	211.627.020,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol - LO	707.440.000,00	680.480.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan - LO	0,00	2.150.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	549.937.772,08	993.500,00
Jumlah	6.682.767.804,08	6.176.837.631,00

7.5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	27.049.142,65	7.704.570.345,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp27.049.142,65 dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp7.704.570.345,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.677.521.202,35 dengan rincian sebagai

berikut.

Tabel 176: Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Pembagian Laba Untuk Dividen Bagi Peserta Modal Sesuai Berita Acara RUPS PT. Bank Kalteng berdasarkan Akta Notaris Win Aditya, SH, M.Kn. Nomor 38 Tanggal 28 Mei 2021	0,00	7.704.570.345,00	(100,00)	(7.704.570.345,00)
Pembayaran Dividen PT JAMKRIDA	27.049.142,65	0,00	100,00	27.049.142,65
Jumlah	27.049.142,65	7.704.570.345,00	(99,65)	(7.677.521.202,35)

7.5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022
	90.472.114.893,03	68.319.569.959,11

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan lain- lainPAD pada laporan operasional .Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah- LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp90.472.114.893,03 dan untuk periode Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp68.319.569.959,11 mengalami kenaikan sebesar Rp22.960.334.505,92 dengan rincian per Perangkat Daerah sebagai berikut.

Tabel 177: Realisasi Lain- lain Pendapatan asli Daerah Yang sah –LO

Nama Akun	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	676.947.838,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	64.000.000,00	52.550.000,00
Jasa Giro-LO	8.146.453.676,94	3.156.455.451,09
Pendapatan Bunga-LO	4.822.177.544,85	1.497.446.735,44
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	711.822.506,20	314.525.235,38
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.862.681.804,02	1.814.203.328,74
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.181.006.172,54	1.009.087.160,46
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	9.849.630,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.758.021.604,67	351.520.226,00
Pendapatan dari BLUD-LO	69.239.154.115,81	60.123.781.822,00
Jumlah	90.472.114.893,03	68.319.569.959,11

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	3.015.081.589.294,27	2.055.096.762.143,11

Pendapatan Transfer – LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Dinas Pendapatan, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.015.081.589.294,27 dan untuk periode Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.055.096.762.143,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 178: Rincian Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	2.885.618.426.285,00	1.771.069.752.821,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	0,00	182.519.443.044,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	129.463.163.009,27	101.507.566.278,11
Jumlah	3.015.081.589.294,27	2.055.096.762.143,11

7.5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kapuas untuk periode yang berakhir Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.885.618.426.285,00 dan untuk periode TA 2022 sebesar Rp1.771.069.752.821,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 179: Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dana Bagi Hasil – LO	1.705.068.602.000,00	623.703.804.099,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	808.725.785.465,00	777.279.406.867,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	155.922.847.825,00	191.191.616.615,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	215.901.190.995,00	178.894.925.240,00
Jumlah	2.885.618.426.285,00	1.771.069.752.821,00

7.5.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil – LO

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Kapuas untuk periode yang berakhir Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 1.705.068.602.000,00 dan untuk periode TA 2022 sebesar Rp 623.703.804.099,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 180: Rincian Dana Bagi Hasil – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
DBH PBB-LO	59.171.580.583,00	87.488.580.143,00	(32,37)	(28.316.999.560,00)
DBH PPh Pasal 21-LO	7.288.045.873,00	6.346.430.000,00	14,84	941.615.873,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN-LO	72.235.531,00	69.875.000,00	3,38	2.360.531,00
DBH CHT-LO	123,00	0,00	100,00	123,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	2.108.111,00	33.968.650,00	(93,79)	(31.860.539,00)
DBH SDA Gas Bumi-LO	95.300.758,00	680.684.650,00	(86,00)	(585.383.892,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	4.663.237.981,00	21.159.419.545,00	(77,96)	(16.496.181.564,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.600.717.876.239,00	495.314.663.111,00	223,17	1.105.403.213.128,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	31.353.272.437,00	10.502.604.050,00	198,53	20.850.668.387,00
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	18.984.153,00	149.267.950,00	(87,28)	(130.283.797,00)
DBH SDA Perikanan-LO	1.685.960.211,00	1.958.311.000,00	(13,91)	(272.350.789,00)
Jumlah	1.705.068.602.000,00	623.703.804.099,00	173,38	1.081.364.797.901,00

7.5.4.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Dana Alokasi Umum (DAU)-LO merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp805.325.785.465,00 dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp777.279.406.867,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.046.378.598,00.

7.5.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik -LO merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember

2023 terealisasi sebesar Rp155.922.847.825,00 dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp191.191.616.615,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.268.768.790,00.

Tabel 181: Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	448.522.000,00	1.415.398.000,00	(68,31)	(966.876.000,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	1.625.241.000,00	25.345.631.000,00	(93,59)	(23.720.390.000,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	1.674.204.000,00	18.115.618.000,00	(90,76)	(16.441.414.000,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	17.689.091.847,00	(100,00)	(17.689.091.847,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	6.379.654.096,00	(100,00)	(6.379.654.096,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Penguatan Intervensi Stunting-LO	8.605.393.535,00	0,00	100,00	8.605.393.535,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	0,00	2.510.833.500,00	(100,00)	(2.510.833.500,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	1.530.094.200,00	(100,00)	(1.530.094.200,00)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	17.167.537.005,00	30.747.545.812,00	(44,17)	(13.580.008.807,00)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	5.082.146.350,00	(100,00)	(5.082.146.350,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	15.205.086.000,00	(100,00)	(15.205.086.000,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	47.378.128.000,00	10.593.301.500,00	347,25	36.784.826.500,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	10.273.931.000,00	(100,00)	(10.273.931.000,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	6.014.676.000,00	(100,00)	(6.014.676.000,00)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	5.305.001.200,00	2.586.502.310,00	105,10	2.718.498.890,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	0,00	1.705.440.400,00	(100,00)	(1.705.440.400,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	0,00	35.996.666.600,00	(100,00)	(35.996.666.600,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	121.366.000,00	0,00	100,00	121.366.000,00

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	73.597.455.085,00	0,00	100,00	73.597.455.085,00
Jumlah	155.922.847.825,00	191.191.616.615,00	(18,45)	(35.268.768.790,00)

7.5.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp215.901.190.995,00 dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp178.894.925.240,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.006.265.755,00.

Tabel 182: Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
DAK Non Fisik – BOS Reguler – LO	41.999.535.000,00	40.810.993.984,00	2,91	1.188.541.016,00
DAK Non Fisik – BOS Kinerja – LO	2.860.000.000,00	2.080.000.000,00	37,50	780.000.000,00
DAK Non Fisik – TPG PNSD – LO	101.348.051.775,00	95.312.205.105,00	6,33	6.035.846.670,00
DAK Non Fisik – Tamsil Guru PNSD – LO	470.171.600,00	1.402.288.000,00	(66,47)	(932.116.400,00)
DAK Non Fisik – TKG PNSD – LO	20.247.188.000,00	21.303.377.000,00	(4,96)	(1.056.189.000,00)
DAK Non Fisik – BOP PAUD – LO	8.986.554.000,00	301.800.000,00	2.877,65	8.684.754.000,00
DAK Non Fisik – BOP Pendidikan Kesetaraan – LO	2.065.200.000,00	0,00	100,00	2.065.200.000,00
DAK Non Fisik – BOKKB – BOK – LO	5.398.051.850,00	1.640.613.601,00	229,03	3.757.438.249,00
DAK Non Fisik – BOKKB – Akreditasi Puskesmas – LO	26.661.447.000,00	0,00	100,00	26.661.447.000,00
DAK Non Fisik – BOKKB – BOKB – LO	1.966.248.270,00	2.138.324.750,00	(8,05)	(172.076.480,00)
DAK Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal – LO	272.368.500,00	190.414.800,00	43,04	81.953.700,00
DAK Non Fisik – BOKB – KB – LO	2.591.505.000,00	13.013.748.000,00	(80,09)	(10.422.243.000,00)
DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak – LO	75.147.000,00	451.800.000,00	(83,37)	(376.653.000,00)
DAK Non Fisik – Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian – LO	959.723.000,00	249.360.000,00	284,87	710.363.000,00
Jumlah	215.901.190.995,00	178.894.925.240,00	20,69	37.006.265.755,00

7.5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kapuas untuk periode yang berakhir Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 0,00 dan untuk periode TA 2022 sebesar Rp 182.519.443.044,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 183: Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID) – LO	0,00	1.770.863.000,00
Dana Desa (DD) – LO	0,00	180.748.580.044,00
Jumlah	0,00	182.519.443.044,00

7.5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO merupakan Pendapatan Bagi Hasil, Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Periode Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp129.463.163.009,27 dan untuk periode Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp101.507.566.278,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 184: Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Uraian	2023(Rp)	2022 (Rp)	Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	10.026.093.966,31	10.680.806.599,41	(6,13)	(654.712.633,10)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	11.977.070.830,64	12.187.466.744,38	(1,73)	(210.395.913,74)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	88.493.125.840,04	58.846.773.940,89	50,38	29.646.351.899,15
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	432.662.583,28	81.873.763,43	428,45	350.788.819,85
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	18.364.209.789,00	19.710.645.230,00	(6,83)	(1.346.435.441,00)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	150.000.000,00	0,00	100,00	150.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	20.000.000,00	0,00	100,00	20.000.000,00
Jumlah	129.463.163.009,27	101.507.566.278,11	27,54	27.955.596.731,16

7.5.4.1.3 Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain- Lain Pendapatan	Tahun 2023	Tahun 2022
Daerah Yang Sah - LO	23.504.671.253,00	156.991.880.507,00

Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO merupakan Pendapatan yang diperoleh dari pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan/ atau Provinsi berupa persediaan dan aset tetap, pendapatan dana Afirmasi dan Kinerja, dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Pemerintah. Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp23.504.671.253,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp156.991.880.507,00. Dengan rician sebagai berikut.

Tabel 185: Rincian Lain-lain Pendaparan Daerah Yang Sah – LO

Akun	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	3.271.851.996,00	155.615.698.655,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	950.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	1.215.231.852,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	20.232.819.257,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	108.009.057,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis – LO	0,00	160.000.000,00
Jumlah	23.504.671.253,00	156.991.880.507,00

7.5.4.2 Beban - LO

Beban - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	1.798.612.971.495,17	1.763.166.682.460,36

Beban-LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berkenaan di Daerah Kabupaten Kapuas. Beban terdiri dari Beban

Operasional dan Beban Transfer. Realisasi dalam Tahun 2023 sebesar Rp1.798.698.793.295,17 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.763.166.682.460,36 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 186: Rincian Beban- LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	1.233.415.430.640,53	1.176.164.058.988,73	57.251.371.651,80	4,87
Beban Penyusutan dan Amortisasi	379.883.775.961,64	300.251.830.352,63	79.631.945.609,01	26,52
Beban Transfer	179.143.604.970,00	283.412.735.544,00	(104.269.130.574,00)	(36,79)
Beban Tidak Terduga	6.170.159.923,00	3.338.057.575,00	2.832.102.348,00	84,84
Jumlah Beban	1.798.612.971.495,17	1.763.166.682.460,36	35.532.110.834,81	2,02

7.5.4.2.1 Beban operasi – LO

Beban Operasi - LO dengan realisasi dalam Tahun 2023 sebesar Rp1.233.415.430.640,53 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.176.164.058.988,73 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 187: Rincian Beban Operasi- LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	617.648.417.230,00	632.417.867.557,92	(14.769.450.327,92)	(2,34)
Beban Barang dan Jasa	524.921.867.004,67	450.794.883.910,31	74.126.983.094,36	16,44
Beban Bunga	5.508.154.324,00	5.614.736.389,90	(106.582.065,90)	(1,90)
Beban Hibah	83.706.658.760,00	83.930.720.543,99	(224.061.783,99)	(0,27)
Beban Bantuan Sosial	256.288.275,00	1.564.511.200,00	(1.308.222.925,00)	(83,62)
Beban Penyisihan Piutang	1.374.045.046,86	1.841.339.386,61	(467.294.339,75)	(25,38)
Jumlah Beban	1.233.415.430.640,53	1.176.164.058.988,73	57.251.371.651,80	4,87

7.5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	617.648.417.230,00	632.417.867.557,92

Beban Pegawai – LO merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp617.648.417.230,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp14.769.450.327,92 atau 2,34% bila dibandingkan dengan beban pegawai Tahun 2022 sebesar Rp632.417.867.557,92. Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai Tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2023. Rincian beban Pegawai pada Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 188: Beban Pegawai – LO

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.231.209.534,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.884.540.925,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.136.532.854,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.663.376.247,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.275.001.819,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.204.222.502,00
BLUD Puskesmas Barimba	64.390.950,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.898.631.899,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	1.462.837.823,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.149.009.878,00
Dinas Kesehatan	88.568.440.799,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.985.241.710,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.298.127.914,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.149.058.641,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	12.576.048.323,00

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Kawasan Permukiman	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.492.672.857,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.608.053.515,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.534.038.445,00
Dinas Pendidikan	362.100.367.970,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	2.823.032.280,00
Dinas Perhubungan	3.801.624.373,00
Dinas Perikanan	3.945.335.272,00
Dinas Pertanian	17.975.564.590,00
Dinas Sosial	2.463.071.241,00
Dinas Tenaga Kerja	2.352.101.386,00
Dinas Transmigrasi	2.619.318.100,00
Inspektorat Daerah	3.558.212.999,00
Kecamatan Basarang	1.360.228.489,00
Kecamatan Bataguh	993.738.640,00
Kecamatan Dadahup	1.014.068.981,00
Kecamatan Kapuas Barat	1.665.352.415,00
Kecamatan Kapuas Hilir	3.039.320.573,00
Kecamatan Kapuas Hulu	864.563.634,00
Kecamatan Kapuas Kuala	1.201.036.426,00
Kecamatan Kapuas Murung	1.685.439.877,00
Kecamatan Kapuas Tengah	1.028.562.299,00
Kecamatan Kapuas Timur	1.338.100.101,00
Kecamatan Mandau Talawang	1.011.445.626,00
Kecamatan Mantangai	1.143.845.941,00
Kecamatan Pasak Talawang	1.330.429.151,00
Kecamatan Pulau Petak	1.525.709.446,00
Kecamatan Selat	5.128.047.006,00
Kecamatan Tamban Catur	1.129.484.603,00
Kecamatan Timpah	1.118.481.952,00
RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	47.690.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.818.259.571,00
Sekretariat Daerah	11.735.671.337,00
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	10.080.928,00
Sekretariat DPRD	26.638.795.388,00
Jumlah	617.648.417.230,00

7.5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa- LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	524.921.867.004,67	450.794.883.910,31

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp524.921.867.004,67 dan Rp450.794.883.910,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 189: Rincian Barang dan Jasa

Akun	2023 (Rp)
Beban Barang	63.091.523.337,82
Beban Jasa	150.304.960.623,99
Beban Pemeliharaan	12.108.236.293,00
Beban Perjalanan Dinas	164.634.834.790,00
Beban Uang dan/ atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat	14.434.666.500,00
Beban Barang dan Jasa BOS	53.574.332.235,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	66.773.313.224,86
Jumlah	524.921.867.004,67

Rincian Beban Barang dan Jasa Per SKPD sebagai Berikut.

Tabel 190: Rincian Barang dan Jasa Per SKPD

Akun	Uraian	Realisasi
Beban Barang	Dinas Pendidikan	1.769.256.700,00
	Dinas Kesehatan	8.034.770.614,43
	RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	1.956.869.241,00

Akun	Uraian	Realisasi
	BLUD RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	1.956.975.293,09
	Puskesmas Sei Tatas	218.960.050,00
	Puskesmas Basarang	177.530.000,00
	Puskesmas Palingkau	161.412.000,00
	Puskesmas Dadahup	93.537.500,00
	Puskesmas Talekung Punei	172.920.000,00
	Puskesmas Palangkau	86.666.500,00
	Puskesmas Lupak	272.431.000,00
	Puskesmas Tamban Baru	146.725.000,00
	Puskesmas Mandomai	202.279.000,00
	Puskesmas Lamunti	169.153.500,00
	Puskesmas Selat	221.883.500,00
	Puskesmas Mantangai	130.727.500,00
	Puskesmas Danau Rawah	173.475.000,00
	Puskesmas Timpah	266.619.250,00
	Puskesmas Pujon	111.897.000,00
	Puskesmas Sei Hanyo	213.262.000,00
	Puskesmas Jangkang	166.095.000,00
	Puskesmas Sei Pinang	134.257.872,00
	Puskesmas Panamas	261.956.000,00
	Puskesmas Melati	150.150.000,00
	Puskesmas Pulau Telo	122.460.000,00
	Puskesmas Pulau Kupang	171.883.250,00
	Puskesmas Tamban Catur	114.640.456,00
	Puskesmas Terusan Tengah	283.584.000,00
	Puskesmas Barimba	121.233.000,00
	Puskesmas Anjir Serapat	162.742.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.668.166.624,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	434.708.520,00
	Dinas Sosial	814.105.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	907.263.656,00
	Dinas Lingkungan Hidup	2.836.193.555,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.152.797.438,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	354.439.800,00
	Dinas Perhubungan	1.145.008.562,30
	Dinas Komunikasi dan Informatika	447.881.708,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	397.224.195,00
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	778.716.647,00
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	578.422.949,00
	Dinas Tenaga Kerja	406.473.902,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.250.258.312,00
	Dinas Ketahanan Pangan	1.404.394.157,00
	Dinas Perikanan	784.787.608,00
	Dinas Pertanian	3.091.046.333,00
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.851.883.920,00
	Dinas Transmigrasi	325.631.105,00
	Sekretariat Daerah	6.104.252.078,00
	Sekretariat DPRD	3.704.521.725,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	664.460.672,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.218.893.674,00
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.110.123.528,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.244.654.787,00
	Inspektorat	519.753.777,00
	Kecamatan Kapuas Barat	342.162.025,00
	Kecamatan Kapuas Tengah	202.915.737,00
	Kecamatan Kapuas Murung	382.738.375,00
	Kecamatan Timpah	175.521.506,00
	Kecamatan Bataguh	351.578.500,00

Akun	Uraian	Realisasi
	Kecamatan Tamban Catur	153.151.539,00
	Kecamatan Dadahup	99.734.000,00
	Kecamatan Pasak Talawang	172.165.750,00
	Kecamatan Mandau Talawang	134.718.300,00
	Kecamatan Pulau Petak	176.865.900,00
	Kecamatan Kapuas Kuala	193.471.415,00
	Kecamatan Kapuas Hulu	169.416.800,00
	Kecamatan Selat	1.590.635.280,00
	Kecamatan Kapuas Hilir	822.518.288,00
	Kecamatan Kapuas Timur	136.537.500,00
	Kecamatan Basarang	207.349.698,00
	Kecamatan Mantangai	167.077.066,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.190.549.200,00
Beban Jasa	Dinas Pendidikan	14.293.221.556,00
	Dinas Kesehatan	34.363.660.201,67
	RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	10.536.505.537,00
	Puskesmas Sei Tatas	108.769.994,00
	Puskesmas Basarang	97.785.722,00
	Puskesmas Palingkau	164.217.085,00
	Puskesmas Dadahup	99.051.472,00
	Puskesmas Talekung Punei	135.133.252,00
	Puskesmas Palangkau	144.214.289,00
	Puskesmas Lupak	105.600.891,00
	Puskesmas Tamban Baru	120.154.955,00
	Puskesmas Mandomai	207.843.527,00
	Puskesmas Lamunti	211.128.553,00
	Puskesmas Selat	122.078.503,00
	Puskesmas Mantangai	151.794.970,00
	Puskesmas Danau Rawah	167.689.924,00
	Puskesmas Timpah	190.565.551,00
	Puskesmas Pujon	206.906.869,00
	Puskesmas Sei Hanyo	206.781.233,00
	Puskesmas Jangkang	142.537.475,00
	Puskesmas Sei Pinang	187.967.555,00
	Puskesmas Panamas	174.880.511,00
	Puskesmas Melati	106.186.831,00
	Puskesmas Pulau Telo	98.915.217,00
	Puskesmas Pulau Kupang	152.507.658,00
	Puskesmas Tamban Catur	148.560.795,00
	Puskesmas Terusan Tengah	128.637.078,00
	Puskesmas Barimba	171.687.000,00
	Puskesmas Anjir Serapat	171.283.886,00
	BLUD Puskesmas Barimba	313.265.323,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	13.551.398.676,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.928.339.685,00
	Dinas Sosial	828.828.180,33
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.293.231.251,00
	Dinas Lingkungan Hidup	9.230.156.601,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.653.953.698,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.188.597.629,00
	Dinas Perhubungan	3.369.331.532,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.295.887.589,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	652.394.420,33
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	1.049.564.668,00
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	549.237.101,00
	Dinas Tenaga Kerja	467.452.895,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.050.997.800,00
	Dinas Ketahanan Pangan	573.243.685,00
	Dinas Perikanan	974.620.707,00
	Dinas Pertanian	3.565.323.444,00
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan	1.671.160.651,00

Akun	Uraian	Realisasi
	Usaha Kecil Menengah	
	Dinas Transmigrasi	812.220.732,00
	Sekretariat Daerah	7.779.602.902,00
	Sekretariat DPRD	8.715.280.774,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.054.326.641,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.150.221.562,00
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.241.615.474,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.920.521.437,00
	Inspektorat	578.955.234,00
	Kecamatan Kapuas Barat	727.080.321,00
	Kecamatan Kapuas Tengah	272.484.932,00
	Kecamatan Kapuas Murung	1.138.887.047,00
	Kecamatan Timpah	383.039.648,00
	Kecamatan Bataguh	894.647.384,67
	Kecamatan Tamban Catur	372.544.710,33
	Kecamatan Dadahup	321.245.576,00
	Kecamatan Pasak Talawang	219.954.340,00
	Kecamatan Mandau Talawang	450.855.595,00
	Kecamatan Pulau Petak	401.694.340,00
	Kecamatan Kapuas Kuala	282.065.701,00
	Kecamatan Kapuas Hulu	368.389.390,33
	Kecamatan Selat	1.845.087.316,00
	Kecamatan Kapuas Hilir	1.314.969.606,00
	Kecamatan Kapuas Timur	283.642.931,33
	Kecamatan Basarang	468.173.544,00
	Kecamatan Mantangai	762.012.204,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.222.187.655,00
Beban Pemeliharaan	Dinas Pendidikan	3.412.350,00
	Dinas Kesehatan	617.083.280,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	2.104.006.344,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	234.002.600,00
	Dinas Sosial	179.285.703,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.163.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	1.195.961.294,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85.511.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	103.083.750,00
	Dinas Perhubungan	283.067.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.968.457,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.457.500,00
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	1.468.826.279,00
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	20.597.305,00
	Dinas Tenaga Kerja	309.435.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	39.799.772,00
	Dinas Ketahanan Pangan	191.075.505,00
	Dinas Perikanan	252.790.000,00
	Dinas Pertanian	255.716.500,00
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	70.600.000,00
	Dinas Transmigrasi	5.580.000,00
	Sekretariat Daerah	890.523.521,00
	Sekretariat DPRD	313.290.050,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47.648.403,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	387.838.590,00
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	337.681.335,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	335.471.206,00
	Inspektorat	525.384.696,00
	Kecamatan Kapuas Barat	192.734.100,00
	Kecamatan Kapuas Tengah	88.290.000,00
	Kecamatan Timpah	30.757.500,00

Akun	Uraian	Realisasi
	Kecamatan Bataguh	25.000.000,00
	Kecamatan Tamban Catur	1.500.000,00
	Kecamatan Pasak Talawang	62.502.099,00
	Kecamatan Pulau Petak	54.150.000,00
	Kecamatan Kapuas Kuala	16.465.000,00
	Kecamatan Kapuas Hulu	56.624.924,00
	Kecamatan Selat	392.959.780,00
	Kecamatan Kapuas Hilir	185.000.000,00
	Kecamatan Kapuas Timur	29.825.000,00
	Kecamatan Basarang	25.712.450,00
	Kecamatan Mantangai	138.290.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	101.165.000,00
Beban Perjalanan Dinas	Dinas Pendidikan	3.152.122.420,00
	Dinas Kesehatan	8.124.689.172,00
	Puskesmas Sei Tatas	404.790.000,00
	Puskesmas Basarang	514.720.000,00
	Puskesmas Palingkau	538.740.000,00
	Puskesmas Dadahup	414.930.000,00
	Puskesmas Talekung Punei	468.892.000,00
	Puskesmas Palangkau	668.610.000,00
	Puskesmas Lupak	424.595.000,00
	Puskesmas Tamban Baru	524.973.000,00
	Puskesmas Mandomai	756.848.000,00
	Puskesmas Lamunti	676.185.000,00
	Puskesmas Selat	331.800.000,00
	Puskesmas Mantangai	440.310.000,00
	Puskesmas Danau Rawah	645.340.000,00
	Puskesmas Timpah	640.410.000,00
	Puskesmas Pujon	864.073.000,00
	Puskesmas Sei Hanyo	604.108.500,00
	Puskesmas Jangkang	725.550.000,00
	Puskesmas Sei Pinang	627.477.000,00
	Puskesmas Panamas	475.586.000,00
	Puskesmas Melati	432.720.000,00
	Puskesmas Pulau Telo	398.720.000,00
	Puskesmas Pulau Kupang	575.080.000,00
	Puskesmas Tamban Catur	465.136.000,00
	Puskesmas Terusan Tengah	316.576.000,00
	Puskesmas Barimba	614.180.000,00
	Puskesmas Anjir Serapat	491.484.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	3.261.572.222,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	929.257.017,00
	Dinas Sosial	1.098.926.517,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	993.761.878,00
	Dinas Lingkungan Hidup	996.575.293,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.646.241.945,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.194.845.729,00
	Dinas Perhubungan	1.702.937.144,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.307.036.149,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.048.773.936,00
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	1.301.266.388,00
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	661.559.685,00
	Dinas Tenaga Kerja	794.213.235,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	4.042.561.726,00
	Dinas Ketahanan Pangan	1.407.062.572,00
	Dinas Perikanan	1.044.597.531,00
	Dinas Pertanian	2.577.783.273,00
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.725.131.613,00
	Dinas Transmigrasi	854.976.761,00

Akun	Uraian	Realisasi
	Sekretariat Daerah	7.633.917.040,00
	Sekretariat DPRD	81.444.893.001,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.605.795.187,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.706.889.174,00
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.850.447.831,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.442.631.868,00
	Inspektorat	3.253.914.586,00
	Kecamatan Kapuas Barat	398.129.367,00
	Kecamatan Kapuas Tengah	439.342.011,00
	Kecamatan Kapuas Murung	670.560.962,00
	Kecamatan Timpah	340.427.502,00
	Kecamatan Bataguh	224.370.943,00
	Kecamatan Tamban Catur	199.587.527,00
	Kecamatan Dadahup	185.132.351,00
	Kecamatan Pasak Talawang	389.689.830,00
	Kecamatan Mandau Talawang	397.558.153,00
	Kecamatan Pulau Petak	289.434.043,00
	Kecamatan Kapuas Kuala	337.396.080,00
	Kecamatan Kapuas Hulu	587.207.959,00
	Kecamatan Selat	1.153.149.553,00
	Kecamatan Kapuas Hilir	538.054.930,00
	Kecamatan Kapuas Timur	337.578.154,00
	Kecamatan Basarang	263.312.700,00
	Kecamatan Mantangai	460.237.664,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.577.450.668,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Dinas Pendidikan	45.000.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.500.000,00
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	2.136.880.000,00
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	5.800.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.000.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan	6.700.000,00
	Dinas Pertanian	10.143.750.000,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.999.000,00
	Kapuas Murung	23.000.000,00
	Kecamatan Bataguh	18.000.000,00
	Kecamatan Selat	1.922.250.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.700.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	Dinas Pendidikan	53.574.332.235,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	BLUD RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO	53.354.335.708,46
	BLUD Puskesmas Sei Tatas	858.222.351,00
	BLUD Puskesmas Basarang	572.673.558,00
	BLUD Puskesmas Palingkau	907.907.207,00
	BLUD Puskesmas Dadahup	350.218.599,00
	BLUD Puskesmas Talekung Punei	84.642.731,40
	BLUD Puskesmas Palangkau	146.574.970,00
	BLUD Puskesmas Lupak	581.021.888,00
	BLUD Puskesmas Tamban Baru	250.044.736,00
	BLUD Puskesmas Mandomai	623.841.871,00
	BLUD Puskesmas Lamunti	176.478.241,00
	BLUD Puskesmas Selat	985.264.498,00
	BLUD Puskesmas Mantangai	434.536.855,00
	BLUD Puskesmas Danau Rawah	161.260.176,00
	BLUD Puskesmas Timpah	472.391.247,00
	BLUD Puskesmas Pujon	665.327.851,60
	BLUD Puskesmas Sei Hanyo	321.699.533,00

Akun	Uraian	Realisasi
	BLUD Puskesmas Jangkang	310.984.916,40
	BLUD Puskesmas Sei Pinang	184.664.000,00
	BLUD Puskesmas Panamas	267.774.091,00
	BLUD Puskesmas Melati	1.296.656.728,00
	BLUD Puskesmas Pulau Telo	363.842.688,00
	BLUD Puskesmas Pulau Kupang	873.059.214,80
	BLUD Puskesmas Tamban Catur	359.257.977,20
	BLUD Puskesmas Terusan Tengah	385.799.507,00
	BLUD Puskesmas Barimba	153.595.098,00
	BLUD Puskesmas Anjir Serapat	1.719.928.007,00
	JUMLAH	524.921.867.004,67

7.5.4.2.1.3. Beban Bunga - Lo

Beban Bunga- LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	5.508.154.324,00	5.614.736.389,90

Jumlah Beban Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah atas Utang Jangka Panjang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.508.154.324,00 dan Rp5.614.736.389,90.

7.5.4.2.1.4. Beban Hibah

Beban Hibah- LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	83.706.658.760,00	83.930.720.543,99

Jumlah Beban Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp83.706.658.760,00 dan Rp83.930.720.543,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 191: Beban Hibah – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / Turun (Rp)	%
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	10.949.975.500,00	7.563.983.639,00	3.385.991.861,00	44,76
Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	1.006.574.410,00	(906.574.410,00)	(90,07)
Beban Hibah Uang Kepada BUMD	2.380.820.000,00	626.830.000,00	1.753.990.000,00	279,82
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	68.957.633.260,00	73.415.102.494,99	(4.457.469.234,99)	(6,07)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.318.230.000,00	1.318.230.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	83.706.658.760,00	83.930.720.543,99	(224.061.783,99)	(0,27)

7.5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial- LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	256.288.275,00	1.564.511.200,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial – LO merupakan bantuan kepada Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintahan. Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp256.288.275,00 dan Rp1.564.511.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 192: Beban Bantuan Sosial – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / Turun (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Kepada Individu	256.288.275,00	96.227.800,00	160.060.475,00	166,33
Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.468.283.400,00	(1.468.283.400,00)	(100,00)
JUMLAH	256.288.275,00	1.564.511.200,00	(1.308.222.925,00)	(83,62)

7.5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang- LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	1.374.045.046,86	1.841.339.386,61

Beban Penyisihan Piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.374.045.046,86 dan Rp1.841.339.386,61 Beban Penyusutan dan Amortisasi posisi 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 193: Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Debet
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.928.219.217,12
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	501.285.674,00
Beban Penyisihan Piutang Lain – lain PAD yang Sah	(1.055.459.844,26)
Jumlah	1.374.045.046,86

7.5.4.2.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi- LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	379.883.775.961,64	300.251.830.352,63

Beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp379.883.775.961,64 dan Rp300.251.830.352,63.

Beban penyusutan tersebut tidak termasuk beban penyusutan sebagai dampak Pemerintah Kabupaten Kapuas belum menerapkan penambahan masa manfaat dan Kebijakan Akuntansi atas atribusi aset tetap ke aset induknya senilai Rp88.298.370.111,00

Beban penyusutan dan amortisasi terdiri dari :

7.5.4.2.1.7.1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin- LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	61.567.550.448,64	51.884.106.610,63

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp61.567.550.448,64 dan Rp51.884.106.610,63. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 194: Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO

Uraian	2023	2022
Dinas Pendidikan	17.638.335.129,00	14.865.446.403,99
Dinas Kesehatan	14.181.835.778,00	11.157.474.869,00
RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	7.890.456.847,64	7.789.556.323,00
BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	535.613.634,00	395.785.187,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.125.345.157,00	1.407.926.084,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.840.866.830,00	410.622.603,00
Dinas Sosial	240.785.584,00	274.370.085,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.634.753.843,00	2.908.948.490,00
Dinas Lingkungan Hidup	920.392.043,00	734.298.110,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	227.066.585,00	212.724.225,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	79.807.571,00	114.888.899,00
Dinas Perhubungan	567.958.447,00	834.385.118,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	527.723.981,00	681.819.517,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	206.833.158,00	169.324.429,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	111.684.990,00	105.608.800,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	219.322.692,00	158.071.754,00
Dinas Tenaga Kerja	74.655.858,00	79.168.236,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	387.446.214,00	521.043.195,00
Dinas Ketahanan pangan	77.283.712,00	5.697.575,00
Dinas Perikanan	271.296.335,00	254.267.816,00
Dinas Pertanian	921.311.782,00	562.918.705,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha	308.192.474,00	363.836.565,00

Uraian	2023	2022
Kecil Menengah		
Dinas Transmigrasi	71.428.193,00	39.544.146,00
Sekretariat Daerah	2.567.255.605,00	2.385.016.094,00
Sekretariat DPRD	2.197.020.599,00	1.657.677.336,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	313.174.506,00	297.511.275,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.264.164.058,00	841.754.920,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	324.664.234,00	245.703.712,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	474.169.640,00	352.561.168,00
Inspektorat Daerah	224.868.177,00	126.803.694,00
Kecamatan Kapuas Barat	169.563.881,00	129.100.875,00
Kecamatan Kapuas Tengah	372.407.815,00	98.812.805,00
Kecamatan Kapuas Murung	232.599.096,00	149.931.938,00
Kecamatan Timpah	102.214.419,00	90.772.703,00
Kecamatan Bataguh	131.519.253,00	106.725.154,00
Kecamatan Tamban Catur	107.026.406,00	72.416.392,00
Kecamatan Dadahup	105.972.392,00	67.535.010,00
Kecamatan Pasak Talawang	118.230.296,00	65.379.288,00
Kecamatan Mandau Talawang	98.890.284,00	113.947.065,00
Kecamatan Pulau Petak	101.785.376,00	76.403.351,00
Kecamatan Kapuas Kuala	117.428.840,00	73.992.137,00
Kecamatan Kapuas Hulu	264.164.575,00	121.501.346,00
Kecamatan Selat	397.678.757,00	284.434.753,00
Kecamatan Kapuas Hilir	274.867.457,00	175.947.549,00
Kecamatan Kapuas Timur	98.993.451,00	59.705.864,00
Kecamatan Basarang	93.304.684,00	51.575.649,00
Kecamatan Mantangai	181.334.438,00	97.855.082,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	173.855.372,00	93.664.316,00
JUMLAH	61.567.550.448,64	51.884.106.610,63

7.5.4.2.1.7.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan- LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	28.636.289.165,00	27.317.193.193,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.636.289.165,00 dan Rp27.317.193.193,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 195: Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	2023	2022
Dinas Pendidikan	9.634.422.834,00	8.977.846.486,00
Dinas Kesehatan	3.037.268.210,00	2.600.775.611,00
RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	637.288.096,00	453.286.370,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.139.840.708,00	2.446.375.491,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	28.837.688,00	28.258.169,00
Dinas Sosial	114.389.951,00	34.609.012,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	181.106.312,00	177.648.202,00
Dinas Lingkungan Hidup	670.950.521,00	645.477.701,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62.625.348,00	53.241.740,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	69.121.979,00	69.121.979,00
Dinas Perhubungan	1.663.392.241,00	5.986.270.120,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	24.299.906,00	24.299.906,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59.784.834,00	53.450.654,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga	506.373.589,00	468.833.006,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	64.313.805,00	59.003.506,00
Dinas Tenaga Kerja	31.920.143,00	31.920.143,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	105.544.846,00	99.850.537,00
Dinas Ketahanan Pangan	35.162.704,00	35.162.704,00
Dinas Perikanan	270.083.094,00	254.951.854,00
Dinas Pertanian	787.440.563,00	750.300.416,00

Uraian	2023	2022
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.582.471.828,00	1.575.555.398,00
Dinas Transmigrasi	90.806.078,00	90.806.078,00
Sekretariat Daerah	4.607.847.404,00	809.104.460,00
Sekretariat DPRD	592.175.978,00	545.618.089,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	113.557.162,00	93.208.788,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.548.101.887,00	22.910.841,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	76.164.232,00	74.277.837,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.195.931,00	68.962.906,00
Inspektorat Daerah	62.725.332,00	62.725.332,00
Kecamatan Kapuas Barat	41.519.796,00	34.166.429,00
Kecamatan Kapuas Tengah	22.044.086,00	15.848.000,00
Kecamatan Kapuas Murung	15.841.231,00	15.841.231,00
Kecamatan Timpah	96.181.781,00	95.755.910,00
Kecamatan Bataguh	20.871.358,00	20.740.708,00
Kecamatan Tamban Catur	29.347.360,00	28.188.960,00
Kecamatan Dadahup	26.720.112,00	26.720.112,00
Kecamatan Pasak Talawang	22.189.866,00	19.782.946,00
Kecamatan Mandau Talawang	24.854.800,00	24.854.800,00
Kecamatan Pulau Petak	20.534.434,00	20.534.434,00
Kecamatan Kapuas Kuala	16.091.210,00	13.092.928,00
Kecamatan Kapuas Hulu	50.554.163,00	50.233.500,00
Kecamatan Selat	173.876.975,00	172.026.975,00
Kecamatan Kapuas Hilir	70.763.138,00	61.816.457,00
Kecamatan Kapuas Timur	24.702.640,00	14.922.640,00
Kecamatan Basarang	31.853.812,00	31.853.812,00
Kecamatan Mantangai	29.429.896,00	29.429.896,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.699.303,00	47.530.119,00
Jumlah	28.636.289.165,00	27.317.193.193,00

7.5.4.2.1.7.3. Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO

Beban Penyusutan	Tahun 2023	Tahun 2022
Jalan dan Irigasi- LO	288.097.857.225,00	219.616.343.440,00

Beban Penyusunan Jalan Irigasi dan Jaringan- LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp288.097.857.225,00 dan Rp219.616.343.440,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 196: Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi - LO

Uraian	2023	2022
Dinas Pendidikan	110.993.593,00	116.223.630,00
Dinas Kesehatan	839.705.633,00	599.061.479,00
RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	212.741.743,00	200.358.718,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	282.441.728.162,00	214.398.960.584,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	185.000,00	185.000,00
Dinas Sosial	745.312,00	745.312,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.682.981.490,00	1.682.981.490,00
Dinas Lingkungan Hidup	77.844.533,00	77.844.532,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.508.425,00	5.508.425,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	105.833,00	105.834,00
Dinas Perhubungan	392.699.635,00	369.552.895,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	23.442.594,00	23.442.594,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.190.812,00	2.190.812,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.477.151,00	1.822.414,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	597.458,00	597.458,00
Dinas Tenaga Kerja	965.632,00	965.632,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.335.804,00	1.267.054,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.826.798,00	1.826.798,00
Dinas Perikanan	362.767.334,00	147.501.504,00

Uraian	2023	2022
Dinas Pertanian	285.093.427,00	273.756.306,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	35.897.566,00	35.897.566,00
Dinas Transmigrasi	1.284.061.745,00	1.412.306.328,00
Sekretariat Daerah	37.227.181,00	58.328.097,00
Sekretariat DPRD	57.026.823,00	33.066.707,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.070.115,00	5.107.315,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	82.500,00	6.875,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.015.500,00	3.015.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.112.400,00	2.112.400,00
Inspektorat Daerah	982.561,00	982.560,00
Kecamatan Kapuas Barat	13.842.000,00	11.575.334,00
Kecamatan Kapuas Tengah	484.375,00	484.375,00
Kecamatan Kapuas Murung	20.084.318,00	19.200.983,00
Kecamatan Timpah	24.766.667,00	29.720.000,00
Kecamatan Bataguh	11.403.333,00	9.020.000,00
Kecamatan Dadahup	6.007.567,00	9.158.400,00
Kecamatan Mandau Talawang	2.845.000,00	2.845.000,00
Kecamatan Pulau Petak	1.062.242,00	1.063.754,00
Kecamatan Kapuas Kuala	387.500,00	387.500,00
Kecamatan Kapuas Hulu	75.000,00	75.000,00
Kecamatan Selat	23.323.367,00	21.195.928,00
Kecamatan Kapuas Hilir	114.863.178,00	49.848.713,00
Kecamatan Kapuas Timur	600.000,00	600.000,00
Kecamatan Basarang	2.697.884,00	2.697.884,00
Kecamatan Mantangai	150.000,00	150.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.852.034,00	2.598.750,00
Jumlah	288.097.857.225,00	219.616.243.440,00

7.5.4.2.1.7.4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO

Beban Amortisasi Aset	Tahun 2023	Tahun 2022
Tidak Berwujud - LO	1.582.079.123,00	1.434.187.109,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan beban bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa. Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.582.079.123,00 dan Rp1.434.187.109,00.

Tabel 197: Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud – LO

Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	45.971.542,00	46.694.240,00
Dinas Kesehatan	40.000.000,00	40.000.000,00
RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	4.013.533,00	4.378.400,00
BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	1.248.800,00	728.467,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	854.353.000,00	969.130.667,00
Dinas Lingkungan Hidup	56.360.333,00	59.692.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.333,00	3.500.000,00
Dinas Perhubungan	31.284.200,00	25.364.200,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.283.334,00	14.700.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.209.166,00	30.701.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.383.334,00	0,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.998.560,00	499.880,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.150.000,00	3.575.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.300.000,00	216.667,00
Sekretariat Daerah	524.351,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	280.701.740,00	60.844.240,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.528.817,00	21.275.181,00

Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	124.450.000,00	116.950.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.373.080,00	17.325.167,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.612.000,00	18.612.000,00
JUMLAH	1.582.079.123,00	1.434.187.109,00

7.5.4.2.2 Beban Transfer –LO

Beban Transfer - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	179.143.604.970,00	283.412.735.544,00

Beban Transfer pada Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp179.143.604.970,00 Dan Rp283.412.735.544,00 terdiri dari;

7.5.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil -LO

Beban Bagi Hasil - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	9.020.483.300,00	4.213.038.800,00

Beban Bagi Hasil -LO merupakan beban Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa. Jumlah Beban Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.020.483.300,00 dan Rp4.213.038.800,00.

Tabel 198: Beban Bagi Hasil – LO

Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / Turun (Rp)	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten /Kota dan Desa	8.287.063.300,00	3.322.651.200,00	4.964.412.100,00	149,41
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa	733.420.000,00	890.387.600,00	(156.967.600,00)	(17,63)
Jumlah	9.020.483.300,00	4.213.038.800,00	4.807.444.500,00	114,11

7.5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan -LO

Beban Bantuan Keuangan - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	170.123.121.670,00	279.199.696.744,00

Beban Bantuan Keuangan - LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp170.123.121.670,00 dan Rp279.199.696.744,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 199: Beban Bantuan Keuangan – LO

Perangkat Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik / Turun (Rp)	%
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	245.000.000,00	240.000.000,00	5.000.000,00	2,08
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/ Kota ke Daerah Provinsi	0,00	245.000.000,00	(245.000.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ke Desa	0,00	278.588.061.044,00	(278.714.696.744,00)	(100,00)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ke Desa	169.878.121.670,00	0,00	169.878.121.670,00	100,00
Jumlah	170.123.121.670,00	279.199.696.744,00	(109.076.575.074,00)	(39,07)

7.5.4.2.3 Beban Tidak Terduga – LO

Beban Transfer - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	6.170.159.923,00	3.338.057.575,00

Beban Transfer pada Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.170.159.923,00 Dan Rp3.338.057.575,00.

7.5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi -LO

Surplus/Defisit dari Operasi - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	1.381.928.998.718,46	604.385.335.825,38

Surplus/Defisit dari Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.381.928.998.718,46 dan Rp604.385.335.825,38

KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(21.723.102.083,00) dan Rp(12.143.958.638,01) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 200: Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	2.002.452.307,35
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	10.493.470.451,00	0,00
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar - LO	21.725.102.083,00	14.146.410.945,36
Jumlah	(21.723.102.083,00)	(12.143.958.638,01)

7.5.4.3.1 Pos Luar Biasa /Beban Tak Terduga - LO

Beban Tidak Terduga - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	0,00	0,00

Beban Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.3.2 Surplus (Defisit) Laporan Operasional

Surplus /Defisit Laporan merupakan Surplus/Defisit dari Operasi yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi dan surplus/ defisit dari kegiatan non opsional Ditambah Surplus/Defisit dari pos luar biasa selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.360.205.896.635,46.

7.5.5 PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

7.5.5.1 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas. yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp689.120.158.569,30 dan Rp689.120.158.569,30.

7.5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.621.655.503.640,90 dan Rp1.990.389.186.538,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 201: Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
ARUS KAS MASUK		
Penerimaan Pajak Daerah	42.289.931.898,60	70.676.578.950,52
Penerimaan Retribusi Daerah	5.983.885.900,08	5.888.173.171,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan	27.049.142,65	7.704.570.345,00

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	89.868.413.079,57	67.204.381.407,57
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	976.740.916.291,00	586.640.653.808,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	808.725.785.465,00	777.279.406.867,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik)	155.922.847.825,00	191.191.616.615,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	215.901.190.995,00	178.894.925.240,00
Penerimaan Dana Insentif	-	1.770.863.000,00
Dana Desa	186.839.388.000,00	-
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	138.586.085.987,00	101.929.785.282,20
Penerimaan Bantuan Keuangan	170.000.000,00	-
Penerimaan Hibah	600.009.057,00	1.208.231.852,00
Jumlah Arus Kas Masuk	2.621.655.503.640,90	1.990.389.186.538,29

7.5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.635.706.388.430,40 dan Rp1.202.817.911.268,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 202: Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	617.979.936.208,00	648.471.012.472,92
Pembayaran Barang dan Jasa	535.019.096.570,40	459.074.769.793,29
Pembayaran Bunga	5.508.154.324,00	5.614.736.389,90
Pembayaran Hibah	104.789.760.160,00	79.937.515.037,88
Pembayaran Bantuan Sosial	256.288.275,00	1.564.511.200,00
Pembayaran Tak Terduga	6.170.159.923,00	3.457.327.575,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	9.020.483.300,00	4.213.038.800,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	-	240.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	356.717.509.670,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.635.706.388.430,40	1.202.817.911.268,99

7.5.5.2 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp503.790.153.221,00) dan (Rp509.775.728.816,25);

7.5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp503.790.153.221,00 dan Rp509.775.728.816,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 203: Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
--------	-----------	-----------

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
ARUS KAS KELUAR		
Perolehan Tanah	8.607.417.219,00	1.874.805.530,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	79.563.896.620,00	70.405.239.790,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	96.495.440.040,00	88.084.233.307,58
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	312.313.886.972,00	341.442.656.648,67
Perolehan Aset Tetap Lainnya	509.512.370,00	1.768.793.540,00
Perolehan Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00
Jumlah	503.790.153.221,00	509.775.728.816,25

7.5.5.3 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pendanaan meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp28.986.961.309,13) dan Rp39.043.079.829,74.

7.5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp54.794.625.000,00

7.5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.986.961.309,13 dan Rp15.751.545.170,26.

7.5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp81.588.601,00

7.5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 0,00 dan Rp81.588.601,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 204: Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2023(Rp)	2022(Rp)
1	Penerimaan PFK	0,00	81.588.601,00
	Jumlah	0,00	81.588.601,00

7.5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 205: Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pengeluaran PFK	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

7.5.5.5 Kenaikan / Penurunan Kas

Kenaikan/Penurunan Kas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp453.172.000.680,37 dan Rp316.838.626.282,79

7.5.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp841.697.891.183,53 dan Rp169.617.237.319,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 206: Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Akhir Kas di Daerah	481.713.203.741,00	386.244.286.618,04
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000.000.000,00	0,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	4.650.900.056,53	2.057.253.485,12
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	10.804.060,00	224.350.400,00
6	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya (Kas BOK Puskesmas)	4.322.983.326,00	0,00
7	Deposito Jangka Pendek Kas Daerah	350.000.000.000,00	0,00
	Jumlah	841.697.891.183,53	388.525.890.503,16

Terdapat Selisih sebesar Rp81.588.601,00 antara SILPA di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp 841.616.302.582,53 dan Saldo Akhir Kas sebesar Rp841.697.891.183,53, selisih tersebut merupakan Saldo Taperum yang terlanjur terpotong dari PNS dan mengendap di Kas daerah sebesar Rp 81.588.601,00;

7.5.6 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

7.5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.290.700.731.744,21 dan Rp3.730.297.759.312,02.

7.5.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.370.611.545.286,46 dan Rp592.241.377.187,37

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp9.582.847.991,57) dan (Rp31.838.404.755,18) terdiri dari koreksi nilai persediaan, Koreksi selisih revaluasi aset tetap dan koreksi lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 207: Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif

No	Uraian	2023	2022
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	500.500,00
2	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	(31.838.905.255,18)
3	Lain - Lain	(20.074.318.442,57)	0,00
	Jumlah	(20.074.318.442,57)	(31.838.404.755,18)

Tabel 208: Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif – Lain-Lain

No	Uraian	Tambah	Kurang
1	Koreksi akumulasi penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sesuai rekon aset tahun 2023	0,00	4.864.784.955,00
2	Koreksi akumulasi Penyusutan Aset rusak berat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	651.000,00
3	Koreksi aset pindah ruang- ke Ekstrakompatible	0,00	8.000.000,00
4	Koreksi Nilai saldo aset penyusutan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,33 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin (0,85) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.	0,00	0,52
5	Koreksi aset atas mutasi antar Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	209.660.000,00	0,00

No	Uraian	Tambah	Kurang
6	Koreksi aset atas mutasi antar Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan	0,00	209.660.000,00
7	Koreksi atas Saldo Tuntutan atas Ganti Kerugian Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	4.941.968.095,67
8	Koreksi atas Saldo Tuntutan atas Ganti Kerugian Daerah	19.398.252.042,76	
	Koreksi KurangPiutang Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang tercatat (pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercatat juga pada Aset Lainnya (Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain)	5.165.732.634,00	
	Koreksi KurangPiutang Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang tercatat (pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercatat juga pada Aset Lainnya (Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain)		5.165.732.634,00
9	Koreksi atas aset tetap yang belum tercatat pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Daerah berupa Aset Tetap Tanah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.717.504.000,00	
	Koreksi atas aset tetap yang belum tercatat pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Daerah berupa Aset Tetap Tanah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM	2.654.414.000,00	
	Koreksi atas aset tetap yang belum tercatat pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Daerah berupa Aset Tetap Tanah pada Dinas Perikanan	740.700,00	
	Koreksi atas aset tetap yang belum tercatat pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Daerah berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.118.811.751,00	
	Jumlah	35.265.115.127,8	15.190.796.685,2
	Saldo Akhir Lain-Lain		(20.074.318.442,57)

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.670.980.946.822,24 dan Rp4.290.700.731.744,21.

7.6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 masih disajikan menggunakan struktur organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sedang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024.
2. Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 untuk Kebijakan Akuntansi tentang Sistem Akuntansi Properti Investasi belum di sajikan dalam penyusunan Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 karena masih dalam proses di Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Untuk Hibah Pemerintah Daerah yang melalui Belanja Hibah Pemerintah Daerah ke Instansi Vertikal secara Administrasi masih ada beberapa yang masih dalam proses, setelah

pekerjaan selesai dilaksanakan.

7.7. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasi. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban), dan ekuitas; dan
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pj. Bupati Kapuas



Erlin Hardi

LAMPIRAN